

**TRADISI *NANGUNG RUMAH* DALAM PENATAAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DESA PULAU BUNGIN KABUPATEN SUMBAWA NTB**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh**

**Dina Karlina**  
**Nim. 6080115092**

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, .....

Penyusun,

Dina Karlina  
60800115092



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tradisi *Nangung Rumah* Dalam Penataan Kawasan  
Permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa NTB  
Nama Mahasiswa : Dina Karlina  
NIM : 60800115092  
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Nursyam Aksa, S.T., M.SiRisma Handayani, S.Ip., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin MakassarKetua Jurusan Teknik Perencanaan  
wilayah dan kotaProf. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd  
NIP. 19730412 200003 1 001A. Idham AP.S.T., M.Si  
NIP. 19761007 200912 1002

Scanned by TapScanner

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tradisi *Nangung Rumah* Dalam Penataan Kawasan Permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa NTB " yang disusun oleh Dina Karlina, NIM: 60800115092, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata Gowa, 09 Maret 2020

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(  )
Sekretaris	: Henny Haerany, G, S.T., M.T	(  )
Munaqisy I	: A. Idham AP, S.T., M.Si	(  )
Munaqisy II	: Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag	(  )
Pembimbing I	: Nursyam Aksa S, S.T., M.Si	(  )
Pembimbing II	: Risma Handayani, S.IP., M.Si	(  )

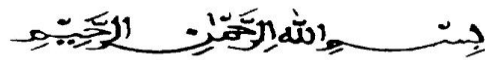
Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



**Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**  
NIP. 19710412 200003 1 001

Scanned by TapScanner

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah atas nama Baginda Rasulullah Muhammad Saw, suri tauladan manusia sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamin, berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tradisi Nangung Rumah Dalam Penataan Kawasan Permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa NTB”**. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata Satu pada Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Banyak hambatan yang penulis temukan dalam penyusunan skripsi ini, namun dengan kerja keras dan tekad yang kuat serta adanya bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil, terutama kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Kadir dan Ibunda Jawiyah sebagai inspirasi hidup yang bersedia membagi cinta tanpa pamrih kepada anak-anaknya yang selalu mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang luar biasa, serta saudara-saudariku Heri Adekantari, Heni Diana dan Siti Ardianti yang selalu mendukung, menyemangati dan mengasihi semoga Allah SWT membalasnya dengan surga, *Allahumma amin*. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Nursyam AS, S.T.,M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Risma Handayani,

S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengajarkan banyak hal, memberikan kritikan yang sangat bermanfaat serta meluangkan waktunya dalam membantu penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Rasa terimakasih tersebut penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi serta segenap dosen dan staf pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. A. Idham A.P.,S.T.,M.Si dan Dr. Henny Haerani G, S.T.,M.T., selaku ketua dan sekretaris jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Nursyam Aksa, S.T., M.Si, dan Risma Handayani, S.Ip., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis mulai awal bimbingan hingga rampungnya tugas akhir.
5. A. Idham AP, S.T., M.Si dan Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penguji yang telah meluanga waktu dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian tugas akhir.



6. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Staf Perpustakaan, Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti perkuliahan.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Desa Pulau Bungin, toko adat dan seluruh masyarakat Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa NTB
8. Sahabat terbaikku Rusman Umar yang selalu mengingatkan, memberikan saran, menghibur, memberikan motivasi serta materil terimakasih selalu mensupport penulis serta menginspirasi dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Sahabat sekaligus saudara selama di rantauan, “DDF” Dewi Hardyanti Lukman, Nurfasih yang sangat berpengaruh proses pembelajaran selama kuliah sampai akhir ini.
10. Saudara/i seperjuangan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 015 (PREDATOR) terkhusus kepada Dewi Hardyanti Lukman, Nurfasih, Halimatussadia, Arni Putri Awaliyah Umar, Muh. Rifky Raynaldi, Muhammad Syahril, Puqhu Pangestu yang telah menjadi orang terdekat selama empat tahun bersama, semoga kita semua bisa mencapai cita-cita dan kesuksesan kelak.
11. Tim survey selama melakukan penelitian yang selalu setia membantu Hartono dan Gifari Walkatin

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya

membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amiin

Samata-Gowa, Februari 2020

Dina Karlina





## ABSTRAK

Nama : Dina Karlina

Nim : 60800115092

Judul : Tradisi *Nangung Rumah* Dalam Penataan Kawasan Permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa NTB

---

Suku Bajo di Desa Pulau Bungin masih sangat mempertahankan tatanan kehidupan berdasarkan tradisi, perilaku dan budayanya yang bersifat tradisional walaupun sudah ada yang mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern ini dan masyarakat yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kearifan dan nilai budaya lokal seperti tradisi *Nangung Rumah* yaitu syarat bagi para laki-laki yang hendak menikah dengan membuat pondasi rumah dari material batu karang mati. Tujuan pada penelitian ingin mengetahui bagaimana arahan penataan kawasan permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa ditengah keberadaan budaya *Nangung Rumah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luasan pulau tidak mampu menampung penduduk bermukim Desa Pulau Bungin tidak dapat dilakukan pengembangan pembangunan kawasan permukiman, untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk untuk tahun yang akan datang maka diarahkan permukimannya ke pulau lainnya atau Desa terdekat dengan catatan masih memiliki lahan yang dapat dikembangkan untuk menjadi kawasan permukiman.

***Kata Kunci : Tradisi, Penataan, Kawasan Permukiman***

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Sistematika Penelitian .....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Permukiman .....	10
1. Definisi Permukiman .....	10
2. Lingkungan Permukiman .....	13
3. Permukiman Tradisional .....	15
B. Pola Permukiman .....	16
C. Pola Ruang .....	21
1. Kawasan Lindung .....	21
2. Kawasan Budidaya .....	24
D. Penataan Ruang .....	26
E. Penataan Ruang Wilayah Pesisir .....	28
F. Daya Dukung Ruang dan Fungsi Lindung .....	30
1. Daya Dukung Wilayah Untuk Permukiman (DDPm) .....	31
G. Budaya .....	34
1. Definisi Budaya .....	34
2. Sejarah Pulau Bungin .....	36
3. Budaya <i>Nangung Rumah</i> .....	38
H. Tinjauan Kebijakan .....	41
I. Perencanaan Penataan Permukiman .....	43
J. Kerangka Pikir .....	46
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
1. Lokasi Penelitian .....	48
2. Waktu Penelitian .....	48
C. Jenis dan Sumber Data .....	48

1. Data Primer .....	48
2. Data Sekunder .....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
1. Pemetaan .....	49
2. Observasi Lapangan .....	50
3. Wawancara .....	50
E. Variabel Penelitian .....	51
F. Metode Analisis Data .....	51
1. Proyeksi Penduduk .....	52
2. Daya Dukung Wilayah Untuk Permukiman (DDDPm) .....	52
3. Analisis Daya Tampung .....	53
G. Defenisi Operasional .....	66

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa .....	70
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Alas .....	76
1. Letak Geografis .....	76
2. Aspek Demografi .....	79
C. Gambaran Umum Desa Pulau Bungin .....	81
1. Letak Geografis .....	81
2. Kondisi Topografi .....	85
3. Jenis Tanah .....	85
4. Curah Hujan .....	85
5. Kemiringan Lereng .....	85
6. Penggunaan Lahan ( <i>Land use</i> ) .....	85
7. Kondisi Demografi .....	92
8. Permukiman Desa Pulau Bungin .....	93
D. Analisis .....	99
1. Pola Permukiman Desa Pulau Bungin .....	99
2. Arahana Penataan Kawasan Permukiman Desa Pulau Bungin .....	104
a. Analisis Proyeksi Penduduk .....	104
b. Analisis Daya Dukung Wilayah Untuk Permukiman (DDPm) .....	105
c. Analisis Kemampuan Lahan .....	106
E. Arahana Penataan Kawasan Permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa ditengah Keberadaan <i>Budaya Nangung</i> Rumah .....	123
1. Aspek Tradisi/Budaya .....	123
2. Aspek Pola Ruang .....	124
F. Pandangan Islam Terhadap Penataan Kawasan Permukiman .....	125

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Tipe-tipe Permukiman Manusia .....	11
<b>Tabel 2</b> Konsumsi lahan perkapita .....	32
<b>Tabel 3</b> Kebutuhan Ruang Per Kapita Menurut Lokasi Geografis (Zona Kawasan) .....	33
<b>Tabel 4</b> Variabel Penelitian .....	51
<b>Tabel 5</b> Pembobotan SKL Morfologi .....	54
<b>Tabel 6</b> Pembobotan SKL Kemudahan dikerjakan .....	54
<b>Tabel 7</b> Pembobotan SKL Kestabilan Lereng .....	55
<b>Tabel 8</b> Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi .....	56
<b>Tabel 9</b> Pembobotan SKL Ketersediaan Air .....	57
<b>Tabel 10</b> Pembobotan Analisis SKL Untuk Drainase .....	58
<b>Tabel 11</b> Pembobotan SKL Terhadap Erosi .....	59
<b>Tabel 12</b> Pembobotan SKL Pembuangan Limbah .....	60
<b>Tabel 13</b> Pembobotan SKL .....	64
<b>Tabel 14</b> Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 .....	71
<b>Tabel 15</b> Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 .....	73
<b>Tabel 16</b> Luas Desa di Kecamatan Alas dirinci perdesa Tahun 2017 .....	76
<b>Tabel 17</b> Kepadatan Penduduk di Kecamatan Alas dirinci perdesa Tahun 2017 .....	79
<b>Tabel 18</b> Jumlah Luas Lahan Desa Pulau Bungin Tahun 2019 .....	86
<b>Tabel 19</b> Jumlah Penduduk Desa Pulau Bungin Tahun 2017 .....	92
<b>Tabel 20</b> Jumlah Kartu Keluarga Desa Pulau Bungin Tahun 2017 .....	92
<b>Tabel 21</b> Jumlah Luas perdesa di Desa Pulau Bungin Tahun 2017 .....	92
<b>Tabel 22</b> Daya Dukung Permukiman Desa Pulau Bungin .....	106
<b>Tabel 23</b> Pembobotan SKL .....	110

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Jenis Pola Persebaran.....	18
<b>Gambar 2</b> Kerangka Pikir .....	46
<b>Gambar 3</b> Peta Administrasi Kabupaten .....	75
<b>Gambar 4</b> Luas Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 .....	77
<b>Gambar 5</b> Peta Administrasi Kecamatan.....	78
<b>Gambar 6</b> Kepadatan Penduduk di Kecamatan Alas dirinci perdesa Tahun 2017.....	80
<b>Gambar 7</b> Peta Administrasi Desa Pulau Bungin Tahun 2017.....	83
<b>Gambar 8</b> Peta Administasi Tahun 2019 .....	84
<b>Gambar 9</b> Peta Topografi .....	87
<b>Gambar 10</b> Peta Jenis Tanah .....	88
<b>Gambar 11</b> Peta Curah Hujan .....	89
<b>Gambar 12</b> Peta Kemiringan Lereng .....	90
<b>Gambar 13</b> Peta Penggunaan Lahan.....	91
<b>Gambar 14</b> Jumlah Luas perdusun di Desa Pulau Bungin Tahun 2017 .....	93
<b>Gambar 15</b> Permukiman Desa Pulau Bungin .....	94
<b>Gambar 16</b> Permasalahan Permukiman.....	95
<b>Gambar 17</b> Sarana Pendidikan Desa Pulau Bungin.....	96
<b>Gambar 18</b> Sarana Perkantoran Desa Pulau Bungin .....	97
<b>Gambar 19</b> Sarana Peribadatan Desa Pulau Bungin.....	98
<b>Gambar 20</b> Sarana Perkuburan Desa Pulau Bungin .....	99
<b>Gambar 21</b> Peta Citra Satelit .....	101
<b>Gambar 22</b> Peta Kawasan Lindung .....	102
<b>Gambar 23</b> Peta Kawasan Melebihi Kapasitas Kawasan Lndung.....	103
<b>Gambar 24</b> Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Pulau Bungin.....	105
<b>Gambar 25</b> Peta SKL Morfologi .....	113
<b>Gambar 26</b> Peta SKL Kemudahan Dikerjakan.....	114
<b>Gambar 27</b> Peta SKL kestabilan Lereng .....	115
<b>Gambar 28</b> Peta SKL Kestabilan Pondasi .....	116
<b>Gambar 29</b> Peta SKL Ketersediaan Air.....	117
<b>Gambar 30</b> Peta SKL Untuk Drainase.....	118
<b>Gambar 31</b> Peta SKL Terhadap Erosi .....	119
<b>Gambar 32</b> Peta SKL Pembuangan Air Limbah .....	120
<b>Gambar 33</b> Peta SKL Terhadap Bencana Alam .....	121
<b>Gambar 34</b> Peta Kemampuan Lahan .....	122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, bahwa kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman (SNI 03-1733-2003: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan). Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Sadana, 2014). Secara ilmu bahasa, kata permukiman tergolong ke dalam kata benda. Dalam bahasa inggris, permukiman dikenal sebagai *human settlement*, yaitu: suatu kumpulan manusia baik itu berada di kota maupun desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Pentingnya penataan ruang dalam pemanfaatan ruang saat ini menjadi trend atau isu yang kerap dibicarakan di setiap daerah, membangun secara bebas menjadi salah satu pemicu kepadatan dan kekumuhan dalam suatu kawasan, hal ini juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk meningkat kualitas suatu wilayah sehingga tidak

merusak aspek-aspek yang terkait didalamnya. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”(Kementrian Agama,RI;2012).

Dalam Q.S Ar-Rum/30:41 menjelaskan bahwa kerusakan dimuka bumi baik di darat maupun di laut ini adalah akibat ulah tangan manusia sendiri, sebagaimana di Desa Pulau Bungin memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat, sehingga daratan yang sudah tidak ada dan memanfaatkan air laut untuk menjadi lahan sebagai tempat tinggal mereka dan menggunakan material batu karang mati untuk menjadi pondasi rumah mereka, setiap tahun hal itu terjadi karena itu merupakan suatu budaya yang menjadi persyaratan bagi kau laki-laki yang hendak ingin melamar perempuan yang mereka sukai, maka tanpa mereka ketahui bahwa sudah terjadi kerusakan, seperti kekumuhan didarat dan kerusakan ekosistem dilaut. Manusia mempunyai sifat dan sikap yang berbeda, selain sifat dan sikap tentu daerah atau wilayah terdiri dari beberapa makhluk artinya masing-masing daerah tentu berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya, sehingga bagaimana ruang itu di tata dan di rancang sesuai dengan tradisi atau ciri khas daerah masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ



أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Kementrian Agama,RI;2012).

Allah Swt menciptakan manusia dalam 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Kedudukan manusia semua sama dimata Allah, yang paling mulia adalah orang yang bertaqwa. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan antara suku satu dengan suku yang lain, semua manusia derajatnya sama di sisi Allah Swt salah satu yang merupakan bagian yang paling penting disini yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan terkait dengan budaya, norma, tradisi dan sebagainya, Khususnya pada kawasan permukimannya yaitu permukiman yang masih tradisional. Permukiman tradisional merupakan tempat tinggal yang masih berpegang teguh dengan nilai adat dan budaya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:4 yang berbunyi:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Kementrian Agama,RI;2012).

Dalam Q.S An-Nisa/4:4 menjelaskan bahwa kaum laki-laki yang hendak ingin menikah diperintahkan bahwa berikanlah maskawin kepada wanita yang di nikahi dengan penuh kerelaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Di Kecamatan Alas terdapat satu desa yang mempunyai tradisi dan budaya yaitu Desa Pulau Bungin yang cukup unik ialah budaya *Nangung Rumah Suku Bajo*. Permukiman tradisional tidak lepas oleh pengaruh budaya yang dilandasi dengan kepercayaan lokal, perwujudan budaya suku bajo, ciri khas dari adat istiadat serta rasa seni yang mencerminkan kebudayaannya. Kehidupan sosial budaya dengan adanya tokoh yang dipercayai sebagai perantara atau sebagai ketua kepala suku bajo atau *sandro* yang khas yaitu tata cara (tradisi) masyarakat yang masih sangat kental dengan kekerabatannya. Salah satunya tradisi *Nangung Rumah* yaitu syarat bagi pemuda yang hendak melamar calon istrinya dengan membangun pondasi rumah dari batu karang mati.

Suku Bajo di Desa Pulau Bungin masih sangat mempertahankan tatanan kehidupan berdasarkan tradisi, perilaku dan budayanya yang bersifat tradisional walaupun sudah ada yang mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern ini dan masyarakat yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kearifan dan nilai budaya lokal. Masyarakat Pulau Bungin masih kental dengan rasa kekerabatan dan jiwa gotong royong karena mayoritas masyarakat atau penduduk yang menetap di desa tersebut adalah kerabatnya, sehingga ketika terjadi pembangunan rumah maka lahan yang digunakan yaitu lahan yang berada dekat dengan rumah orang tua atau mertuanya baik bertetangga samping kiri, kanan maupun belakang. Adapun arah pembangunan rumah yaitu tidak mewajibkan arah depan maupun

belakang rumah akan tetapi pada saat pembangunan rumah atau tradisi *Nangung Rumah* ini wajib di pimpin oleh *sandranya*.

Setiap tahunnya terjadi perluasan tanah yang signifikan data sensus penduduk Tahun 2011 menunjukan 3.056 jiwa yang tercatat sebagai penduduk Desa Pulau Bungin, jumlahnya meningkat dalam 8 Tahun terakhir, karena pertumbuhan hidup akibat kelahiran baru, warga Desa Pulau Bungin bebas memperluas tanah atau daratan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing sementara di sisi lain ada pantai dan laut yang perlu di korbakan. Jumlah penduduk terus bertambah akibat kelahiran generasi penerus dan hadirnya pendatang, masyarakat melakukan atau membuat rumah diatas air, sampai menjadi daratan. Pulau yang sangat padat ini terus bertambah luasnya demi mengakomodir kebutuhan lahan baru, lorong demi lorong yang menjadi pembatas antar rumah hampir tidak ditemukannya lahan kosong dan garis pantai pantai tidak terlihat akibat padat dari sampah yang berserahkan, bahkan ruang terbuka hijau tidak ada sehingga ternak kambingpun memakan plastik-plastik dan kardus sebagai bahan pokok makanannya. Terjadinya alih fungsi lahan yang di manfaatkan setiap tahunnya akibat sudah tidak ada lahan daratan yang digunakan sebagai tempat bermukimnya masyarakat Desa Pulau Bungin, sehingga lahan yang digunakan yaitu memanfaatkan material batu karang mati yang di tumpuk sebagai pondasi rumah yang berada di atas laut yang semestinya tidak difungsikan sebagai lahan permukiman, sehingga mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk dan kekumuhan yang semestinya tidak terjadi.

Kawasan permukiman tradisional seperti halnya di permukiman tradisional suku bajo Desa Pulau Bungin merupakan wujud nilai budaya yang masih ada hingga kini dan tetap di pertahankan, walaupun sudah bukan menjadi salah satu persyaratan yang akan menimbulkan kegagalan dalam proses pernikahan, tergantung dan menyesuaikan dari keadaan ekonominya, dengan berkembangnya penduduk setiap tahun maka kebutuhan lahan terus meningkat dan terjadi konflik pemanfaatan lahan antar berbagai pelaku pembangunan di Desa Pulau Bungin, seiring dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, semakin lama semakin canggih atau modern maka perlu adanya upaya arahan penataan kawasan permukiman terhadap masyarakat supaya tidak terjadi kerusakan yang semakin parah namun tetap mempertahankan budaya yang ada. Berdasarkan kondisi itulah yang melatarbelakangi pemilihan objek penelitian untuk mengkaji dan merumuskan **“Tradisi Nangung Rumah Dalam Penataan Kawasan Permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa NTB”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola permukiman di Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa di tinjau dari budaya *Nangung Rumah* ?
2. Bagaimana arahan penataan kawasan permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa ditengah keberadaan budaya *Nangung Rumah* ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan**

- a. Mengetahui pola permukiman di Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa tinjau dari budaya *Nangung Rumah*

- b. Mengetahui arahan penataan kawasan permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa ditengah keberadaan budaya *Nangung Rumah*

## **2. Manfaat**

- a. Secara Akademisi

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan kajian (referensi) bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan arahan penataan kawasan permukiman.

- b. Secara Praktisi

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam memperhatikan arahan penataan kawasan permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan:

### **1. Wilayah**

Ruang lingkup wilayah penelitian dalam hal ini adalah Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa NTB yang merupakan lokasi penelitian.

### **2. Ruang lingkup materi dan penelitian**

Ruang lingkup materi dan penelitian ini yaitu membahas mengenai Tradisi Nangung Rumah Dalam Penataan Kawasan Permukiman. Dalam kajian ini akan membahas mengenai bagaimana penataan kawasan permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa dan memberikan

informasi mengenai budaya *Nangung Rumah* serta memberikan arahan budaya Nangung Rumah dalam penataan kawasan permukiman.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis, dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematis penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang kajian teori mengenai permukiman, lingkungan permukiman, permukiman tradisional, kawasan lindung, kawasan budidaya, definisi budaya, kearifan lokal, sejarah pulau bungin, penataan ruang, penataan ruang wilayah pesisir, daya dukung ruang dan fungsi lindung,, budaya nangung rumah, tinjauan kebijakan, perencanaan penataan permukiman, budaya *nangung rumah*, kerangka pikir.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian, metode analisis data dan definisi operasional.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang gambaran umum makro dan gambaran umum Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa NTB.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian diwilayah studi serta saran-saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Permukiman**

##### **1. Definisi Permukiman**

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, perumahan di definisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman terdapat perbedaan pengertian-pengertian antara pemukiman, permukiman dan perumahan. Permukiman berasal dari kata pemukim. Dari asal katanya, terdapat 3 istilah penting dalam permukiman yang berbeda maknanya yaitu: pemukim, pemukiman, dan permukiman.

- a. Pemukim adalah penghuni suatu tempat atau rumah. Pemukim memiliki arti seseorang yang menghuni suatu tempat tinggal.
- b. Pemukiman berasal dari kata pemukim dengan akhiran. Secara ilmu bahasa, kata pemukiman tergolong dalam kata kerja yang sama dengan *to settle*. Dari pembentukan katanya, pemukiman memiliki arti tindakan memukimkan. Artinya, pemukiman adalah suatu tindakan untuk memukimkan seseorang pada suatu lokasi atau tempat tinggal tertentu.
- c. Permukiman secara ilmu bahasa, kata permukiman tergolong dalam kata benda. Dalam bahasa Inggris, permukiman dikenal sebagai *human settlement*, yaitu suatu kumpulan manusia baik itu berarti kota maupun desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya.

Kawasan permukiman merupakan lingkungan tempat tinggal yang lebih dari sekedar rumah atau perumahan. Lingkungan permukiman juga mencakup segala fasilitas dan kelengkapan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mencari nafkah. Lingkungan hunian yang merupakan desa maupun kota juga merupakan permukiman. Dari banyaknya jumlah penghuni yang ditampung permukiman dapat di bagi ke dalam beberapa tipe. (Sadana, 2014). Pemukiman menurut Shadrach Woods adalah tersusunnya fungsi-fungsi dan elemen-elemen dalam menciptakan ruang yang efektif melalui pengorganisasian suatu daerah (Sri Mudiastuti, 2003).

**Tabel 1** Tipe-tipe Permukiman Manusia

<b>Tipe Permukiman</b>	<b>Bagian Permukiman</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Permukiman Sementara	Rumah dan Lingkungan	3-100
Desa	Perumahan dan Lingkungannya	100-5.000
Kota atau Polis	Kota dan Lingkungannya	5.000-200.000
Metropolis	Metropolis dan Lingkungannya	200.000-10 juta
Megapolis	Megapolis dan Lingkungannya	10 juta-500 juta

Sumber: *Istiqomah dan Hanas, dalam Kajono (2011).*

Menurut Koestoer (1995) batasan permukiman adalah terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik yang merupakan kawasan perkotaan maupun perdesaan. Kawasan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses dan kesempatan berusaha

Direktorat jendral Penataan Ruang Pekerjaan Umum, modul terapan pedoman kriteria teknis kawasan budi daya (Jakarta: PU, 2007). Permukiman dapat berupa suatu kelompok hunian, sebuah dusun, desa dan kota. Pada dasarnya, permukiman dapat dibagi menjadi bentuk pedesaan dan bentuk perkotaan (Muthmainna, 2013). Permukiman desa dan permukiman kota mempunyai karkteristik yang berbeda. Perbedaaan pemukiman desa dan pemukiman kota terlihat dari perbedaan karkteristik penggunaan ruangnya. Singkatnya, karkteristik penggunaan ruang sebuah desa pertanian kecil akan terlihat berbeda dengan sebuah kota metropolitan (Muthmainna, 2012) Permukiman desa juga dikenal dengan sebutan kampung atau dusun. Dari aspek hubungan antar penduduknya, desa merupakan suatu lingkungan dengan penduduk yang memiliki hubungan akrab dan serba informal. Dari aspek aktivitas ekonominya, masyarakat desa juga memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, namun kegiatan yang paling menonjol di desa adalah kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Oleh Karena itu, desa atau dusun identik dengan suatu wilayah permukiman yang terdapat di pedesaan, dengan kegiatan utama pertanian. Pengertian tentang desa diperjelas dalam Undang-Undang Tentang Penataan Ruang (UU No 26 Tahun 2007). Dalam Undang Undang dijelaskan disebutkan bahwa kawasan pedesaaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. Permukiman kota dapat dikenali dari jenis-jenis aktivitas yang dilakukan penduduknya. Jenis-jenis aktivitas yang menonjol dikawasan kota pada umumnya

sangat beragam, seperti: perdagangan, perkantoran, pelayanan jasa, dan pusat pemerintahan. Dari aspek hubungan antar penduduknya, masyarakat kota cenderung kurang akrab dan kurang mengenal satu dengan yang lainnya. Hubungan anatar penduduknya lebih ditentukan oleh kepentingan dibandingkan kekeluargaan. Dalam Undang Undang Tentang Penataan Ruang (UU No 26 Tahun 2007) juga dijelaskan tentang kawasan perkotaan, yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.

## **2. Lingkungan Permukiman**

Lingkungan hidup merupakan hasil interaksi dan hubungan timbal balik yang dinamis antara sumber daya alam non hayati, sumber daya alam hayati, dan sumber daya kultural. Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau hunian yang merupakan bagian dari lingkungan hidup, yakni lingkungan hidup di luar kawasan lindung. Dengan demikian, kualitas lingkungan permukiman sangat bergantung pada kondisi komponen-komponen lingkungan hidup yang menyusunnya. Permukiman kota adalah suatu lingkungan di daerah perkotaan yang terdiri dari perumahan tempat tinggal manusia yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan. Permukiman kota memiliki permasalahan yang rumit akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan pertumbuhan permukiman yang tinggi pula. Tingginya pertumbuhan permukiman yang tidak diiringi dengan perencanaan dan pengendalian dapat mengakibatkan tidak teraturnya penggunaan

lahan dan berkurangnya lahan yang sesuai bagi pembangunan lingkungan permukiman selanjutnya.

Keadaan ini dapat menjadi faktor pendorong kemerosotan kualitas lingkungan permukiman kota sehingga tidak mampu menjaga keberlanjutan pembangunan. Penataan perumahan dan permukiman harus memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di sektor permukiman diartikan sebagai pembangunan permukiman secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Pembangunan perumahan dan permukiman sebagai kegiatan yang berkelanjutan memerlukan dukungan sumber daya pendukung, baik ruang dan lingkungan, alam, kelembagaan dan finansial maupun sumber daya lainnya secara memadai. Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Kesehatan manusia dan pembangunan berkelanjutan adalah hubungan yang tidak mungkin terpisahkan. Manusia sebagai pusat perhatian dari pembangunan yang berkelanjutan harus dapat hidup secara sehat dan produktif, serta selaras dengan alam. Keadaan pasca bencana memberikan peluang untuk membangun dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Peluang dari situasi krisis seperti bencana alam ialah munculnya kesadaran warga masyarakat untuk menyusun langkah-langkah pencegahan bencana dimasa depan. Bencana dapat dianggap sebagai momen penting untuk masa depan yang lebih baik,

namun dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana seringkali terdapat kesenjangan antara penyusunan kebijaksanaan di tingkat makro dengan dorongan percepatan pelaksanaan rehabilitasi di tingkat mikro. Keadaan ini dapat menyebabkan terhambatnya proses penataan ruang yang rasional. Selain itu seringkali dijumpai bahwa pemulihan perumahan dan permukiman pasca bencana masih lebih terfokus pada pembangunan kembali rumah-rumah penduduk dibandingkan dengan pemulihan kembali permukiman (Rusman, 2018).

### **3. Permukiman Tradisional**

Permukiman tradisional merupakan manifestasi dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya penghuninya, dalam proses penyusunannya menggunakan dasar-dasar norma tradisi. Permukiman tradisional sering direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula diluar determinasi. Permukiman tradisional adalah asset kawasan yang dapat memberikan ciri ataupun identitas lingkungan. Identitas kawasan tersebut terbentuk dari pola lingkungan, tata lingkungan binaan, ciri aktivitas budaya sosial budaya dan aktivitas ekonomi yang khas. (Inggriani, 2018).

Menurut Sasongko dalam Nabila Dewi (2016), Permukiman tradisional sering direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan kepercayaan atau agama yang bersifat

husus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula diluar determinasi sejarah (Robert J. Kodoatie, 2010).

### **B. Pola Permukiman**

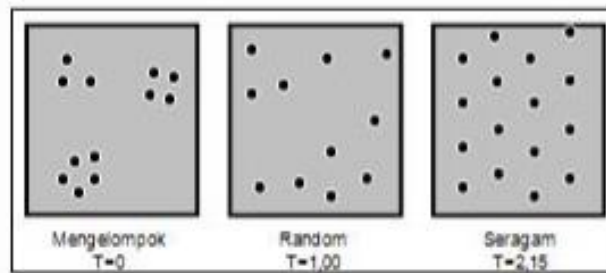
Pola Permukiman adalah kekhasan distribusi fenomena permukiman di dalam ruang atau wilayah, dalam hal ini didalamnya di bahas tentang bentukbentuk permukiman secara individual dan persebaran dari individu-individu permukiman dalam kelompok (Yunus, 1989). Secara garis besar pola persebaran permukiman berbentuk pola permukiman mengelompok dan pola permukiman menyebar. Pola persebaran permukiman mengelompok tersusun dari dusun-dusun atau bangunan-bangunan rumah yang lebih kompak dengan jarak tertentu, sedangkan pola persebaran permukiman menyebar terdiri dari dusun-dusun atau bangunan-bangunan rumah yang tersebar dengan jarak tertentu (Hudson F.S dalam Agus Dwi Martono, 1996).

Pengertian pola permukiman dan persebaran (dispersion) permukiman mempunyai hubungan yang erat. Persebaran permukiman membicarakan hal dimana terdapat permukiman di suatu daerah. Dengan kata lain persebaran permukiman berbicara tentang lokasi permukiman. Pola permukiman membicarakan sifat dari persebaran permukiman tersebut. Dengan kata lain, pola permukiman adalah susunan persebaran permukiman. Persebaran permukiman di wilayah desa-kota pembentukannya berakar dari pola campuran antara ciri perkotaan dan perdesaan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pola permukiman di perkotaan dan di perdesaan. Dalam hal ini wilayah permukiman di perkotaan yang sering disebut sebagai permukiman, memiliki keteraturan



bentuk secara fisik, artinya sebagian besar rumah menghadap secara teratur ke arah jalan. Sedangkan karakteristik kawasan permukiman penduduk desa ditandai oleh ketidakteraturan bentuk fisik rumah dengan pola cenderung mengelompok membentuk perkampungan (Su Ritohardoyo, 2000).

Persebaran permukiman sangat menentukan terhadap pola permukiman, dalam hal ini ada tiga variasi persebaran yaitu (1) Mengelompok (*clustered*), apabila permukiman-permukiman tersebut cenderung berkelompok pada satu atau dua bagian tempat, (2) Acak (*Random*), apabila tidak ada susunan tertentu. pada sebuah persebaran, (3) Seragam (*Uniform*), apabila permukiman permukiman tersebut jaraknya sama atau sama jauhnya dengan tetangganya. Salah satu cara untuk mengukur pola permukiman sapat menggunakan model analisis tetangga terdekat (*nearest neighbor analysis*) yaitu dengan menghitung besarnya parameter tetangga terdekat. Untuk mengetahui apakah pola permukiman yang dianalisis termasuk mengelompok, acak atau seragam, nilai hasil perhitungan dibandingkan dengan continuum (rangkaian kesatuan) nilai parameter tetangga terdekat (T) untuk masing-masing pola, sehingga dapat diketahui apakah pola yang terbentuk berupa pola mengelompok, pola acak (*random*), atau pola seragam.



**Gambar 1** Jenis Pola Persebaran  
Sumber: (Bintarto dan Surastopo, 1979)

Apabila nilai  $T=0$ , maka pola permukiman tersebut adalah mengelompok. Apabila nilai  $T=1,0$ , maka pola permukiman tersebut adalah random atau acak. Sedangkan apabila nilai  $T=2,15$ , maka pola permukiman tersebut adalah seragam. Berdasarkan pada penampakan morfologi kota serta jenis penyebaran areal perkotaan yang ada, Hudson dalam Yunus (1999), mengemukakan beberapa alternative model bentuk kota. Secara garis besar ada 2 buah model bentuk kota yang disarankan, yaitu:

1. Bentuk satelit dan pusat-pusat baru (*satelite and neighbourhood plans*), kota utama dengan kota-kota kecil akan dijalin hubungan pertalian fungsional yang efektif dan efisien;
2. Bentuk stellar atau radial (*stellar or radial plans*), tiap lidah dibentuk pusat kegiatan kedua yang berfungsi memberi pelayanan pada areal perkotaan dan menjorok ke dalam direncanakan sebagai jalur hijau dan berfungsi sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi dan tempat olahraga bagi penduduk kota;
3. Bentuk cincin (*circuit linier or ring plans*), kota berkembang disepanjang jalan utama yang melingkar, dibagian tengah wilayah dipertahankan sebagai daerah hijau terbuka;

4. Bentuk linier bermanik (*bealded linier plans*), pusat perkotaan yang lebih kecil tumbuh di kiri dan di kanan pusat perkotaan utamanya, pertumbuhan perkotaan hanya terbatas disepanjang jalan utama maka pola umumnya linier, dipinggir jalan biasanya ditempati bangunan komersial dan dibelakangnya ditempati permukiman penduduk;
5. Bentuk inti atau kompak (*the core or compact plans*), perkembangan kota biasanya lebih didominasi oleh perkembangan vertical sehingga kemungkinan terciptanya konsentrasi banyak bangunan pada areal kecil;
6. Bentuk memencar (*dispersed city plans*), dalam kesatuan morfologi yang besar dan kompak terdapat beberapa *urban center*, dimana masing masing pusat mempunyai grup fungsi-fungsi yang khusus dan berbeda satu sama lain; dan
7. Bentuk kota bawah tanah (*under ground city plans*); struktur perkotaannya dibangun dibawah permukaan bumi sehingga kenampakan morfologinya tidak diamati pada permukaanbumi, didaerh atasnya berfungsi sebagai jalur hijau atau daerah pertanian yang tetap hijau.

Pola permukiman secara garis besar dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu grid, organik dan diagram.

- a. Grid yaitu pola permukiman dengan system grid dapat ditemui hampir disemua kebudayaan dan merupakan salah satu bentuk kota tua. Pola permukiman dengan bentuk grid dikembangkan oleh Hippodamus, salah satunya adalah Kota Miletus. Pola grid ini merupakan mekanisme yang cukup universal dalam mengatur lingkungan dan pola ini terbentuk karena adanya kebtuhan suatu system yang berbentuk segi empat (grid iron) guna

- b. memberikan suatu bentuk geometri pada ruang-ruang permukiman. Blok-blok permukimannya dirancang untuk memungkinkan 18 rumah tersebut dihubungkan kepada bangunan dan ruang publik (Kostof, 1991).
- c. Organic yaitu pola organik merupakan yang berkembang sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakatnya dan biasanya berkembang dari waktu ke waktu tanpa adanya perencanaan. Pola organik ini perubahannya terjadi secara spontan serta bentuknya mengikuti kondisi topografi yang ada. Sifat pola organik ini adalah fleksibel, tidak geografis, biasanya berupa garis melengkung dan dalam perkembangan masyarakat mempunyai peran yang besar dalam menentukan bentuk permukimannya.
- d. Diagram yaitu pola permukiman dengan system diagram ini biasanya digambarkan dalam simbol atau hirarki yang mencerminkan bentuk system sosial dan kekuasaan yang berlaku saat ini.

Pola permukiman tradisional berdasarkan pada pola persebarannya juga di bagi atas dua yaitu pola menyebar dan pola kelompok. Pola permukiman spasial sebagai berikut:

1. Pola permukiman dengan cara tersebar berjauhan satu sama lain, terutama terjadi dalam daerah yang baru di buka. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya jalan besar, sedangkan orang-orang mempunyai sebidang tanah yang selama suatu masa tertentu harus diusahakan secara terus menerus.
2. Pola permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung/desa, memanjang mengikuti jalan lalu lintas (jalan darat/sungai), sedangkan tanah garapannya berada dibelakangnya.

3. Pola permukiman dengan cara terkumpul dalam sebuah kampung/desa, sedangkan tanah garapannya berada diluar kampung, dan
4. Berkumpul dan tersusun melingkar mengikuti jalan. Pola permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung/desa, mengikuti jalan yang melingkar, sedangkan tanah garapan berada dibelakangnya.

### **C. Pola Ruang**

#### **1. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang di tetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Dalam kaitannya dengan daya dukung lingkungan menurut fungsi kawasan, maka secara normatif apabila suatu wilayah dapat menjalankan fungsinya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup manakala mampu mengalokasikan peruntukan ruang kawasan menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu upaya pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup merupakan saran penting untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi perlindungan suatu wilayah.

Beberapa kebijakan strategis perlindungan dan pengembangan kawasan lindung diantara (a) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (b) pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan beberapa strategi yang berbasis pada daya dukung lingkungan, diantaranya:

a. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:

- 1) Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
- 2) Mewujudkan kawasan fungsi berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
- 3) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

b. Strategi untuk pencegahan dampak kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- 1) Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
- 2) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
- 3) Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/ atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya

- 4) Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan
  - 5) Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
  - 6) Mengolah sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkat kualitas nilai serta keanekaragamannya, dan
  - 7) Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- c. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- 1) Menetapkan dan menguatkan kawasan berfungsi lindung
  - 2) Mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi dan merusak fungsi lindung kawasan, baik di inti wilayah maupun di sekitarnya
  - 3) Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya
  - 4) Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangung yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun, dan



- 5) Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang.

## **2. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Beberapa kebijakan strategis perlindungan dan pengembangan kawasan budidaya diantaranya ialah: (a) perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar- kegiatan budidaya; dan (b) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional disebutkan beberapa strategi yang berbasis pada daya dukung lingkungan, diantaranya:

- a. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi:
  - 1) Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
  - 2) Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

- 3) Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik pertahanan dan keamanan sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - 4) mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional ; dan
  - 5) Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi dan mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di alur laut kepulauan indonesia (alki) zona ekonomi eksklusif indonesia dan atau landasan kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional.
- b. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
- 1) Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  - 2) mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
  - 3) Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
  - 4) Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan

- 5) sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya
- 6) Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

#### **D. Penataan Ruang**

Penataan ruang merupakan upaya yang holistik untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Penataan kawasan pesisir merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan pada wilayah daratan yang ada di sepanjang pesisir pantai. Kawasan pesisir pantai sering dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga terjadi interaksi social didalamnya, seperti yang diutarakan dalam Kwack. 2004 bahwa *Social interaction, spatial area and general bond are important points as an approach in neighborhood relation* Dalam kajian yang lebih detail, pengembangan penataan ruang kawasan pesisir akan mencakup beberapa tujuan yaitu, (Sadana, 2014).:

1. Menciptakan kelestarian kawasan pesisir pantai, lingkungan permukiman dan kegiatan kota,
2. Meningkatkan daya guna dan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan disekitar kawasan pesisir,
3. Mengangkat kekayaan kawasan pesisir pantai termasuk kekayaan warisan budaya serta menjadikan satu keunikan bagi kawasan tersebut,

4. Mengarahkan pengembangan penataan kawasan pesisir yang lebih tegas dalam bidang perencanaan (*planning*), implementasi (*action planning*) dan pengendalian (*good control*).

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukannya upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategic, geopolitik, dan geoeкономи (UU No. 26 Tahun 2007). Menurut Subroto (2003), lahan adalah suatu hamparan (areal) tertentu dipermukaan bumi secara vertical mencakup komponen iklim seperti udara, tanah, air, dan batuan yang ada dibawah tanah serta vegetasi dan aktivitas manusia pada masa lalu atau saat ini yang ada diatas tanah atau permukaan bumi (Robert J. Kodoatie, 2010).

Aspek sosial merupakan kajian yang perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan penataan ruang terutama dalam rangka pemenuhan infrastruktur. Aspek ini meliputi karakteristik sosial penduduk, karakteristik budaya (adat) masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, jumlah penduduk, kepadatan penduduk

dan penyebaran sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan, cengan kehidupan sosial dn budaya penduduk sosial. Pemahaman dan pengertian sosial merupakan usaha untuk memberikan informasi tentang penataan ruang dari masyarakat. Salah satu hal yang didapat adalah sinkronisasi antara kepentingan dan manfaat penataan ruang dengan kepentingan dan manfaat sosial . sebagai contoh untuk pembangunan sebuah penyediaan infrastruktur dengan memahami kepentingan sosial dapat menghindari konflik sosial mulai awal dari awal pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan tata guna lahan.

Analisis terhadap dampak sosial dari proyek diperlukan untuk mengetahui dampak sosial yang diperkirakan akan muncul. Tujuan dari analisis ini adalah meminimalisasi damapak sosial yang melibatkan peran dari masyarakat terhadap proyek setelah pembangunan proyek selesai. Masyarakat dengan kesadarannya akan melihat pentingnya proyek ini bagi kelangsungan hidupnya dan pemerintah. (Robert J. Kodoatie, 2010).

#### ***E. Penataan Ruang Wilayah Pesisir***

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Batas kearah darat sampai dengan batas wilayah kecamatan pesisir, sedangkan kearah laut sampai dengan 12 mil laut untuk wilayah pesisir kabupaten/kota. (Trigunarso, 2017). Wilayah kepepesisiran merupakan wilayah yang kompleks dengan berbagai proses secara fisik maupun nonfisik yang bekerja didalamnya. Proses-proses tersebut berperan berperan dalam pembentukan morfologi pesisir serta fungsinya dalam ekosistem. Sumber lain menurut Suegiarto, 1976 menyatakan bahwa wilayah pesisir yakni daerah pertemuan antara daratan dan

lautan. Daerah kearah daratan meliputi daratan, baik kering maupun terendam air yang masih terpengaruh sifat-sifat laut (seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin); sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi didarat (seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pengundulan hutan dan pencemaran).

Wilayah kepeesisiran secara geomorfologi adalah suatu daerah yang berada diantara *breaker zone* menuju kearah darat sampai pada bentang lahan yang secara genetic masih dapat diamati sebagai hasil proses hasil marin. Wilayah kepeesisiran didalamnya terdapat bentukan hasil proses perombakan marin dan darat seperti diposisi material pasir (*gisik/beach*) oleh gelombang laut, bentukan *dune* (gumuk pasir) yang terbentuk oleh pengaruh angin, dan delta sebagai proses deposisi material lempungan dari daratan. Wilayah pesisir memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Wilayah ini merupakan ruang bagi sebagian besar manusia untuk melakukan aktivitasnya baik dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya (Sadana, 2014).

#### ***F. Daya Dukung Ruang dan Fungsi Lindung***

Daya dukung dan fungsi lindung merupakan kemampuan suatu kawasan dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di dalamnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem (kawasan lindung) pada suatu luasan wilayah tertentu. Kawasan lindung ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Rusthon (1993) melakukan penelitian tentang wanatani dan menemukan sejumlah koefisien penggunaan lahan dalam kaitannya dengan

fungsinya untuk menjaga kelestarian hutan yang pada Akhirnya dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Koefisien lindung untuk masing-masing guna lahan adalah cagar alam (1,00), suaka margasatwa (1,00), taman wisata (1,00), taman buruh (0,82), hutan lindung (1,00), hutan cadangan (0,61), hutan produksi (0,68), perkebunan besar (0,54), perkebunan rakyat (0,42), persawahan (0,46), lading/tegalan (0,21), padang rumput (0,28), danau/tambak (0,98), tanaman kayu (0,37), pemukiman (0,18) tanah kosong (0,01). Berdasarkan koefisien tersebut, dengan menggunakan data pengguaan lahan atau tutupan lahan (*land cover*), dapat dirumuskan perhitungan daya dukung wilayah lindung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{DDL} = \frac{\Sigma(\text{Lg1}_1.\alpha_1 + \text{Lg1}_2.\alpha_2 + \text{Lg1}_3.\alpha_3 + \text{Lg1}_n.\alpha_n)}{\text{LW}} \quad (\dots i)$$

Keterangan :

DDL = Daya Dukung Fungsi Lindung

Lg1<sub>i</sub> = Luas guna lahan jenis

α<sub>i</sub> = Koefisien lindung untuk guna lahan 1

LW = Luasan wilayah (ha)

Daya dukung fungsi lindung (DDL), memiliki kisaran nilai 0 (minimal) sampai 1 (maksimal) oleh karna itu, semakin mendekati nilai 1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila mendekati 0, fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya (Muta'ali. Lutfi, 2015).

### **1. Daya Dukung Wilayah Untuk Permukiman (DDPm)**

Daya dukung wilayah untuk pemukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Dalam menyusun formulasi daya dukung wilayah untuk permukiman, selain diperlukan besaran luas lahan yang cocok dan layak untuk permukiman tetapi juga dibutuhkan standar atau kriteria kebutuhan lahan tiap penduduk.

Luas lahan yang sesuai untuk permukiman dapat didekati dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan tata ruang, maka lahan permukiman adalah area yang ada dalam suatu wilayah, diluar awasan lindung dan terbebas dari bahaya lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, intrusi air tanah dan abrasi, serta berbagai ancaman bahaya geologi lainnya. Adapun untuk pendekatan kemampuan lahan, lahan permukiman dapat diletakkan pada area yang memiliki tingkat kemampuan lahan I sampai IV. Meskipun demikian tidak semua area yang sesuai untuk permukiman dapat dikembangkan secara keseluruhan, melainkan harus di sediakan ruang untuk penggunaan yang lainnya. Buku pedoman penentuan kawasan budidaya menyebutkan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru terdapat sekitar 40%-60% dari luas lahan yang ada dan untuk kawasan kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan.

SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan, menyebutkan tentang kebutuhan layak (minimum) lahan untuk bangunan rumah yaitu 9,6 m<sup>2</sup> perorang dewasa, 4,8 m<sup>2</sup>/ anak-anak dan 100 m<sup>2</sup>/



kavling untuk maximal 5 orang. Dengan asumsi kebutuhan 100 m<sup>2</sup> perkavling dan tambahan 30 % dari luas tersebut untuk tambahan fasilitas lingkungan permukiman, maka idealnya adalah 130 m<sup>2</sup> untuk maximal 5 orang, atau 26 m<sup>2</sup> tiap orang.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 11/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman menyebutkan mengenai kebutuhan ruang maximal penduduk yang lebih variasi menurut zona kawasan. Semakin tinggi karakter perkotaan dan tingkat kepadatan, semakin kebutuhan ruang perkapita. Sebagai contoh, untuk menciptakan kondisi lingkungan permukiman yang serasi, untuk zona perdesaan dibutuhkan 133 m<sup>2</sup>/kapita, zona pinggiran kota 80 m<sup>2</sup>/kapita dan zona perkotaan 26 m<sup>2</sup>/kapita (Muta'ali, 2012).

**Tabel 2** Konsumsi lahan perkapita

No	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (Ha/jiwa)
1	10.000	0,100
2	25.000	0,091
3	50.000	0,086
4	100.000	0,076
5	250.000	0,070
6	500.000	0,066
7	1.000.000	0,061
8	2.000.000	0,057

Sumber: Yeates, 1980

**Tabel 3** Kebutuhan Ruang Per Kapita Menurut Lokasi Geografis (Zona Kawasan)

Lokasi Geografis (Perdesaan-Perkotaan)	Tingkat kepadatan lingkungan	Jumlah Rumah/Ha	$\alpha$ = Kebutuhan Ruang/kapita (m <sup>2</sup> /kapita)
Zona Lindung	Kepadatan 0 jiwa/ Ha	Jumlah rumah 0 unit/Ha	0 m <sup>2</sup> / Kapita
Zona Perdesaan	Kepadatan lebih kecil dari 50 jiwa/ Ha	Jumlah paling banyak 15 unit/ Ha atau luas rata-	133 m <sup>2</sup> / Kapita

		rata tiap rumah maximal 666 m <sup>2</sup>	
Zona Pinggiran Kota	Kepadatan antara 51 sampai dengan 100 jiwa/ Ha	Jumlah paling banyak 25 unit/ Ha atau luas rata- rata tiap rumah maximal 400 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup> / Kapita
Zona Perkotaan	Kepadatan antara 101 sampai dengan 300 Jiwa/ Ha	Jumlah paling banyak 75 unit/ Ha atau luas rata- rata tiap rumah maximal 133 m <sup>2</sup>	26 m <sup>2</sup> / Kapita
Zona Pusat Kota	Kepadatan antara 301 sampai dengan 500 jiwa/ Ha	Jumlah paling banyak 125 unit/ Ha atau luas rata- rata tiap rumah maximal 80 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup> / Kapita
Zona Pusat Kota Metropolitan	Kepadatan lebih besar dari 501 jiwa/ Ha	Jumlah paling banyak 300 unit/ Ha atau luas rata- rata tiap rumah maximal 33 m <sup>2</sup>	6,6 m <sup>2</sup> / Kapita
Zona Preservasi	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan daerah masing masing		

Sumber: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No II/PERMEN/M/2008

## G. Budaya

### 1. Definisi Budaya

Kata “budaya” atau sering juga disebut “kultur” yang merupakan peng-Indonesiaan dari kata *culture* dalam bahasa Inggris atau *cultuur* dalam bahasa Belanda, sesungguhnya berasal dari bahasa Latin “*colere*” sebuah kata kerja yang berarti mengolah tanah, berladang atau bertani (Poespowardojo, 1989: 217-8). Namun ketika istilah ini digunakan para antropolog, pengertiannya menjadi berubah. Misalnya, budaya diartikan sebagai *way of life* atau *common way of life*

pandangan hidup yang berlaku bagi sekelompok masyarakat tertentu (Poepowardojo, *ibid*). Perubahan pengertian ini terjadi karena para anthropolog dalam memahami kegiatan pertanian tidak ditujukan pada apa yang dikerjakan para petani tetapi lebih pada bagaimana cara/pola mengerjakannya. Lebih dari itu, para anthropolog menggunakan istilah budaya tidak terbatas pada lingkup kegiatan pertanian saja tetapi juga melebar sampai pada kegiatan kemasyarakatan yang lain yang sifat kegiatannya ajeg, berulang-ulang dan bahkan pola yang sama berulang pada generasi berikutnya. (Sobirin, 2002).

Akibatnya budaya sering secara sederhana disebut sebagai tradisi yang berfungsi sebagai hukum (konvensi) bagi sekelompok masyarakat untuk bertindak, berperilaku dan berpandangan. Karena keberadaan masyarakat (yang menjadi fokus perhatian para anthropolog) mengalami perkembangan yang semakin kompleks, maka pengertian budaya ternyata juga mengalami perkembangan, tidak sekedar sebagai *way of life* seperti tersebut diatas. Dalam monograf yang ditulisnya – *Culture: A critical review of concepts and definitions*, Kroeber and Kluckhohn (1952) misalnya menunjukkan tidak kurang dari 164 definisi budaya (pp. 42-56), diantaranya:

- a. *Ruth Benedict: ..... that complex whole which include all habits acquired by man as a member of society* (keseluruhan kehidupan manusia yang kompleks yang meliputi semua kebiasaan manusia yang diperolehnya sebagai bagian dari keanggotaannya dalam masyarakat).
- b. *Malinowski: .....It (culture) obviously is the integral whole consisting of implements and consumers' goods, the constitutional charters for various*

- c. *social groupings, of human ideas and crafts, beliefs and customs* (kultur adalah keseluruhan kehidupan manusia yang integral yang terdiri dari berbagai peralatan dan barang-barang konsumen, berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat, ide-ide dan hasil karya manusia, keyakinan dan kebiasaan manusia).
- d. *Parsons: Culture ... consists in those patterns relative to behavior and the products of human action which may be inherited, that is, passed on from generation to generation independently of the biological genes* (kultur terdiri dari suatu pola yang terkait dengan perilaku dan hasil tindakan manusia yang berlaku turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terpisah dari masalah keturunan).

Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik. Menurut Geertz (1992:5) kebudayaan adalah 'pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, suatu sistem mengenai konsepsi - konsepsi yang diwariskan dalam bentuk - bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan'. Pendapat ini menekankan

bahwa kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang dapat mengembangkan sikap mereka terhadap kehidupan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses komunikasi dan belajar agar generasi yang diwariskan memiliki karakter yang tangguh dalam menjalankan kehidupan (Yunus, 2013).

## **2. Sejarah Pulau Bungin**

Masyarakat Bajo di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan masyarakat laut yang berasal dari Sulawesi Selatan, mereka bermigrasi sejak ratusan tahun yang lalu dan akhirnya menetap di kawasan pantai Pulau Sumbawa. Pada awalnya mereka tidak mendiami daratan seperti sekarang ini, melainkan hidup di laut sekitar pantai dengan sistem perumahan di atas air laut. Lambat laun sebagai akibat adanya pertumbuhan penduduk, mereka mulai mengusahakan daratan dengan cara menimbun air laut dengan batu maupun karang yang sudah mati. (Kun Marjanto & Syaifuddin, 2013).

Pulau Bungin mulai didiami pada tahun 1818. Orang yang pertama kali mendiami Pulau Bungin ini adalah Abdullah Mayung pria kharismatik asal Pulau Bajo. Dahulu pulau ini hanya memiliki luas 4x10 meter dan oleh Abdullah Mayung mendirikan Mushollah, namun lama kelamaan menjadi luas karena tradisi masyarakat Bungin yang terus menimbun laut dengan batu-batu karang untuk menjadi tempat tinggalnya. Setiap perjaka yang mau menikah, harus mengumpulkan batu untuk menimbun pulau dan lokasi yang dipilih untuk membangun pondasi rumahnya yaitu dimana lokasi yang paling dekat dengan rumah orang tua laki-laki ataupun rumah orang tua si perempuan, alasannya

karena masyarakat Desa Pulau Bungin yang bersuku Bajo ini sangat kental akan rasa kekerabatan dan kekeluargaan.

Dulu nama Bungin asal dari kata bubungin atau tumpukan pasir putih, namun karena lama kelamaan menjadi Bungin saja. Masyarakat Bungin dulunya menetap di Pulau Panjang, Pulau Bungin Kelat dan Pulau-pulau terluar lainnya di Alas. Namun karena banyaknya perampok (bajak laut) sehingga Abdullah Mayung dan keturunannya pindah ke Bungin. Disamping itu, di pulau-pulau tersebut airnya payau. Ada tiga dusun yaitu Dusun Sekatek, Dusun Tanjung dan Dusun Bungin.

Jika ingin membuat rumah di Pulau Bungin tidak perlu beli tanah. Tinggal pilih lokasi di laut, kemudian bikin gundukan lalu tandai dengan bendera. Selanjutnya uruk dengan batu karang dan bangun rumah di atasnya. Karang yang digunakan yaitu karang yang sudah mati, bukan tempat ikan hidup. Masyarakat Bungin mayoritas keturunan Suku Bajo, dari Sulawesi, yang dikenal sebagai suku pengembara laut dan penyelam ulung. Sejak bayi, anak-anak Bungin sudah dikenalkan pada dunia bahari melalui Upacara Toyah. Dalam ritual Toyah, bayi dipangku 7 perempuan secara bergantian yang duduk di atas ayunan. Ayunan diibaratkan seperti gelombang lautan yang akan dihadapi sang anak saat besar nanti ketika menjadi pelaut.

Biar dia terbiasa dengan ombak, dan selalu diberikan keselamatan jarang warga Bungin yang merantau, dan mereka kebanyakan memilih menikah dan tetap tinggal di Bungin. Kondisi ini yang membuat Pulau Bungin semakin kelebihan beban dan kehabisan lahan. Satu-satunya lahan terbuka yang luas di

Bungin adalah halaman Masjid setempat. Bahkan saking sesaknya, sama sekali tidak ada kebun dan sangat jarang pepohonan tumbuh. Karena tidak ada dedaunan untuk pakan, sampai-sampai kambing di Bungin punya kebiasaan makan kertas dan plastik.

### **3. Budaya *Nangung Rumah***

Rapoport (1969:47) mengungkapkan bahwa permukiman banyak ditentukan oleh nilai-nilai, budaya penghuninya, iklim dan kebutuhan akan pelindung, bahan bangunan, konstruksi dan teknologi, karakter tapak, ekonomi, pertahanan serta agama. Bentuk permukiman sangat ditentukan oleh keterjangkauan ekonomi dan pengaruh budaya, yang akan mempengaruhi pula bentuk fisik lingkungan permukiman (Sahambangun, Warouw, & O Waani, 2014).

Secara administratif, Pulau Bungin berada di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meskipun pulau ini relatif kecil, di sana tersedia dua dermaga, di selatan dan barat. Meskipun dijuluki pulau terpadat, penduduk Pulau Bungin tetap betah tinggal di sana. Mereka merasa hangat dan nyaman dan tak mau pindah ke pulau sebelah (daratan Sumbawa) yang masih kosong. Selain menyusuri tiap liku Pulau Bungin, Anda bisa melihat prosesi pembangunan rumah di sana. Tak seperti di tempat lain, untuk membangun rumah di sini, tidak memerlukan tanah sama sekali. Biasanya, pondasi yang dipakai adalah karang-karang mati. Semakin ke sini, Pulau Bungin semakin luas karena banyak rumah yang berdiri di luar pulau yang sebenarnya.

Menurut buku mengenal tradisi Masyarakat Desa Bungin (Tison, 2011:87) berkembangnya jumlah penduduk suku Bajo sebagai pendatang dari Sulawesi Selatan, menyebabkan lahan pulau semakin tidak mencukupi. Sebagai manusia laut, dibangunlah rumah-rumah panggung dengan cara menyusun batu karang terlebih dahulu di pinggir laut. Lama kelamaan dengan bertambahnya rumah baru, maka bertambah luas pulau pulaunya. Dengan keunikan meluasnya pulau seiring dengan pertambahan rumah penduduk, Bungin menjadi salah satu obyek wisata untuk kabupaten Sumbawa. Setiap Minggu pulau ini dikunjungi wisatawan mancanegara. Bertambahnya sebuah rumah baru, berarti lahan pulau itu bertambah luasnya sekitar satu are atau sesuai ukuran rumah mereka 9 kali 12 meter. Semua penduduk boleh membangun rumah tanpa ada batasan. Luasnya bukan dijatah. Tapi berdasarkan kemampuan masing-masing sebab, mereka harus mengumpulkan batu karang mati dari tengah laut. Berapa banyak batu karang yang harus dikumpulkan apabila luas lahannya 100 meter persegi dan ketinggian tumpukannya sekitar 2 meter. Untuk mendirikan rumah, warga setempat terlebih dahulu memberitahukan kepada tetangganya. Izin diberikan jika dianggap memenuhi syarat, misalnya telah berkeluarga. *Nangung Rumah* merupakan sebutan yang digunakan oleh masyarakat suku Bajo Desa Pulau Bungin untuk bentuk rumah panggung yang dibangun di atas air dan menggunakan pondasi batu karang mati. Nangung artinya bangun, sedangkan rumah yaitu tempat tinggal, jadi dapat disimpulkan bahwa *Nangung Rumah* yaitu membangun rumah secara bergotong royong. Namun, perlu pula diketahui apakah lokasi yang diinginkan belum menjadi milik orang lain. Apabila telah ditetapkan akan



didirikan rumah oleh seseorang, wilayah itu ditandai dengan tiang dan timbunan batu, cukup dengan menandai lokasinya, maka orang lain tidak bisa lagi mengambilnya. Pekerjaan mendirikan rumah panggung yang terbuat dari papan bertiang kayu ini dilakukan secara bergotong-royong, tradisi gotong-royong ini ditandai bunyi tawa-tawa (gong kecil dari kuningan) sebagai pertanda adanya orang yang "bekerja". Soal batasan waktu mendirikan rumah, tak ada ketentuannya, semua tergantung kemampuan masing-masing. Penduduk dapat mengkavling areal rumah sesuai dengan kemampuannya baik itu secara material maupun tenaga. Timbunan batu karang sebagai lahan rumahnya setinggi 2 meter dikumpulkan dari Pulau Kaung, untuk dasar rumah, mereka mengambil karang-karang laut yang telah mati. Ini dikaitkan dengan penyuluhan hukum yang pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tentang Perda Nomor 5 Tahun 1982 yang berkaitan dengan sanksi hukuman perusakan kelestarian alam karena pengambilan batu karang. Hanya disayangkan, rumah-rumah di pulau Bungin bisa dikatakan tidak ada yang memiliki MCK (mandi, cuci, kakus). Pada umumnya penduduk di pulau Bungin melakukan kegiatan MCK di laut. Hal tersebut dapat menyebabkan tercemarnya laut baik secara ekologis maupun kesehatan lingkungan masyarakat. Untuk mendapatkan air tawar, sejak 1990 Pulau Bungin memperoleh suplai air bersih melalui pipa bawah laut dari sungai Marente-Alas di daratan Sumbawa yang jauhnya 7 kilometer dari pulau Bungin. Sebelumnya, para penduduk mendapatkan air bersih di sumur tua Nange Sumur tua Nange ini dipercaya oleh penduduk Bungin sebagai sumur keramat. Kondisi lingkungan yang rapat dan tiadanya air bersih yang cukup untuk layak hidupnya

sehat ternyata tidak membuat pemukimnya berkehendak untuk berpindah dari pulau tersebut. (Hermansyah, Dwi Lestari, & Syafruddin, 2017).

#### **H. Tinjauan Kebijakan**

Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Perumahan dan kawasan permukiman: (1) Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat; (2) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; (3) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan; (4) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu; (5) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya; (6) Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya

masyarakat; (7) Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.; (8) Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman; (9) Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; dan (10) Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten sumbawa Tahun 2011 – 2031: (1) Pasal 21, Kawasan Peruntukan Pertanian, yaitu: pengembangan pengolahan ikan pada kawasan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) di Teluk Santong, Tanjung Pengamas, Labuhan Mapin, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Labuhan Jambu, Labuhan Buak, Prajak, Labuhan Terata, Labuhan Sengoro, Pidang, dan Lunyuk dengan luasan kurang lebih 11,50 Ha; (2) Pasal 25, Kawasan Peruntukan Pariwisata, yaitu: kawasan wisata budaya yang menjadi prioritas pengembangan dengan penataan desa-desa wisata seperti Desa Poto, Desa Pemulung, Desa Tepal, Pulau Bungin, sarkofagus di Desa Batu Tering dan daerah konservasi budaya yaitu Istana Dalam Loka, Bala Kuning, Wisma Praja, dan Makam Raja-Raja.

### ***I. Perencanaan Penataan Permukiman***

*Perencanaan Penataan Permukiman Suku Bajo Di Pulau Bungin  
(Penekanan Pada Aspek Lingkungan Berkelanjutan Di Wilayah Permukiman*

*Pesisir Sumbawa*) dengan arsitektur lokal daerah pesisir permukiman pulau Bungin sebagai pendekatan perancangan kawasan untuk merevitalisasi lingkungan permukiman pesisir yang berkelanjutan. Menjadikan pulau Bungin sebagai kawasan permukiman yang mewadahi setiap kegiatan rutinitas masyarakat pulau Bungin sebagai salah satu suku Pelaut di Indonesia.

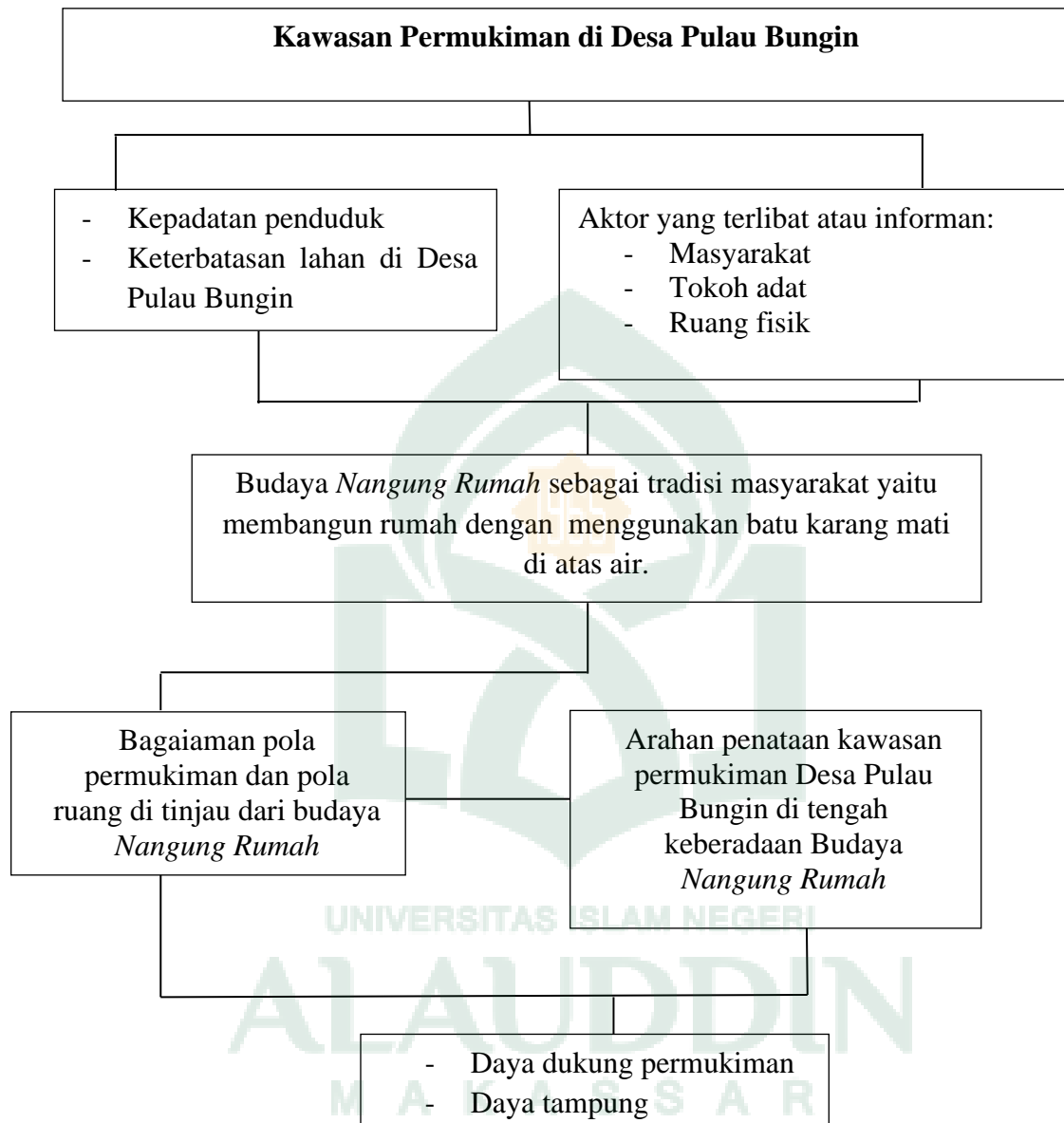
Perencanaan kawasan permukiman pesisir pulau Bungin menjadi adalah satu permukiman yang mampu memberikan nilai ekologis tinggi terhadap lingkungan pesisir tanpa mengurangi nilai aspek pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan ini digunakan sebagai alat ukur dalam perencanaan kawasan permukiman sehingga dapat memenuhi nilai permukiman pesisir yang sehat dan bersih pada umumnya.

Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan suatu permukiman nelayan suku Bajau/ Bajo dengan segala problem dan keunikannya. Pulau Bungin terletak di sebelah Selatan Pesisir Kecamatan Alas, permukiman pulau Bungin terbentuk dari adanya kemauan suku Bajo dalam memiliki satu permukiman tetap dari kehidupan nomaden di atas perahu/ *bido*. Orang Bajo dikenal mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya di pesisir selatan alas, ketergantungan dengan kehidupan laut merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pulau Bungin. Alam memberi mereka penghidupan untuk bisa bertahan hidup dan penyesuaian pada alam setempat ini juga yang memunculkan beberapa masalah. Dalam perkembangannya pulau Bungin menjadi kawasan permukiman nelayan yang padat akan penduduk, maka dari itu faktor penduduk yang berkualitas dapat memungkinkan untuk bisa

mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan pesisir pulau Bungin yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan perbaikan lingkungan permukiman pulau Bungin yang berkepadatan tinggi, hal tersebut mencakup seluruh komponen yang ada di permukiman mulai dari pola penataan massa bangunan, openspace, ruang terbuka hijau, fasilitas komunal, persampahan hingga revitalisasi terumbu karang yang mati dan mengalami pemutihan akibat penambangan lokal yang dijadikan dasar mendirikan hunian rumah. Hal tersebut merupakan tantangan dalam menciptakan rancangan konsep permukiman pesisir yang padat berbasis lingkungan berkelanjutan, dengan tidak meninggalkan ciri khas pola bermukim suku Bajo di pulau Bungin dan mempertahankan adat istiadat setempat tanpa merusak lingkungan sekitar permukiman untuk memperkuat karakter lingkungan masyarakat nelayan serta kebiasaan-kebiasaan pola kehidupan masyarakat pulau Bungin menjadi evaluasi yang berperan penting dalam kehidupan yang berkelanjutan.

### J. Kerangka Pikir



**Gambar 2** Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian, jenis penelitian ini bersifat fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif hadir sebagai respons terhadap keberadaan metode kuantitatif yang dianggap tidak mampu lagi menjawab berbagai persoalan kehidupan yang ada. Metode ini memposisikan manusia sebagai subjek penelitian bukan sebagai objek penelitian (metode kuantitatif) yang mendapat sedikit porsi di dalamnya. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Schutz, fenomenologi sebagai metode dirumuskan sebagai media untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya, yang lazim disebut arus kesadaran (Campbell, 1994: 233).

Fenomenologi berkembang, antara lain, dalam pemikiran Morleau-Ponty, Martin Heidegger, dll. Tetapi secara umum dari semua aliran fenomenologi, menurut Lubis (2004:202) memiliki keyakinan yang sama dalam hal, yaitu:

1. Keyakinan bahwa manusia dapat mengerti kenyataan sesungguhnya dari suatu fenomena.
2. Keyakinan bahwa ada hal yang menghalangi manusia untuk mencapai pengertian yang sebenarnya.

3. Keinginan menerobos kabut (penghalang) dengan melihat fenomena itu sendiri sebagaimana adanya.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada Desa Pulau Bungin yang terletak di Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB. Alasan mengambil lokasi sebagai objek penelitian yaitu karena Desa Pulau Bungin itu sendiri terkenal dengan budayanya yaitu Nangung Rumah dan sampai saat ini masih dipertahankan dan dikhawatirkan akan terjadi masalah yang terus meningkat setiap tahunnya.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan waktu kegiatan mulai dari penyusunan proposal, melakukan penelitian, melakukan survey lapangan, pengumpulan data hasil penelitiandi lokasi. Waktu penelitian di mulai dari bulan Februari sampai bulan September.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau yang pertama (observasi langsung). Data ini harus dicari melalui responden (wawancara), yaitu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai media untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan, selain itu data primer juga dapat diperoleh dari pengamatan/observasi langsung dilapangan.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah ada sehingga kita hanya perlu mencari dan mengumpulkan data tersebut. Data tersebut diperoleh atau dikumpulkan dengan mengunjungi tempat atau instansi terkait dengan penelitian. Data sekunder ini dapat berupa literature, dokumen, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- a. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa tentang luas wilayah, batas administrative dan pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.
- b. Gambaran Umum Kecamatan Alas tentang luas wilayah, batas administrative dan pembagian wilayah administrasi Kecamatan Alas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Alas.
- c. Gambaran Umum Desa Pulau Bungin yang meliputi tentang luas wilayah, penggunaan lahan, demografi, sarana prasarana, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Alas.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

#### **1. Pemetaan**

Istilah pemetaan seringkali digunakan pada ilmu matematika untuk menunjukkan proses pemindahan informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Proses tersebut serupa dengan yang dilakukan oleh kartografer, yaitu

memindahkan informasi dari permukaan bumi ke dalam kertas. Hasil dari pemindahan informasi tersebut dinamakan peta atau *map*.

## **2. Observasi Lapangan**

Observasi lapangan adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian (Nawawi, 2003). Penggalan informasi melalui teknik observasi lapangan dilakukan untuk mendukung kajian identifikasi penataan bangunan, identifikasi kondisi fisik bangunan, dan identifikasi kondisi sosial dan budaya.

## **3. Wawancara**

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula (Nawawi, 2003). Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat responden atau menggali kemungkinan jawaban tertentu mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang sifatnya terbuka (*open interview*). Pengambilan narasumber dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu narasumber kunci ini diupayakan memperoleh rekomendasi-rekomendasi narasumber lainnya yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam studi. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai sejarah masyarakat, dan penataan bangunan. Teknik wawancara dilakukan berupa wawancara terstruktur berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Teknik wawancara dilakukan kepada Kepala Suku dan tokoh masyarakat setempat yang

merupakan narasumber yang lebih mengetahui tentang bagaimana budaya nanggung rumah dan proses pembuatan pondasi rumah.

#### **E. Variabel Penelitian**

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variable dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variable penelitian yang digunakan. Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 4** Variabel Penelitian

No	Variable	Indikator
1	Fungsi dan pemanfaatan ruang	a. Darat b. Laut
2	Daya dukung	a. Sumber daya alam - Material b. Sarana dan Prasarana - Aksesibilitas - Permukiman - lingkungan
3	Tampung ruang	- Kepadatan penduduk - Luas wilayah - Jumlah rumah
4	Budaya/tradisi	- Kepercayaan - Perilaku masyarakat - Norma-norma

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

#### **F. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah Proyeksi penduduk, Daya dukung dan daya tampung ruang.

## 1. Proyeksi Penduduk

Metode proyeksi yang digunakan yaitu metode Eksponensial, yaitu:

$$r = \frac{1}{t} \ln \left( \frac{P_t}{P_o} \right) \quad (\dots ii)$$

Keterangan :

$P_t$  = Jumlah penduduk paada tahun ke-t  
 $P_o$  = Jumlah penduduk pada tahun dasar  
 $t$  = Jangka waktu  
 $r$  = Laju pertumbuhan penduduk  
 $e$  = Bilangan eksponensial yang besarnya 2,718281828

Jika niali  $r > 0$ , artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika  $r < 0$ , artinya pertumbuhan penduduk negative atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

## 2. Daya Dukung Wilayah Untuk Permukiman (DDPm)

Daya dukung wilayah untuk pemukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Dalam menyusun formulasi daya dukung wilayah untuk permukiman, selain diperlukan besaran luas lahan yang cocok dan layak untuk permukiman tetapi juga dibutuhkan standar atau kriteria kebutuhan lahan tiap penduduk.

$$DDPm = \frac{LPm/JP}{\alpha} \quad (\dots iii)$$

Keterangan:

$DDPm$  = Daya DukungPermukiman  
 $JP$  = Jumlah Penduduk  
 $\alpha$  = Koifisien Luas kebutuhan ruang / kapita ( $m^2$ /kapita)

Menggunakan batasan kelas kemampuan lahan, dimana dapat diasumsikan kemampuan lahan I sampai IV dan layak digunakan untuk permukiman. Kisaran nilai indeks daya dukung permukiman :

- Apabila  $DDP_m$ , artinya bahwa daya dukung permukiman tinggi, masih mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah) dalam wilayah tersebut.
- Apabila  $DDP=1$ , bermakna bahwa daya dukung permukiman optimal, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim (membangun rumah) dengan luas wilayah yang ada.
- Apabila  $DDP < 1$ , berarti daya dukung permukiman rendah, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (bangun rumah) dalam wilayah tersebut.

### 3. Analisis Daya Tampung

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2017 tentang pedoman teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi serta social budaya dalam penyusunan rencana Tata Ruang, analisis kemampuan lahan berdasarkan pedoman ini menggunakan sistem overlay multikriteria dari 9 SKL, kesembilan SKL tersebut yaitu :

- a. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi, tujuan analisis SKL Morfologi adalah memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Dalam analisis SKL Morfologi melibatkan data masukan berupa peta morfologi dan peta kelerengan dengan keluaran peta SKL

- b. Morfologi dengan penjelasannya. Hasil analisis SKL Morfologi dapat dilihat dalam Tabel 5.

**Tabel 5** Pembobotan SKL Morfologi

<b>Peta Morfologi</b>	<b>Peta Kelereng</b>	<b>SKL Morfologi</b>	<b>Nilai</b>
Bergunung	> 40 %	Kemampuan lahan dari morfologi rendah	1
Berbukit, bergelombang	15 – 40 %	Kemampuan lahan dari morfologi kurang	2
Berombak	8 – 15 %	Kemampuan lahan dari morfologi sedang	3
Landai	3 – 8 %	Kemampuan lahan dari morfologi cukup	4
Datar	0 – 3 %	Kemampuan lahan dari morfologi tinggi	5

Sumber: *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang*

- c. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan dikerjakan, tujuan analisis SKL Kemudahan Dikerjakan adalah untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/ pengembangan kawasan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta topografi, peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan eksisting, dengan keluaran peta SKL Kemudahan dikerjakan dan penjelasannya.

**Tabel 6** Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan

<b>Peta Morfologi</b>	<b>Peta Kelerengn</b>	<b>Peta Ketinggian</b>	<b>Peta Jenis Tanah</b>	<b>Peta Penggunaan Lahan Eksisting</b>	<b>SKL Kemudahan Dikerjakan</b>	<b>Nilai</b>
Bergunung	> 40 %	>3000 m	Mediteran	Hutan	Kemudahan dikerjakan rendah	1
Berbukit, bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Latosol	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	Kemudahan dikerjakan kurang	2
Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Andosol	Semak belukar	Kemudahan dikerjakan sedang	3
Landai	3 – 8%	500 – 1000 m	Regosol	Tegalan, Tanah kosong	Kemudahan dikerjakan cukup	4
Datar	0 – 3 %	0 – 500 m	Alluvial	Permukiman	Kemudahan dikerjakan tinggi	5

Sumber: *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang*

d. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng, tujuan analisis SKL

Kestabilan Lereng adalah untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta topografi, peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta curah hujan, peta bencana alam (rawan bencana gunung berapi dan kerentanan gerakan tanah) dan peta penggunaan lahan, dengan keluaran peta SKL Kestabilan Lereng.

**Tabel 7** Pembobotan SKL Kestabilan Lereng

Peta Morfologi	Peta Kelereng	Peta Ketinggian	Peta Jenis Tanah	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	Peta Curah Hujan	Peta Kerentan an Gerakan Tanah	SKL Kestabilan Lereng	Nilai
Bergunung	> 40 %	>3000 m	Andosol	Tegalan, Tanah kosong	> 3000 mm/tahun	sangat rawan	Kestabilan lereng rendah	1
Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Regosol, Alluvial	Semak belukar	1500 – 3000 mm/tahun	Rawan	Kestabilan lereng kurang	2
Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Mediteran	Hutan	1000 – 1500 mm/tahun	agak rawan	Kestabilan lereng sedang	3
Landai	3 – 8 %	500 – 1000 m		Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	< 1000 mm/tahun	Aman	Kestabilan lereng tinggi	4
Datar	0 – 3 %	0 – 500 m	Latosol	Permukiman		Aman		5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

e. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi, tujuan analisis SKL

Kestabilan Pondasi adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta SKL kestabilan lereng, peta jenis tanah, peta kedalaman efektif tanah, peta tekstur tanah, peta hidrogeologi dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Kestabilan Pondasi dan penjelasan.



**Tabel 8** Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi

<b>SKL Kestabilan Lereng</b>	<b>Peta Jenis Tanah</b>	<b>Peta Tekstur Tanah</b>	<b>Peta Penggunaan Lahan Eksisting</b>	<b>SKL Kestabilan Pondasi</b>	<b>Nilai</b>
Kestabilan lereng rendah	Alluvial	Kasar (Pasir)	Tegalan, Tanah kosong	Daya dukung dan kestabilan pondasi rendah	1
Kestabilan lereng kurang	Andosol, Regosol		Semak belukar	Daya dukung dan kestabilan pondasi kurang	2
Kestabilan lereng sedang	Mediteran	Sedang (lempung)	Hutan	Daya dukung dan kestabilan pondasi kurang	3
Kestabilan lereng tinggi	Latosol	Halus (liat)	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	Daya dukung dan kestabilan pondasi tinggi	4
			Permukiman		5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

e. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air, tujuan analisis SKL

Ketersediaan Air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kelerengan, peta curah hujan, peta hidrogeologi, peta jenis tanah dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Ketersediaan Air dan penjelasannya. Sebelum melakukan analisis SKL Ketersediaan Air.

**Tabel 9** Pembobotan SKL Ketersediaan Air

<b>Peta Morfologi</b>	<b>Peta Kelereangan</b>	<b>Peta Ketinggian</b>	<b>Peta Jenis Tanah</b>	<b>Peta Penggunaan Lahan Eksisting</b>	<b>Peta Curah Hujan</b>	<b>SKL Ketersediaan Air</b>	<b>Nilai</b>
Bergunung	> 40 %	>3000 m	Latosol	Tegalan, Tanah kosong		Ketersediaan air sangat rendah	1
Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Alluvial	Semak belukar	< 1000 mm/tahun	Ketersediaan air rendah	2
Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Mediteran, Regosol	Hutan	1000–1500 mm/tahun	Ketersediaan air sedang	3
Landai	3 – 8 %	500 – 1000 m		Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	1500 –3000 mm/tahun	Ketersediaan air tinggi	4
Datar	0 – 3 %	0 – 500 m	Andosol	Permukiman	> 3000 mm/tahun		5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

- f. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Untuk Drainase, tujuan analisis SKL untuk Drainase adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta topografi, peta jenis tanah, peta curah hujan, peta kedalaman efektif tanah, dan penggunaan

g. lahan eksisting dengan keluaran peta SKL untuk Drainase dan penjelasannya.

**Tabel 10** Pembobotan Analisis SKL Untuk Drainase

Peta Morfologi	Peta Kelerengan	Peta Ketinggian	Peta Jenis Tanah	Peta Curah Hujan	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	SKL Drainase	Nilai
Bergunung	> 40 %	>3000 m	Andosol		Permukiman	Drainase tinggi	5
Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Alluvial, Regosol	< 1000 mm/tahun	Tegalan, Tanah kosong		4
Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Mediteran	1000 – 1500 mm/tahun	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	Drainase cukup	3
Landai	3 – 8 %	500 – 1000 m		1500 – 3000 mm/tahun	Hutan	Drainase kurang	2
Datar	0 – 3 %	0 – 500 m	Latosol	> 3000 mm/tahun	Semak belukar		1

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

h. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi, tujuan analisis SKL

Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antispasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta tekstur tanah, peta curah hujan dan peta

penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL terhadap erosi dan penjelasannya.

**Tabel 11** Pembobotan SKL Terhadap Erosi

Peta Morfologi	Peta Kelerengan	Peta Jenis Tanah	Peta Tekstur Tanah	Peta Curah Hujan	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	SKL Erosi	Nilai
Bergunung	> 40 %	Regosol	Kasar (Pasir)	> 3000 mm/tahun	Semak belukar	Erosi tinggi	1
Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	Andosol		1500-3000 mm/tahun	Tegalan, Tanah kosong	Erosi cukup tinggi	2
Berombak	8 – 15 %	Mediteran	Sedang (lempung)	1000 - 1500 mm/tahun	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	Erosi sedang	3
Landai	2 – 8 %	Latosol	Halus (liat)	< 1000 mm/tahun	Permukiman	Erosi sangat rendah	4
Datar	0 – 2 %	Alluvial			Hutan	Tidak ada erosi	5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

i. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah, tujuan analisis SKL

Pembuangan Limbah adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, pola hubungan dan tingkat peta kemiringan, peta topografi, peta jenis

tanah, peta hidrogeologi, peta curah hujan dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Pembuangan Limbah dan penjelasannya.

**Tabel 12** Pembobotan SKL Pembuangan Limbah

Peta Morfologi	Peta Kelereangan	Peta Ketinggian	Peta Jenis Tanah	Peta Curah Hujan	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	SKL Pembuangan Limbah	Nilai
Bergunung	> 40 %	>3000 m	Regosol	> 3000 mm/tahun	Hutan	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah kurang	1
Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Andosol	1500 – 3000 mm/tahun	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim		2
Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Mediteran	1000 – 1500 mm/tahun	Permukiman	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah sedang	3
Landai	2 – 8 %	500 – 1000 m	Latosol	< 1000 mm/tahun	Semak belukar	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah cukup	4
Datar	0 – 2 %	0 – 500 m	Alluvial		Tegalan, tanah kosong		5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

- j. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam, tujuan analisis SKL terhadap Bencana Alam adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dari korban akibat bencana tersebut. Dalam

k. analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta topografi, peta jenis tanah, peta tekstur tanah, peta curah hujan, peta bencana alam (rawan gunung berapi dan kerentanan gerakan tanah) dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Terhadap Bencana Alam.

Analisis ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Data-data yang dibutuhkan meliputi peta-peta hasil analisis SKL. Keluaran dari analisis ini meliputi:

1. Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan
2. Kelas kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan
3. Potensi dan kendala fisik pengembangan lahan

Langkah pelaksanaan:

1. Analisis satuan-satuan kemampuan lahan, untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan pada masing-masing satuan kemampuan lahan.
2. Menentukan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing-masing satuan kemampuan lahan, dengan penilaian 5 (lima) untuk nilai tertinggi dan 1 (satu) untuk nilai terendah.
3. Mengalikan nilai-nilai tersebut dengan bobot dari masing-masing satuan kemampuan lahan. Bobot ini didasarkan pada seberapa jauh pengaruh satuan kemampuan lahan tersebut pada pengembangan perkotaan. Bobot yang digunakan sesuai dengan tabel.

4. Melakukan superimpose semua satuan-satuan kemampuan lahan, dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh satuan-satuan kemampuan lahan dalam satu peta, sehingga diperoleh kisaran nilai yang menunjukkan nilai kemampuan lahan di wilayah perencanaan.
5. Menentukan selang nilai yang akan digunakan sebagai pembagi kelas-kelas kemampuan lahan, sehingga diperoleh zona-zona kemampuan lahan dengan nilai tertentu yang menunjukkan tingkatan kemampuan lahan di wilayah perencanaan dan digambarkan dalam satu peta klasifikasi kemampuan lahan untuk perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pembuatan peta nilai kemampuan lahan merupakan penjumlahan nilai dikalikan bobot, yaitu:

1. Melakukan superimpose setiap satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh hasil pengalihan nilai dengan bobotnya secara satu per satu, sehingga kemudian diperoleh peta jumlah nilai dikalikan bobot seluruh satuan secara kumulatif.
2. Membagi peta masing-masing satuan kemampuan lahan dalam sistem grid, kemudian memasukkan nilai dikalikan bobot masing-masing satuan kemampuan lahan ke dalam grid tersebut. Penjumlahan nilai dikalikan bobot secara keseluruhan adalah tetap dengan menggunakan grid, yakni menjumlahkan hasil nilai dikalikan bobot seluruh satuan kemampuan lahan pada setiap grid yang sama.

**Tabel 13** Pembobotan SKL

<b>Bobot x Nilai</b>	<b>SKL Morfologi</b>	<b>SKL kemudahan dikerjakan</b>	<b>SKL Kestabilan Lereng</b>	<b>SKL Kestabilan Pondasi</b>	<b>SKL Ketersediaan Air</b>
	<b>bobot:</b>	<b>bobot: 1</b>	<b>bobot: 5</b>	<b>bobot: 3</b>	<b>bobot: 5</b>

*Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang*

**Lanjutan Tabel 13** Pembobotan SKL

<b>Bobot x Nilai</b>	<b>SKL Untuk Drainase</b>	<b>SKL Terhadap Erosi</b>	<b>SKL Pembuangan Limbah</b>	<b>SKL Bencana Alam</b>	<b>SKL Kemampuan Lahan</b>
	<b>bobot: 5</b>	<b>bobot: 3</b>	<b>bobot: 0</b>	<b>bobot: 5</b>	<b>Nilai Total</b>

*Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang*



Dari total nilai dibuat beberapa kelas yang memperhatikan nilai minimum dan maksimum total nilai. Dengan demikian, pengkelasan dari total nilai ini adalah:

1. Kelas a dengan nilai 32 – 58
2. Kelas b dengan nilai 59 – 83
3. Kelas c dengan nilai 84 – 109
4. Kelas d dengan nilai 110 – 134
5. Kelas e dengan nilai 135 – 160

Daya tampung lingkungan berkaitan erat dengan kapasitas lingkungan dalam menampung aktivitas yang memanfaatkan sumberdaya alam pada suatu ekosistem tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka daya tampung ruang dapat pula didefinisikan sebagai kapasitas komponen penyedia ruang, misalnya fisik alam dan fisik binaan, dalam menampung komponen pengguna ruang yang meliputi penduduk dengan aktivitasnya.

Aspek fisik alam yang merupakan faktor pembatas bagi perkembangan ruang perkotaan tersebut adalah ketersediaan lahan dan sumberdaya alam. Hal ini disebabkan keadaan kedua sumberdaya tersebut bersifat tetap, artinya tidak dapat dipindahkan. Selain itu, secara alamiah kuantitasnya tetap namun keadaan dan sifat kualitasnya akan berbeda dari waktu ke waktu, sehingga dapat membatasi pemakaian dan manfaat yang diberikan. Oleh karena itu, ketersediaan lahan dan sumberdaya alam ini akan menentukan sebaran dan besaran luas daya tampung ruang untuk pemanfaatan ruang pada perkotaan tersebut.

### ***G. Definisi Operasional***

Dalam definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.

#### **1. Fungsi dan Pemanfaatan Ruang**

##### **a. Darat**

- 1) Apabila bentuk permukiman tumbuh condong ke darat dan tidak bertumbuh kearah laut (Nilai bobot 5)
- 2) Apabila bentuk permukiman tumbuh condong kedarat tapi tumbuh kerah laut (Nilai bobot 3)
- 3) Apabila bentuk permukiman menyebar diatas permukaan laut (Nilai bobot 1)

##### **b. Laut**

- 1) Apabila laut tidak tercemar dan ekosistem laut tetap terjaga (Nnilai bobot 5)
- 2) Apabila laut tidak tercemar tapi ekosistem laut seperti terumbu karang rusak (Nilai bobot 3)
- 3) Apabila laut tercemar akibat aktivitas penduduk dan ekosistem laut rusak (Nilai bobot 1)

#### **2. Daya Dukung**

##### **a. Sumber Daya Alam (marterial)**

- 1) Apabila material yang digunakan untuk membangun pondasi yaitu batu karang mati atau batu sungai (Nilai bobot 5)

- 2) Apabila material yang digunakan batu karang mati dan merusak ekosistem laut yang akan ditimbuni (Nilai bobot 3)
  - 3) Apabila material yang digunakan batu karang yang masih hidup (Nilai bobot 1)
- b. Sarana dan Prasarana (aksesibilitas)
- 1) Apabila sarana transportasi, dan akses jalan masuk ke desa tersebut sangat mendukung. (Nilai Bobot 5)
  - 2) Apabila tersedia sarana transportasi dan akses jalan masuk ke desa tersebut kurang mendukung. (Nilai Bobot 3)
  - 3) Apabila tidak tersedia sarana transportasi dan akses jalan masuk ke desa tersebut. (Nilai Bobot 1)
- c. Sarana dan prasarana (permukiman)
- 1) Apabila sarana dan prasarana seperti masjid, pendidikan, perkantoran dan kesehatan dekat dengan permukiman penduduk dan memenuhi SNI (Nilai bobot 5)
  - 2) Apabila sarana dan prasarana seperti masjid, pendidikan, perkantoran, dan pendidikan agak jauh untuk dijangkau oleh penduduk (Nilai bobot 3)
  - 3) Apabila sarana dan prasarana tidak lengkap (Nilai bobot 1)
- d. Sarana dan Prasarana (lingkungan)
- 1) Apabila lingkungan sehat (nilai bobot 5)
  - 2) Apabila lingkungan kurang sehat (Nilai bobot 3)
  - 3) Apabila lingkungan tidak sehat (Nilai bobot 1)

### 3. Tampung Ruang

#### a. Kepadatan penduduk

- 1) Apabila jumlah penduduk sesuai dengan luas wilayah (Nilai bobot 5)
- 2) Apabila jumlah penduduk besar daripada jumlah luas wilayah (Nilai bobot 3)
- 3) Apabila jumlah penduduk banyak dan jumlah luas wilayah kecil (Nilai bobot 1)

#### b. Luas wilayah

- 1) Apabila jumlah luas wilayah Desa Pulau bugin tetap dan jika jumlah penduduk bertambah tanpa menambah jumlah luas pulau (Nilai bobot 5)
- 2) Apabila jumlah luas wilayah Desa Pulau Bugin tetap tapi jumlah penduduk bertambah (Nilai bobot 3)
- 3) Apabila jumlah luas wilayah Desa Pulau Bnugin bertambah dan jumlah penduduk bertambah (Nilai bobot 1)

#### c. Jumlah rumah

- 1) Apabila setiap rumah terdiri dari 5 orang atau 1 KK dan membuang sampah rumah tangga dilaut (Nilai bobot 5)
- 2) Apabila setiap rumah terdiri dari 5 orang atau 1 KK tapi tidak membuang sampah rumah tangga di laut (Nilai bobot 3)
- 3) Apabila tiap rumah lebih dari 1 KK dan sampah rumah tangga di buang langsung ke laut (Nilai bobot 1)

#### 4. Budaya/Tradisi

##### a. Kepercayaan

- 1) Apabila masyarakat Desa Pulau Bungin harus bermukim diatas air laut (Nilai bobot 5)
- 2) Apabila masyarakat Desa Pulau Bungin tidak diwajibkan tinggal diatas air laut (Nilai bobot 3)
- 3) Apabila masyarakat Desa Pulau Bungin membangun rumah didarat (Nilai bobot 1)

##### b. Perilaku masyarakat

- 1) Apabila kebiasaan masyarakat Desa Pulau Bungin sangat kental akan jiwa gotong royong dan masih menjaga kekerabatan dalam dalam suatu kawasan permukiman. (Nilai bobot 5)
- 2) Apabila kebiasaan masyarakat Desa Pulau Bungin kurang kental akan jiwa gotong royong dan masih menjaga kekerabatan dalam dalam suatu kawasan permukiman. (Nilai bobot 3)
- 3) Apabila kebiasaan masyarakat Desa Pulau Bungin tidak ada jiwa gotong royong dan sudah tidak menjaga kekerabatan dalam dalam suatu kawasan permukiman. (Nilai bobot 1)

##### c. Norma-norma

- 1) Apabila aturan jika perempuan asli Desa Pulau Bungin menikah dengan orang luar dari Desa Pulau Bungin dan wajib tinggal di Desa tersebut (Nilai bobot 5)

- 2) Apabila aturan jika laki-laki Desa Pulau Bungin menikah dengan perempuan luar dari Desa Pulau Bungin dan tidak wajib tinggal di Desa tersebut (Nilai bobot 3)
- 3) Apabila masyarakat Desa Pulau Bungin menikah tidak wajib untuk menetap di Desa Pulau Bungin (Nilai bobot 1)



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di ujung Barat Pulau Sumbawa. Secara astronomis, Kabupaten Sumbawa terletak di antara posisi 16°42' - 118°22' Bujur Timur dan 8°8' – 9°7' Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Sumbawa berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Timur : Kabupaten Dompu
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa Barat
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa dengan luas mencapai 6.643 Km<sup>2</sup> setara dengan 32,97 persen luas Provinsi NTB. Kabupaten Sumbawa terbagi dalam 24 Kecamatan dan 157 Desa, 8 Kelurahan dan 636 Dusun, dari 24 Kecamatan yang ada Kecamatan Moyohulu merupakan kecamatan yang memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak sebanyak 12 Desa.

**Tabel 14** Luas Wilayah Dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase(%)
1	Lunyuk	513,74	7,73
2	Orong Telu	465,97	7,01
3	Alas	123,04	1,85

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase(%)
4	Alas Barat	168,88	2,54
5	Buer	137,01	2,06
6	Utan	155,42	2,34
7	Rhee	230,82	3,47
8	Batulanteh	391,40	5,89
9	Sumbawa	44,83	0,67
10	Labuhan Badas	435,89	6,56
11	Unter Iwes	82,38	1,24
12	Moyohilir	186,79	2,81
13	Moyo Utara	90,80	1,37
14	Moyohulu	311,96	4,70
15	Ropang	444,48	6,69
16	Lenangguar	504,32	7,59
17	Lantung	167,45	2,52
18	Lape	204,43	3,08
19	Lopok	155,59	2,34
20	Plampang	418,69	6,30
21	Labangka	243,08	3,66
22	Maronge	274,75	4,14
23	Empang	558,55	8,41
24	Tarano	333,71	5,02
<b>Total</b>		<b>6.643,98</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2019

Berdasarkan Tabel 14 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Sumbawa memiliki luas 6.643,98 Km<sup>2</sup>, dengan Kecamatan terluas adalah di Kecamatan Empang dengan luas 558,55 Km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan dengan luasan terkecil adalah di Kecamatan Sumbawa dengan luas 44,83 km<sup>2</sup>. Secara kependudukan Kabupaten Sumbawa merupakan daerah dengan laju pertumbuhan yang cukup pesat yaitu 453.797 Jiwa. Untuk selengkapnya dapat di lihat di Tabel 15 berikut ini:



**Tabel 15** Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

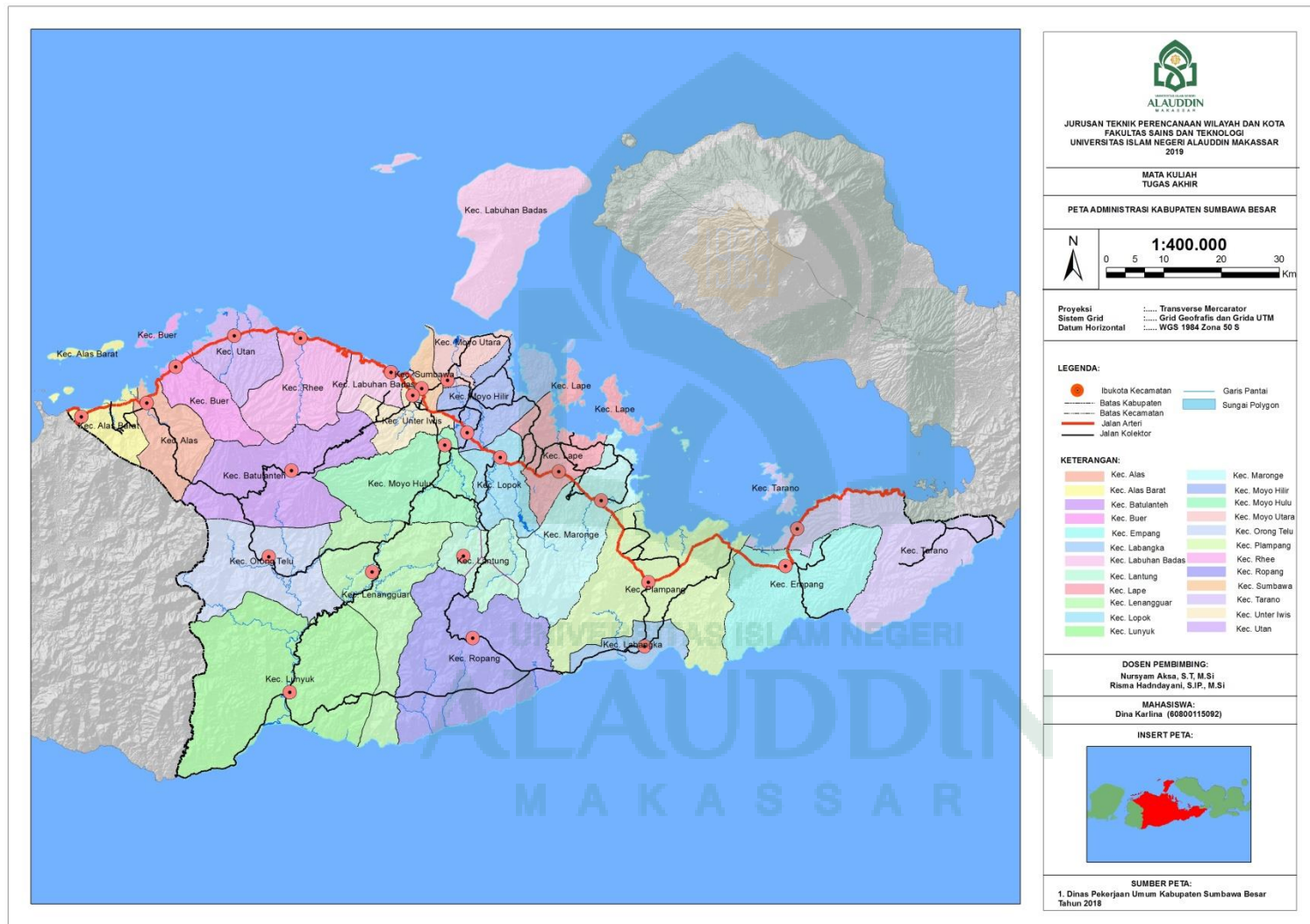
No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	KepadatanPenduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Lunyuk	20.999	41
2	Orong Telu	4.816	10
3	Alas	29.405	239
4	Alas Barat	19.884	118
5	Buer	14.221	104
6	Utan	30.339	195
7	Rhee	7.351	32
8	Batulanteh	10.427	27
9	Sumbawa	42.156	1.386
10	Labuhan Badas	34.647	79
11	Unter Iwes	19.910	242
12	Moyo Hilir	24.253	130
13	Moyo Utara	9.794	108
14	Moyo Hulu	20.921	67
15	Ropang	5.152	12
16	Lenangguar	6.456	13
17	Lantung	2.868	17
18	Lape	17.583	86
19	Lopok	19.063	123
20	Plampang	32.619	78
21	Labangka	10.928	45
22	Maronge	10.446	38
23	Empang	22.763	41
24	Tarano	16.796	50
<b>Total</b>		<b>453.797</b>	<b>68</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel 15 bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Sumbawa sebanyak 42.156 Jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Lantung sebanyak 2.878 Jiwa dan untuk kepadatan penduduk secara keseluruhan Kabupaten Sumbawa adalah 453.797 Jiwa/Km<sup>2</sup> dengan kepadatan terpadat ada di Kecamatan Sumbawa sebanyak 1.386

Jiwa/Km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah ada di Kecamatan Orong Telu sebanyak 10 Jiwa/Km<sup>2</sup>.





## **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Alas**

### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Alas terletak di ujung barat wilayah kabupaten sumbawa. Terdiri dari 8 Desa dengan ketinggian rata-rata 6,50 meter dari permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Alas antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batulanteh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buer
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat

Di wilayah Kecamatan Alas terdapat gunung sebra dan dua ruas sungai yaitu Sungai/Brang Ode dan Brang Rea. Letak Geografis kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah pegunungan dan hutan tropis sangat mempengaruhi debit dan curah hujan. Debit dan curah hujan sepanjang Tahun 2017 sangat mempengaruhi keadaan ekosistem dalam wilayah Kecamatan Alas, baik flora maupun fauna. Tahun 2017 jumlah hari hujan di Kecamatan Alas mencapai 103 hari hujan dengan curah hujan sebesar 1.210 mm.

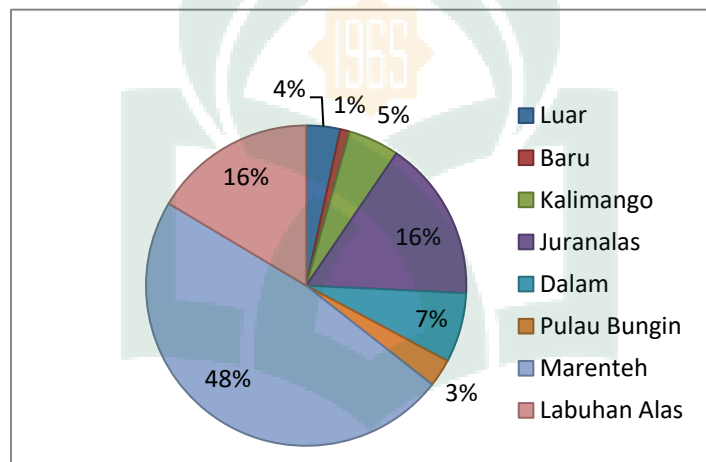
**Tabel 16** Luas Desa di Kecamatan Alas di rinci per Desa Tahun 2017

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Luas Wilayah Km<sup>2</sup></b>	<b>Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)</b>
1	Luar	1.84	3.43
2	Baru	0.51	0.95
3	Kalimango	2.76	5.15
4	Juranalas	8.70	16.22
5	Dalam	3.78	7.05
6	Pulau Bungin	1.50	2.80
7	Marenteh	25.74	47.99

No	Desa	Luas Wilayah Km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
8	Labuhan Alas	8.81	16.42
	<b>Alas</b>	<b>53.64</b>	<b>100.00</b>

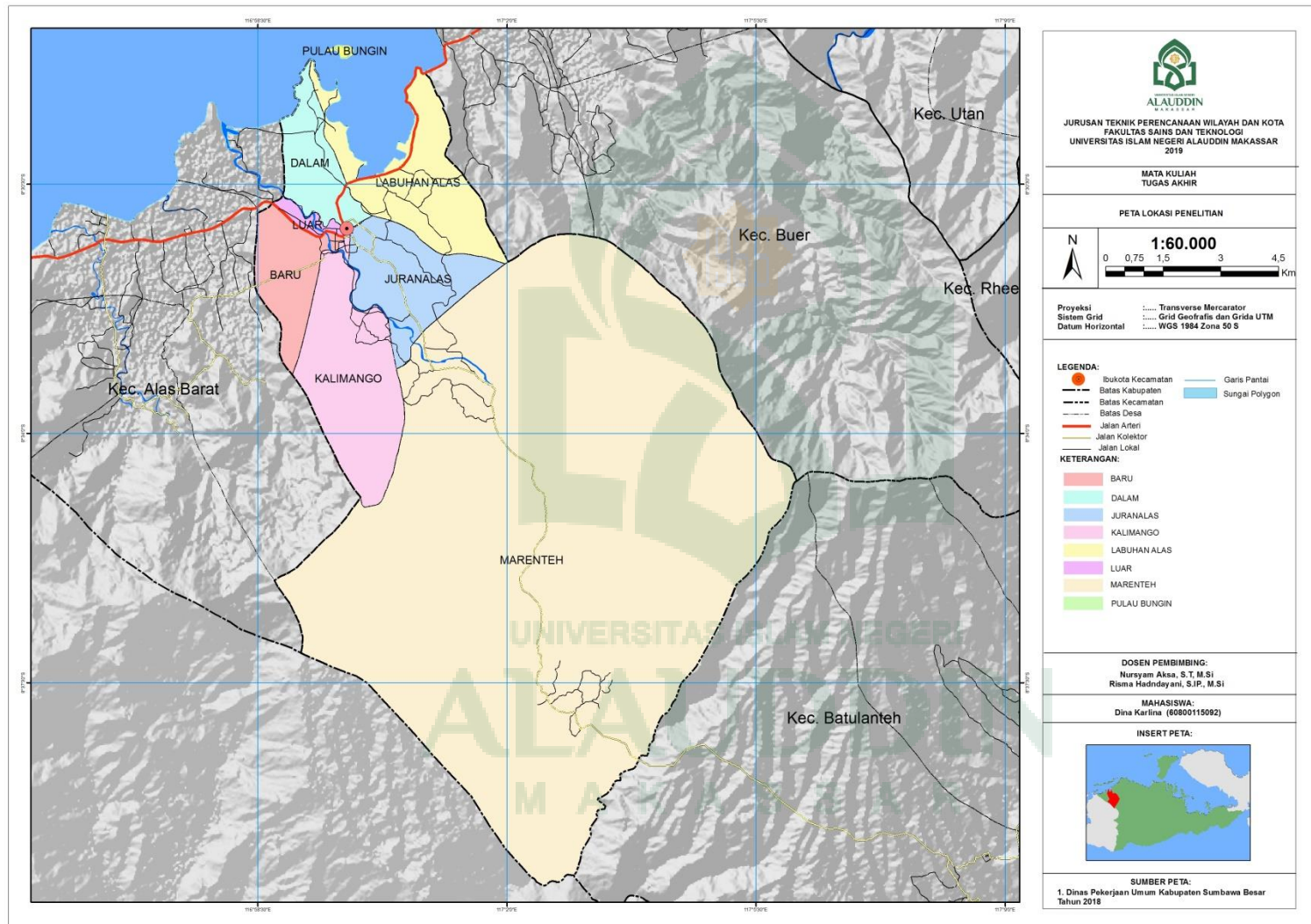
Sumber : Dinas Pertanian Kecamatan Alas

Berdasarkan Tabel 16 dapat dijelaskan secara keseluruhan Kecamatan Alas memiliki luas 53.64 Km<sup>2</sup>, dengan Desa terluas adalah di Desa Marenteh dengan luas 25.74 Km<sup>2</sup> sedangkan Desa dengan luasan terkecil adalah di Desa Baru dengan luas 0.51 Km<sup>2</sup>. Secara kependudukan Kecamatan Alas.



**Gambar 4** Luas Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017  
(Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019)

Berdasarkan Gambar 4 dapat dijelaskan secara keseluruhan Kecamatan Alas memiliki persentase 100%, dengan persentase paling banyak adalah di Desa Marenteh dengan persentase 48% sedangkan Desa dengan persentase paling kecil adalah di Desa Baru dengan persentase 1%.



## 2. Aspek Demografi

Kecamatan Alas yang memiliki luas 53,64 Km<sup>2</sup>, dengan tingkat kepadatan 548 Jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan Alas sampai Tahun 2018 sebanyak 29.405 Jiwa yang terdiri dari 14.863 penduduk laki-laki dan 14.542 penduduk perempuan. Sex ratio Kecamatan Alas di Tahun 2018 masih tertahan di angka 102. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan relatif tidak memiliki selisih yang signifikan. Kepadatan penduduk di kecamatan Alas Tahun 2018 berkisar antara 100 sampai 5.873 Jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi di Desa Baru dan kepadatan terendah di Desa Marente. Sementara itu Desa Pulau Bungin sebagai pulau terpadat di dunia menempati urutan ketiga sebagai desa terpadat di Kecamatan Alas. Rumah tangga di Kecamatan Alas pada Tahun 2018 sebanyak 7.727 dengan rata-rata anggota per rumah tangga sebanyak 4 orang. Sampai Tahun 2018 mayoritas rumah tangga mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan terbesar. Adapun sebarannya secara berurutan adalah sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perdagangan, usaha industri kerajinan rumah tangga, sebagai karyawan, pengangkutan, kehutanan dan usaha lainnya.

**Tabel 17** Kepadatan Penduduk di Kecamatan Alas dirinci perdesa Tahun 2017

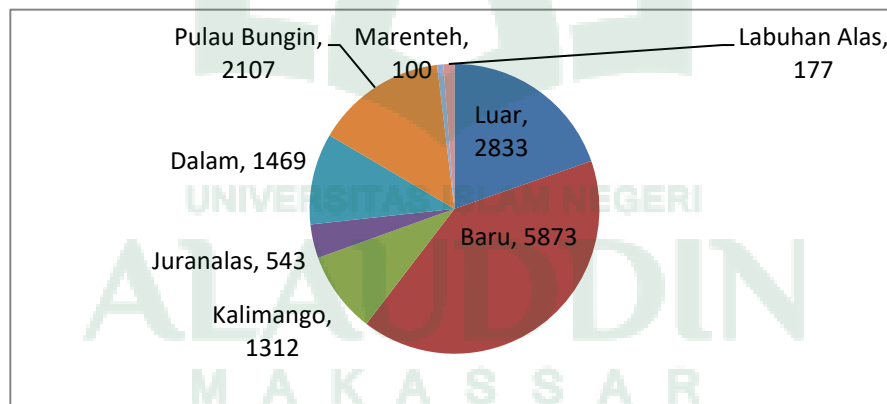
No	Desa	Luas Desa (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Luar	1.84	5212	2833
2	Baru	0.51	2995	5873
3	Kalimango	2.76	3632	1312
4	Juranalas	8.70	4722	543
5	Dalam	3.78	5551	1469



No	Desa	Luas Desa (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )
6	Pulau Bungin	1.50	3161	2107
7	Marenteh	25.74	2579	100
8	Labuhan Alas	8.81	1563	177
	<b>Alas</b>	<b>53.64</b>	<b>29405</b>	<b>548</b>

Sumber: Kecamatan Alas Dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel 17 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Alas yaitu 29405 Jiwa dengan luas wilayah 53.64 km<sup>2</sup> dan memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah 548 Jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Dalam sebanyak 5551 Jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa Labuhan Alas sebanyak 1563 Jiwa dan untuk kepadatan terpadat ada di Desa Baru sebanyak 5873 Jiwa/Km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah ada di Desa Marenteh sebanyak 100 Jiwa/Km<sup>2</sup>.



**Gambar 6** Kepadatan Penduduk di Kecamatan Alas dirinci per Desa Tahun 2017  
(Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019)

Berdasarkan Gambar 6 dapat dijelaskan bahwa keseluruhan jumlah kepadatan penduduk dengan jumlah 548 Jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah kepadatan terpadat ada di Desa Baru sebanyak 5873 Jiwa/Km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah ada di Desa Marenteh sebanyak 100 Jiwa/Km<sup>2</sup>.



### ***C. Gambaran Umum Desa Pulau Bungin***

#### **1. Letak Geografis**

Desa Pulau Bungin adalah salah satu desa dari 8 desa yang berada di Kecamatan Alas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di ujung barat Pulau Sumbawa. Secara geografis, pulau ini berbatasan dengan beberapa wilayah, yakni:

- Sebelah utara berbatasan dengan laut Labuhan Alas (Pulau Panjang);
- Sebelah selatan berbatasan dengan laut Desa Dalam;
- Sebelah barat berbatasan dengan laut Desa Gontar; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan laut Pulau Kaung.

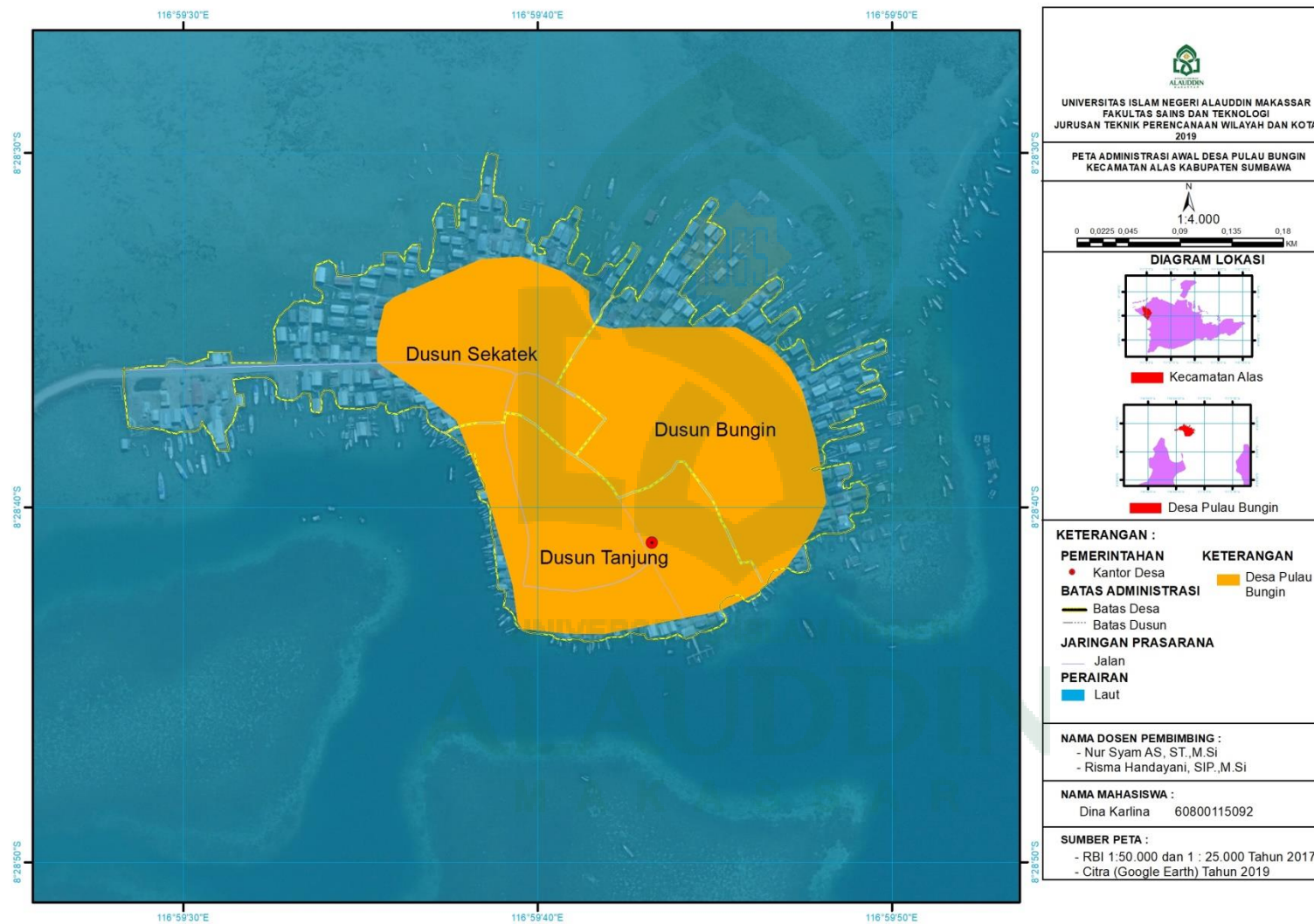
Walaupun wilayah tempat tinggalnya berupa pulau kecil, namun pulau ini juga merupakan desa administratif, seperti desa-desa lain yang ada di dataran Pulau Sumbawa. Pulau ini, mulanya bukan merupakan pulau yang telah ada di bagian utara Pulau Sumbawa, melainkan hanya sebuah tumpukan karang laut. Namun, lambat-laun anggota masyarakat yang ingin membuat rumah di pulau itu harus mengumpulkan batu karang sampai menutup air laut seluas rumah yang ingin dibangun. Sampai akhirnya, tempat ini menjadi sebuah pulau besar yang didiami oleh 3161 Jiwa. Berdasarkan pemaparan tersebut, otomatis mayoritas penduduk desa ini berprofesi sebagai nelayan.

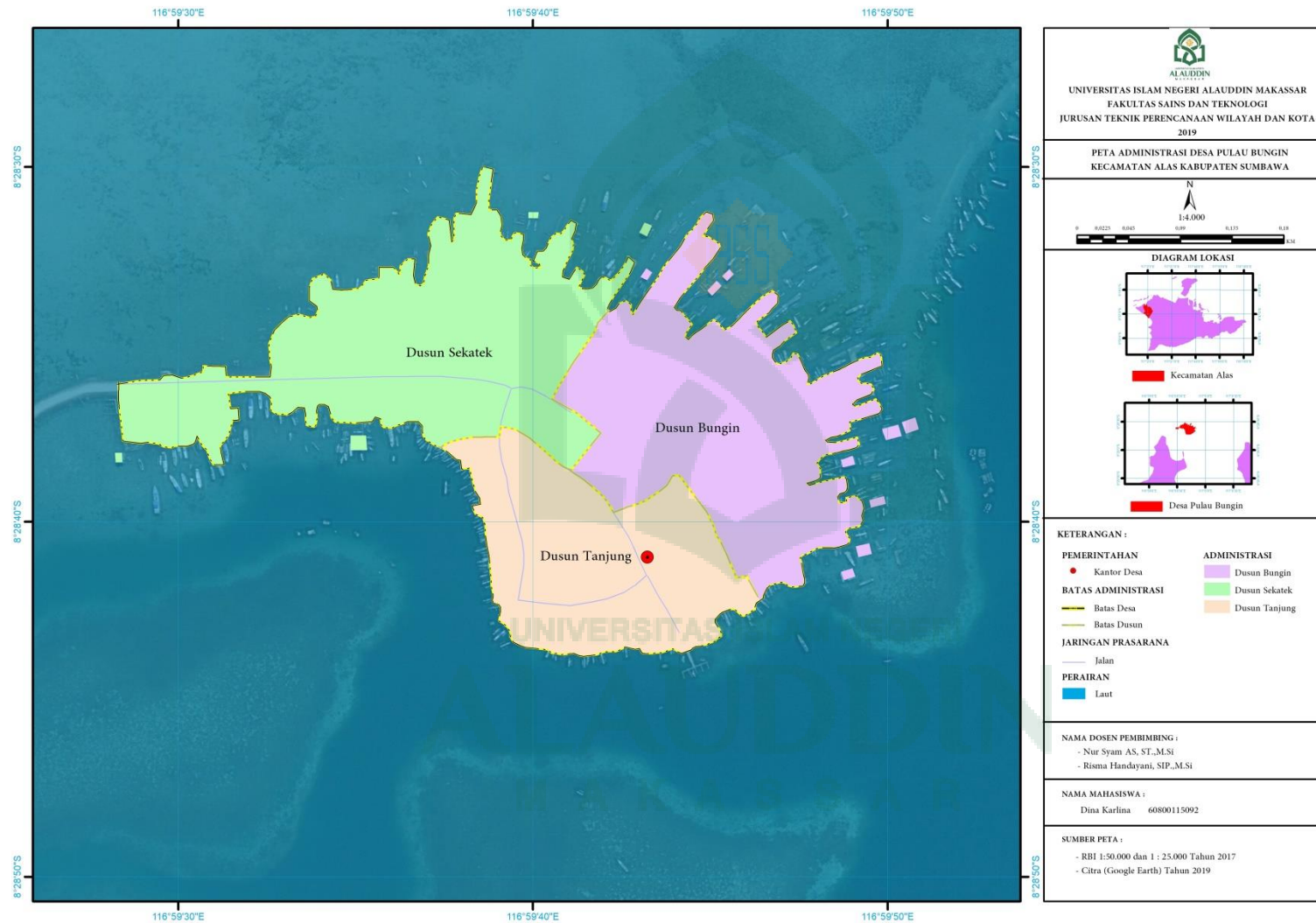
Pada Tahun 2011 menurut badan pusat statistik jumlah luas Desa Pulau Bungin adalah 8,2 Ha jumlahnya meningkat dalam 8 Tahun terakhir, karena penambahan

jumlah rumah warga Desa Pulau Bungin bebas memperluas tanah atau daratan, pada

Tahun 2019 adalah 12,7 Ha.







## **2. Kondisi Topografi**

Desa Pulau Bungin yang merupakan pulau dengan mengusahakan daratan dengan cara menimbun air laut dengan batu maupun karang yang sudah mati dan mempunyai topografi wilayah merupakan dengan tinggi 3 MDPL.

## **3. Jenis Tanah**

Desa Pulau Bungin yang merupakan pulau dengan mengusahakan daratan dengan cara menimbun air laut dengan batu maupun karang yang sudah mati sehingga memiliki jenis tanah yaitu mediteran coklat.

## **4. Curah Hujan**

Desa Pulau Bungin yang merupakan pulau yang sangat kering dan tidak mempunyai lahan terbuka hijau dikarenakan Desa Pulau Bungin memiliki curah hujan 750 mm/Tahun.

## **5. Kemiringan Lereng**

Desa Pulau Bungin yang merupakan pulau dengan mengusahakan daratan dengan cara menimbun air laut dengan batu maupun karang yang sudah mati sehingga dan menjadi daratan dengan kemiringan lereng 0-2%.

## **6. Penggunaan Lahan (*Land Use*)**

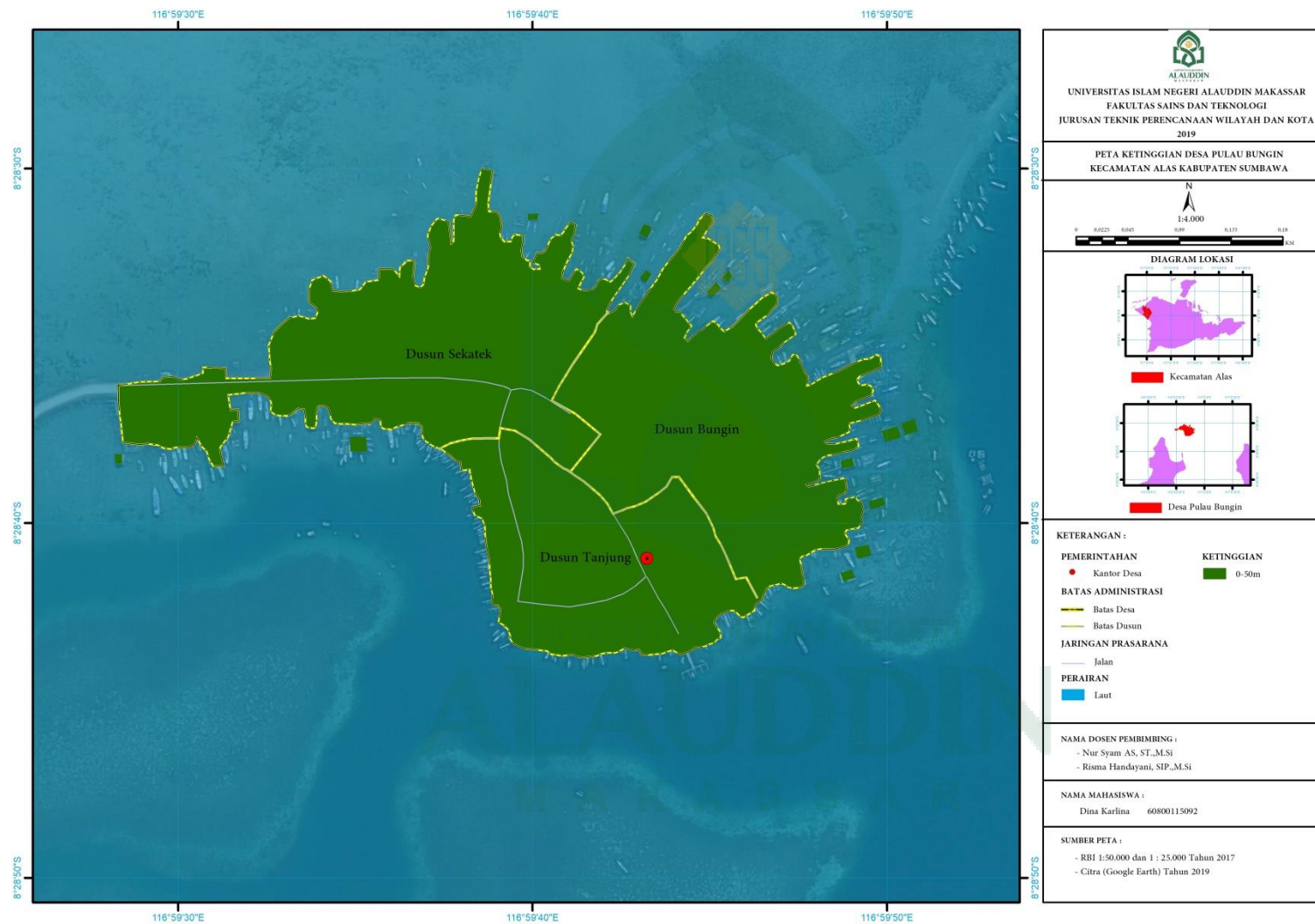
Berdasarkan peta penggunaan lahan dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan di Desa Pulau Bungin di dominasi oleh permukiman, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 18** Jumlah Luas Lahan Desa Pulau Bungin Tahun 2019

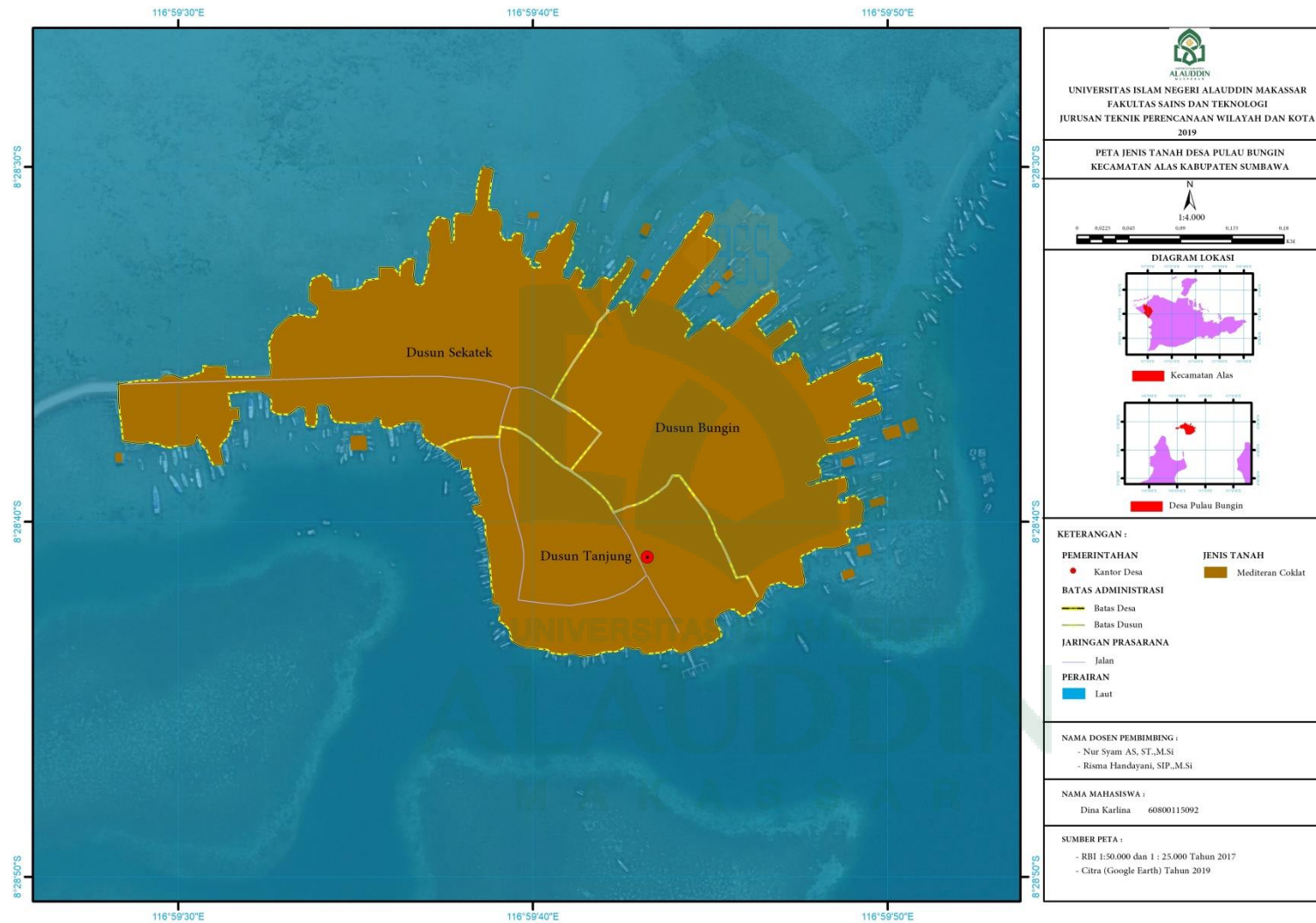
<b>Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Permukiman	12,04
Peribadatan	0,1
Perkantoran	0,1
Pendidikan	0,1
<b>Total</b>	<b>12,7</b>

Sumber: *Profil Desa Pulau Bungin Tahun 2019*

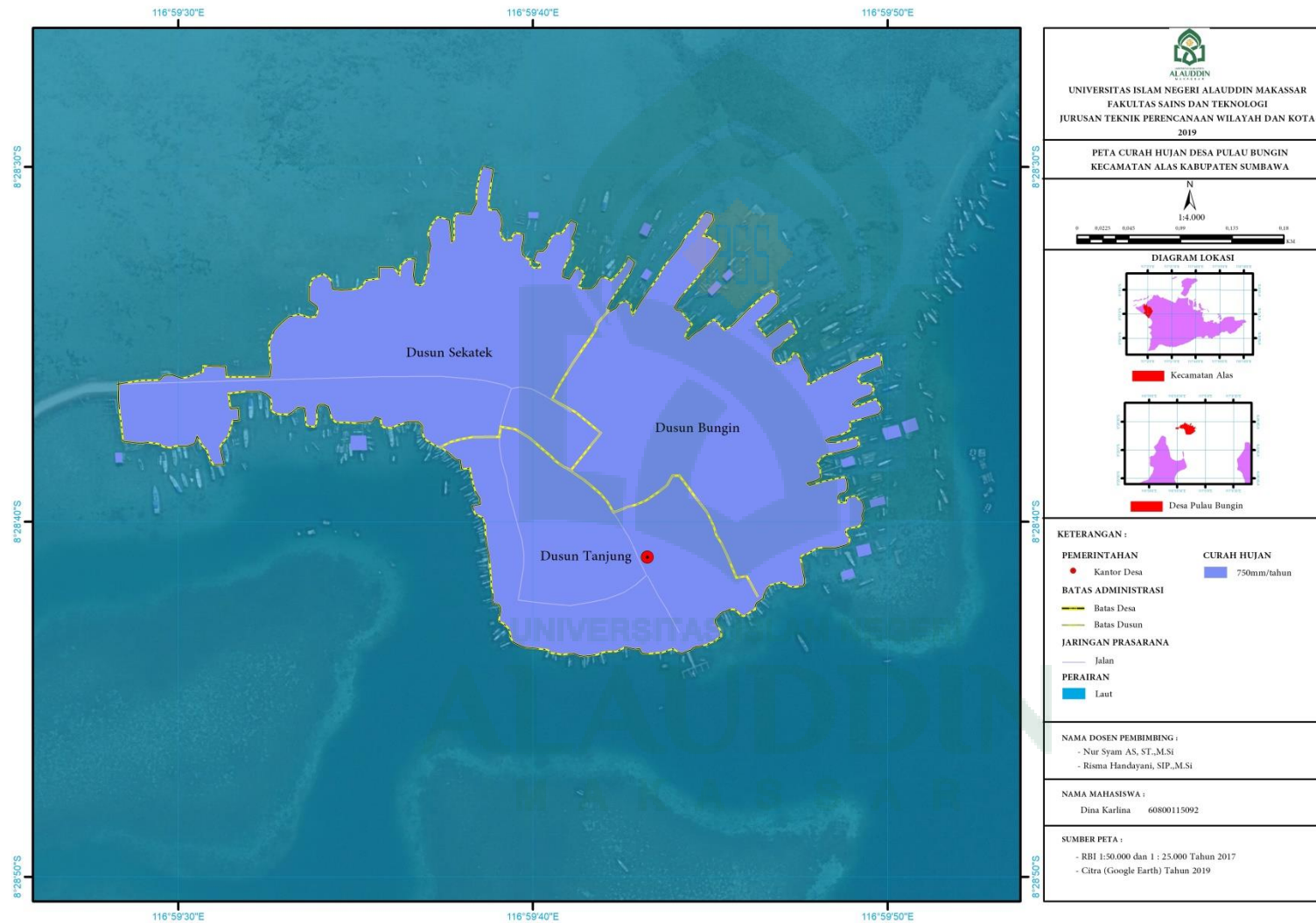
Berdasarkan Tabel 18 dapat dijelaskan bahwa jumlah luas penggunaan lahan di Desa Pulau Bungin adalah 12,7 Ha untuk permukiman adalah 12,04 Ha, peribadatan 0,1 Ha, perkantoran 0,1 Ha, dan pendidikan 0,1 Ha.

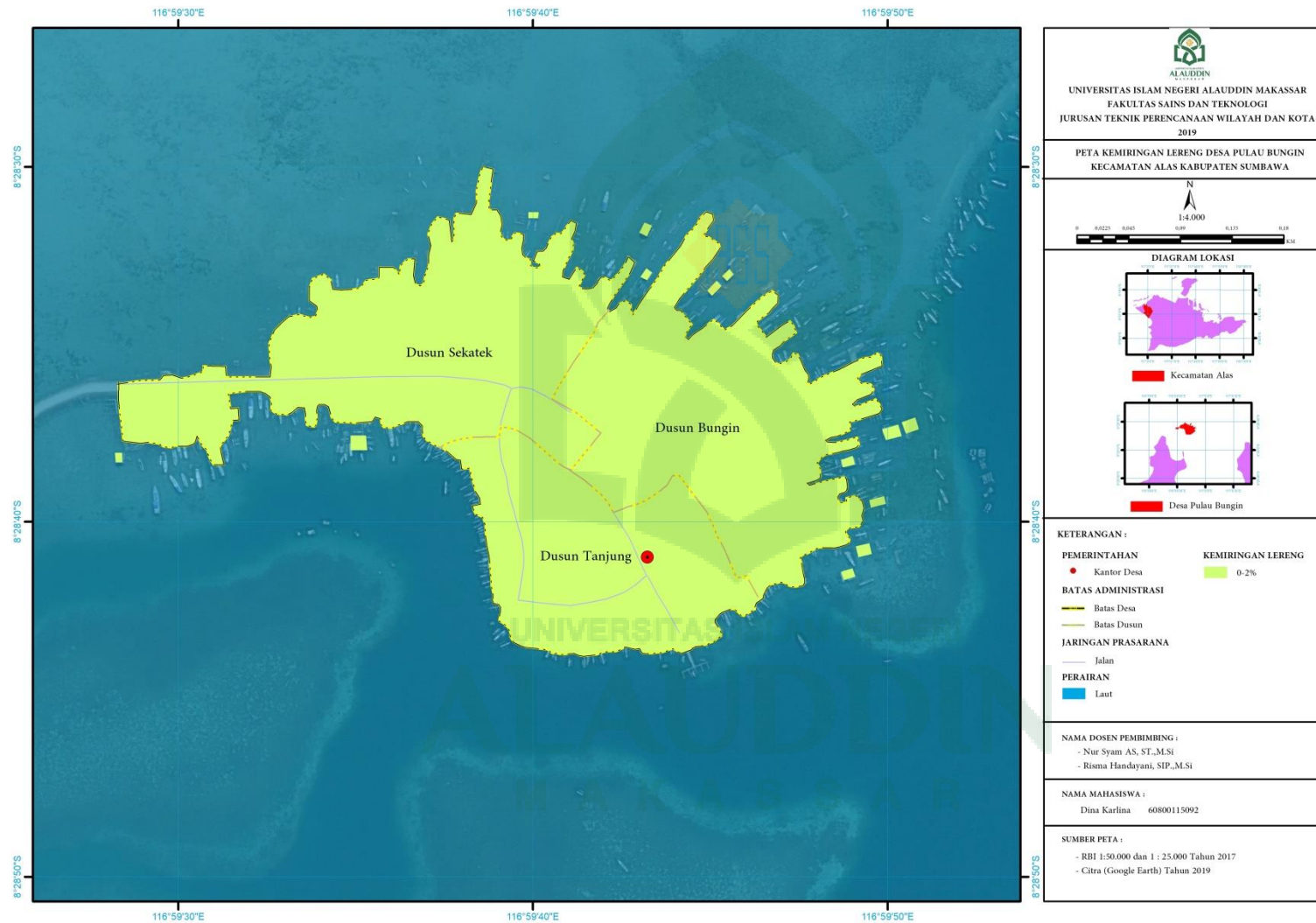


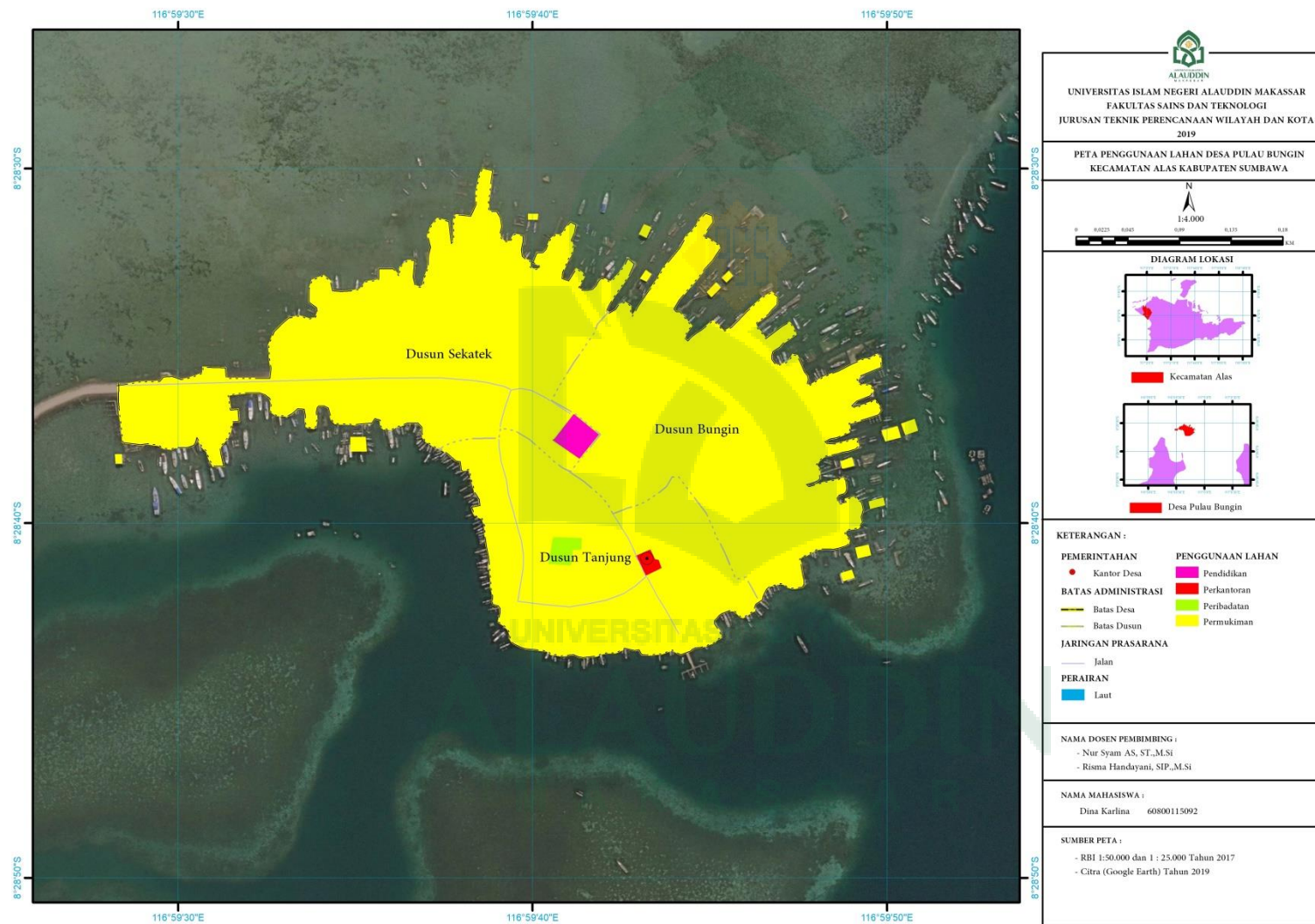












## 7. Kondisi Demografi

**Tabel 19** Jumlah Penduduk Desa Pulau Bungin Tahun 2017

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
Pulau Bungin	1549	1612	3161

Sumber: *Profil Desa Pulau Bungin Tahun 2017*

Berdasarkan Tabel 19 dapat dijelaskan jumlah penduduk Desa Pulau Bungin adalah 3161 Jiwa. Untuk jenis kelamin laki-laki memiliki jumlah penduduk 1549 Jiwa dan perempuan 1612 Jiwa. Artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

**Tabel 20** Jumlah Kartu Keluarga Desa Pulau Bungin Tahun 2017

Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
Pulau Bungin	982	3161

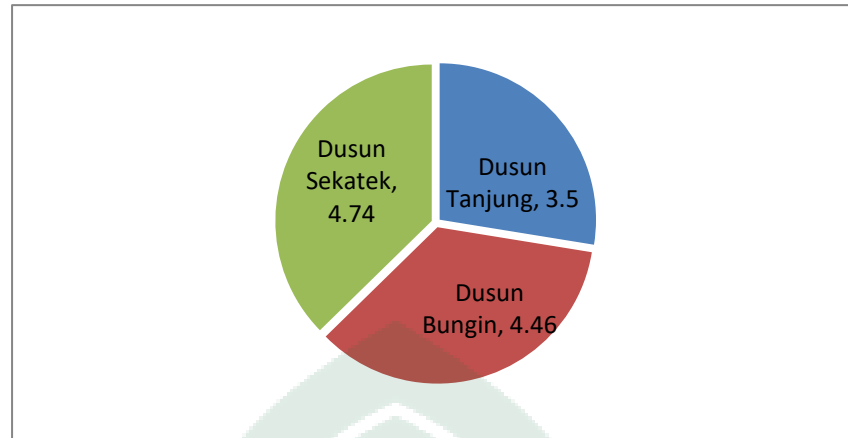
Sumber: *Profil Desa Pulau Bungin Tahun 2017*

Berdasarkan Tabel 20 dapat dijelaskan bahwa jumlah KK di Desa Pulau Bungin adalah 982 KK dari jumlah penduduk.

**Tabel 21** Jumlah Luas perdusun di Desa Pulau Bungin Tahun 2017

Dusun	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk
Dusun Tanjung	3,50	1032
Dusun Bungin	4,46	1116
Dusun Sekatek	4,74	1013
<b>Total</b>	<b>12,7</b>	<b>3161</b>

Sumber: *Profil Desa Pulau Bungin Tahun 2017*



**Gambar 14** Jumlah Luas perdusun di Desa Pulau Bungin Tahun 2017  
(Sumber: Profil Desa Pulau Bungin Tahun 2017)

Berdasarkan Tabel 21 dan Gambar 14 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah luas untuk Desa Pulau Bungin yaitu 12,7 Ha. Jumlah luas yang paling banyak yaitu di Dusun Sekatek dengan luas 4,74 Ha, kemudian Dusun Bungin dengan luas 4,46 Ha dan yang paling rendah yaitu di Dusun Tanjung dengan luas 3,50 Ha.

### **8. Permukiman Desa Pulau Bungin**

Pada Tahun 1942 pulau yang pada awalnya yang hanya seluas 3 hektar menjadi bertambah luasannya setiap Tahun. Daratan pulau ini bertambah sekitar 30-60 are setiap Tahunnya, dikarenakan adanya *Budaya Nangung Rumah* yaitu setiap yang ingin berkeluarga diharuskan membuat tempat mendirikan rumah terlebih dahulu dari timbunan karang dan pasir. Pulau Bungin dengan pola pemukiman kepadatan penduduk yang nyaris tanpa jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Pulau Bungin sebagai salah satu tujuan wisata lokal, nasional dan internasional, yang di kenal sebagai pulau terpadat dengan permukiman tradisional namun di sisi lain apabila dilihat dari segi pengkajian teoritisnya permukiman padat



merupakan lingkungan hunian yang tidak sehat dan tidak layak huni apabila dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan tentang penataan permukiman. Permukiman yang tidak layak huni biasanya banyak dijumpai di berbagai pinggiran-pinggiran kota.

Pulau bungin dengan pemukiman yang dikenal sangat padat ini disebabkan karena tingginya angka jumlah penduduk yang semakin meningkat dikarenakan oleh faktor sistem biologis yang membuat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat sedangkan kebutuhan akan lahan yang semakin sempit.



**Gambar 15** Permukiman Desa Pulau Bungin  
(Sumber: Hasil Survey Tahun 2019)

#### a. Permasalahan Permukiman

Permasalahan yang ada di Desa Pulau Bungin seperti tidak adanya lahan kosong yang layak untuk tumbuhnya tanaman, kepadatan penduduk yang diakibatkan oleh adanya rumah rumah liar yang tidak memiliki sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah melainkan Hak Guna Bangunan saja juga berdampak pada mudahnya terjadi kebakaran seperti pada

Tahun 2018 pada saat terjadi gempa yang memakan ribuan rumah rumah rusak hampir dari satu dusun yang berada di Desa Pulau Bungin terbakar. Selain itu, banyaknya sampah yang dihasilkan oleh warga. Dengan sedikitnya jumlah kontainer yang mengangkut sampah, penduduk tidak memiliki pilihan selain membuang sampah di sekitar rumahnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan banyaknya sampah di lautan sekitar, jika masalah sampah tersebut tidak segera diatasi maka akan terjadi pencemaran air laut sehingga bisa merusak ekosistem laut, bahkan hewan hewan ternak seperti kambing memakan kertas dan sampah dari masyarakat.



**Gambar 16** Permasalahan Permukiman  
(Sumber: Hasil Survey Tahun 2019)

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

- Sarana Pendidikan di Desa Pulau Bungin terdapat 1 unit fasilitas pendidikan berupa Sekolah Dasar yang berada di Dusun Sekatek. Sekolah Dasar ini menempati lahan yang memang peruntukannya untuk sarana pendidikan.



**Gambar 17** Sarana Pendidikan Desa Pulau Bungin  
(Sumber: Hasil Survey Tahun 2019)

- Sarana Kesehatan di Desa Pulau Bungin terdapat fasilitas kesehatan, jadi untuk masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan yaitu dengan cara pergi ke desa terdekat atau ke Puskesmas kecamatan.
- Sarana Perdagangan dan Niaga di Desa Pulau Bungin terdapat beberapa kios-kios kecil yang terbatas berada didalam rumah mereka yang memiliki sifat yang melekat yaitu memanfaatkan dibawah kolong rumah sebagai tempat berdagang makanan ringan, untuk warung biasanya disana menggunakan baruga yang terbuat dari bambu yang berbentuk persegi dan mempunyai tiang-tiang berukuran sedang. Keberadaan sarana perdagangan seperti kios-kios kecil yaitu tersebar di setiap dusun.



- Sarana Perkantoran di Desa Pulau Bungin terdapat 1 unit fasilitas perkantoran yaitu Kantor Desa yang berada di Dusun Tanjung. Kantor Desa ini menempati lahan yang memang peruntukannya untuk sarana perkantoran..



**Gambar 18** Sarana Perkantoran Desa Pulau Bungin  
(Sumber: Hasil Survey Tahun 2019)

- Sarana Peribadatan di Desa Pulau Bungin terdapat 1 unit Masjid yang berada di Dusun Tanjung dan menempati lahan yang memang peruntukannya untuk sarana peribadatan. Dengan jumlah penduduk 3161 Jiwa dan jumlah luas wilayah 12,7 Ha tidak maksimal dan jarak dari dusun lain untuk menuju masjid sangat susah dan cukup jauh, sehingga menurut hasil proyeksi sarana peribadatan semestinya membutuhkan 3 unit mushollah yang tersebar di setiap Dusun.



**Gambar 19** Sarana Peribadatan Desa Pulau Bungin  
(Sumber: Hasil Survey Tahun 2019)

- Sarana Ruang Terbuka Hijau/ Lapangan Olahraga di jelaskan bahwa kepadatan penduduk Desa Pulau Bungin menimbulkan padatnya pula perumahan sehingga untuk kebutuhan ruang terbuka hijau/lapangan olahraga tidak ada, hampir semua dataran ditutup oleh atap atap rumah atau bangunan.
- Sarana Perkuburan masyarakat Desa Pulau Bungin mempunyai TPU yang berada tidak jauh dari pulau tersebut, jika ada masyarakat yang meninggal maka tempat di kuburnya itu di Desa yang bersebelahan di Desa Puau Bungin tersebut, sebelum di bangunnya akses jembatan sebagai akses untuk menuju Desa lainnya atau kota masyarakat Pulau Bungin menggunakan perahu.



**Gambar 20** Sarana Perkuburan Desa Pulau Bungin  
(Sumber: Goegle Maps)

#### **D. Analisis**

Dari hasil pengamatan survey yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah, maka didapatkan yakni sebagai berikut:

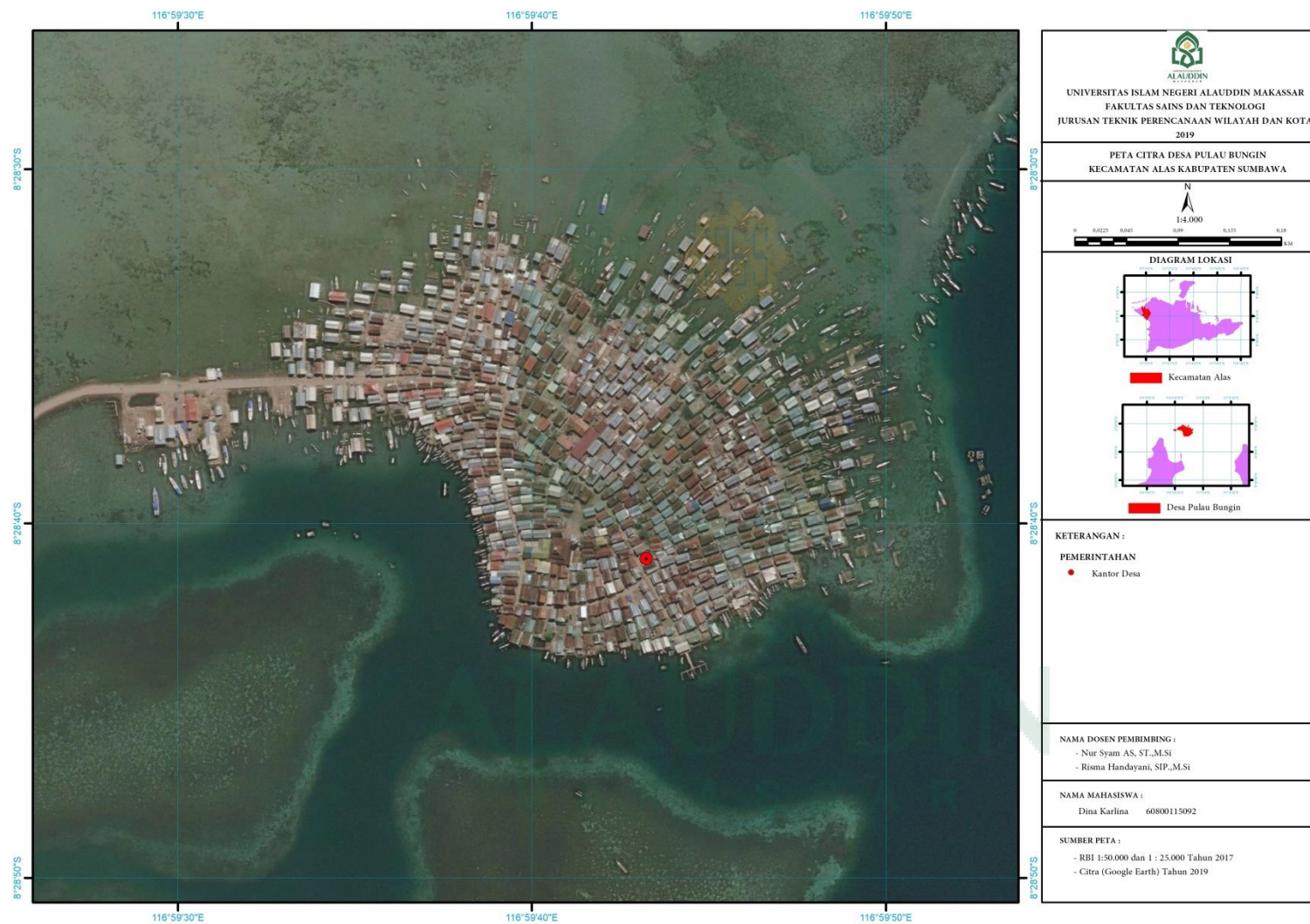
##### **1. Pola Permukiman Desa Pulau Bungin**

Analisis pola permukiman mengacu pada teori Bintarto dan Surastopo, 1979 bahwa pola permukiman Desa Pulau Bungin yaitu seragam dikarenakan jarak antar rumah sama atau sama jauhnya dengan rumah tetangganya. Permukiman di Desa Pulau Bungin memiliki jarak rata-rata 1 meter sampai 2 meter.

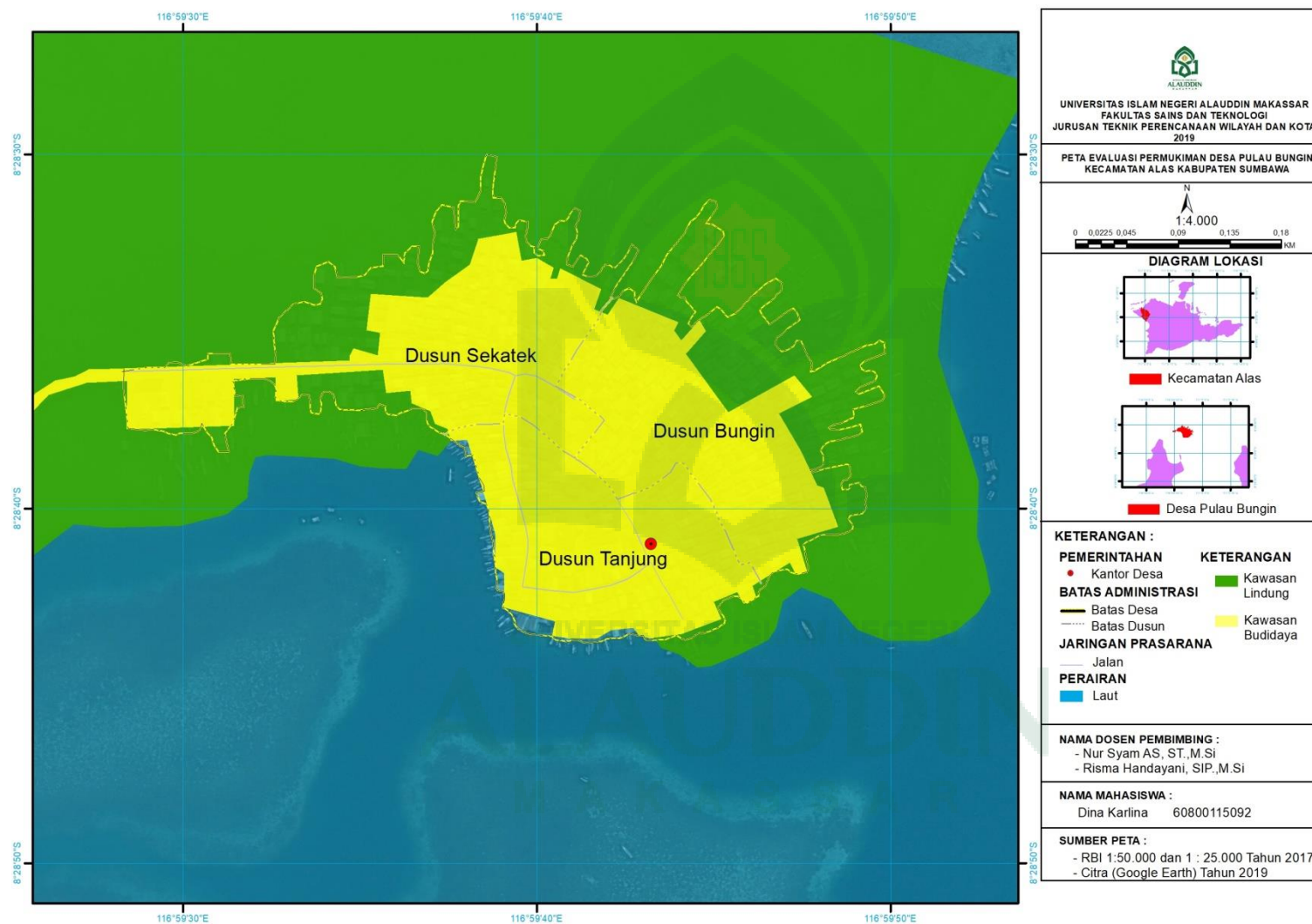
- a. Desa Pulau Bungin pola ruangnya lebih kepada pembangunan permukiman adapun di Desa Pulau Bungin sementara kebutuhan akan fasilitas itu ada.
- b. Terkait dari pada jenis kegiatan saat ini ada sifatnya yang berdiri sendiri dan ada yang bersifat melekat, jadi peruntukkan seperti perdagangan, kesehatan,

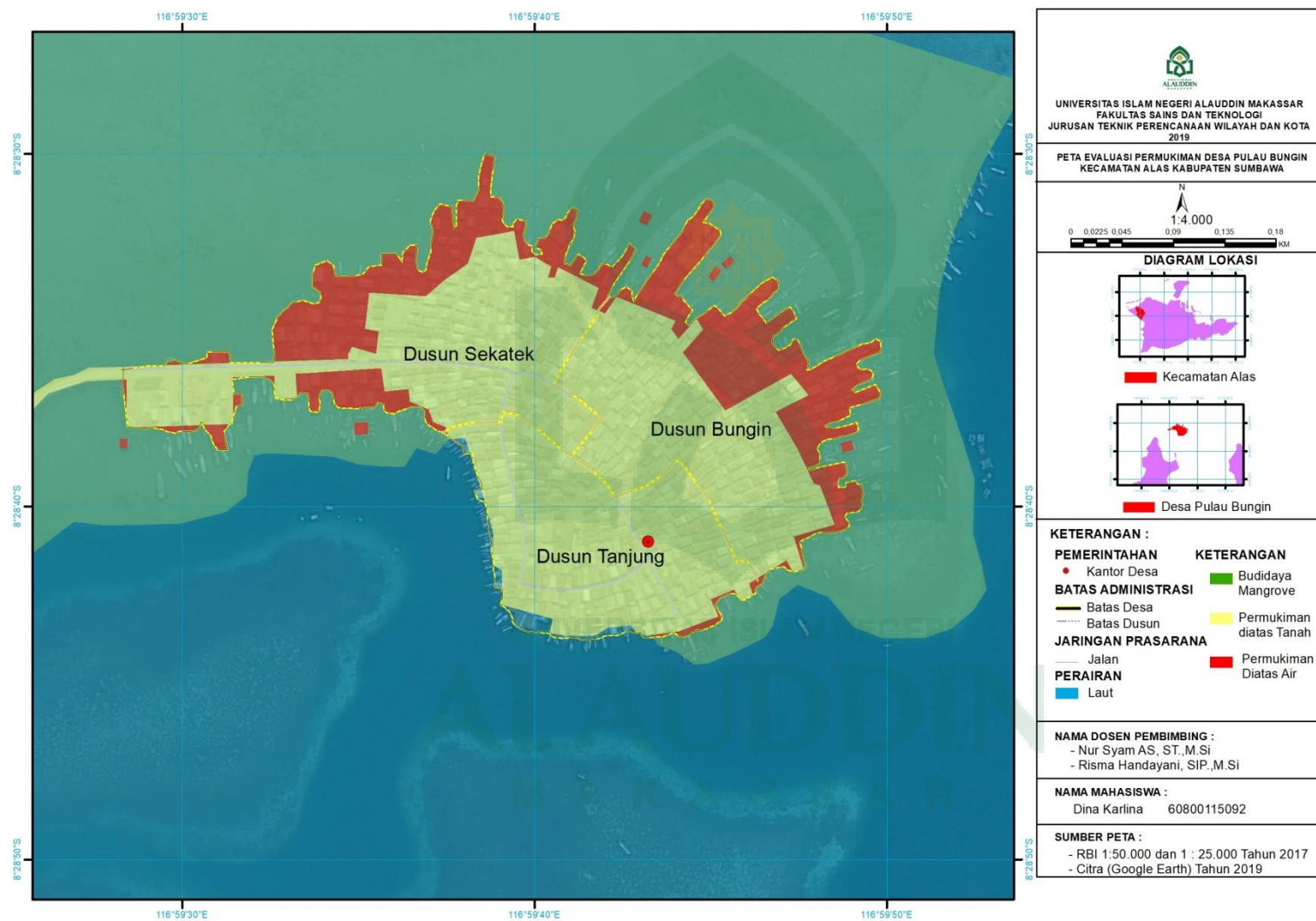
RTH/lapangan olahraga, peribadatan lahan yang berada di Desa Pulau Bungin tidak ada sampai saat ini

- c. Setelah menginterpretasikan mengenai kawasan budidaya di Desa Pulau Bungin merupakan mata pencarian masyarakat adalah nelayan di laut lepas, akan tetapi yang perlu dilihat disini yaitu kawasan lindung yang sudah tidak ada lagi terlihat karena banyaknya pembangunan permukiman akibat tradisi *nangung rumah* tersebut.
- d. Fungsi lindung yang seharusnya ada menjadi tidak ada karena adanya budaya nangung rumah karena sudah tidak lahan didarat sehingga masyarakat membangun rumah diatas air yang semestinya itu adalah zona lindung.









## 2. Arahana Penataan Kawasan Permukiman Desa Pulau Bungin

### a. Analisis Proyeksi penduduk

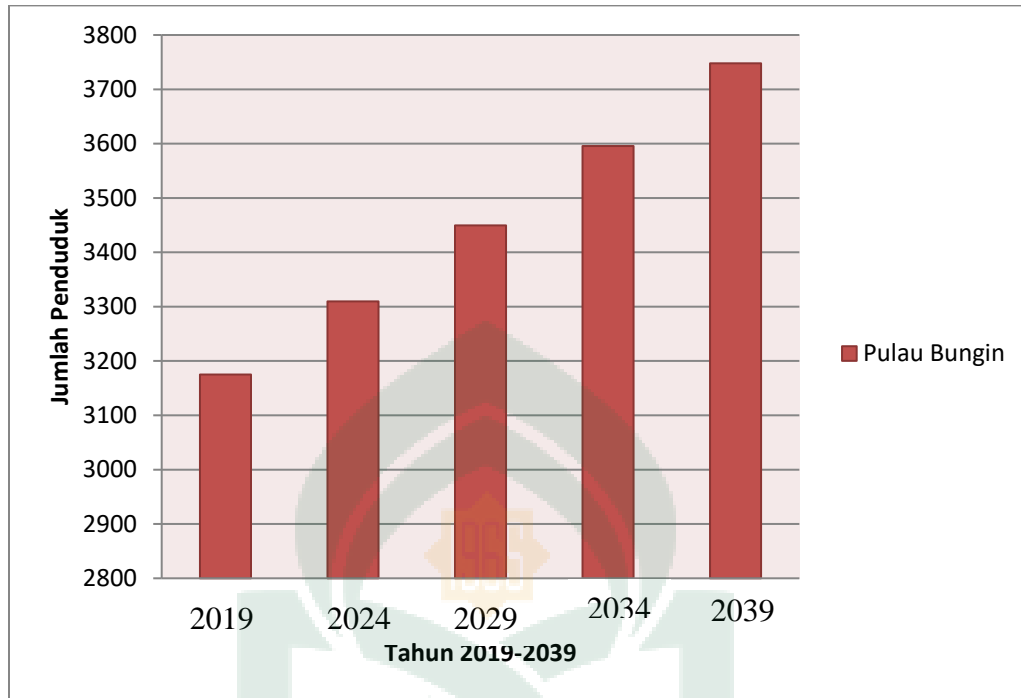
$$r = \frac{1}{t} \ln \left( \frac{P_t}{P_o} \right) \quad (\dots\dots 2)$$

Keterangan :

$P_t$  = Jumlah penduduk paada Tahun ke-t  
 $P_o$  = Jumlah penduduk pada Tahun dasar  
 $t$  = Jangka waktu  
 $r$  = Laju pertumbuhan penduduk  
 $e$  = Bilangan eksponensial yang besarnya 2,718281828

Jika niali  $r > 0$ , artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari Tahun sebelumnya. Jika  $r < 0$ , artinya pertumbuhan penduduk negative atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan diatas didapatkan jumlah penduduk Tahun 2039 yaitu 3748 Jiwa. Dengan mengalami pertumbuhan penduduk dengan jarak 5 Tahun yaitu pada Tahun 2019 sebanyak 3175 Jiwa, Tahun 2024 sebanyak 3310 Jiwa, Tahun 2029 sebanyak 3450 Jiwa dan pada Tahun 2034 sebanyak 3596 Jiwa, hingga pada Tahun 2039 sebanyak 3748 Jiwa.





**Gambar 24** Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Pulau Bungin  
(Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019)

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai  $r > 0$ , artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari Tahun sebelumnya.

b. Analisis Daya Dukung Wilayah Untuk Permukiman (DDPm)

Daya dukung wilayah untuk pemukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak, lahan yang layak untuk permukiman yaitu diluar kawasan bencana alam, kawasan lindung, kawasan sawah irigasi dan tambak. Untuk jumlah penduduk yang digunakan adalah penduduk hasil proyeksi Tahun

2039, dimana bertujuan untuk melihat luasan lahan permukiman untuk penduduk kedepannya.

**Tabel 22** Daya Dukung Permukiman Desa Pulau Bungin

<b>Pulau Bungin</b>	<b>Lahan yang layak untuk kawasan permukiman (Ha)</b>	<b>Jumlah penduduk</b>	<b>Daya dukung permukiman</b>
Pulau Bungin (Permukiman diatas Tanah)	9,3	3748	0,9
Pulau Bungin (Permukiman diatas Air)	3,4		0,3

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 22 dapat dijelaskan bahwa hasil analisis dari daya dukung permukiman Desa Pulau Bungin (permukiman diatas tanah) yaitu  $DDP < 1$ , berarti luasan pulau tidak mampu menampung penduduk bermukim, jika dilihat dari luas (permukiman diatas air) yaitu  $DDP < 1$ , berarti luasan pulau tidak mampu menampung penduduk bermukim.

#### c. Analisis Kemampuan Lahan

- 1) Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi adalah memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Dari hasil analisis bahwa di Desa Pulau Bungin untuk satuan kemampuan lahan (SKL) Morfologinya yaitu kategori tinggi dengan nilai 5 maka Desa Pulau Bungin dapat diperuntukkan sebagai kawasan permukiman dikarenakan memiliki kemiringan lereng 0-3% (datar).

- 2) Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan dikerjakan adalah untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/ pengembangan kawasan. Dari hasil analisis bahwa di Desa Pulau Bungin untuk satuan kemampuan lahan (SKL) kemudahan dikerjakan yaitu cukup tinggi dengan nilai 5, sehingga kemudahan untuk melakukan pembangunan di Desa Pulau Bungin mudah untuk dikerjakan.
- 3) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng adalah untuk mengetahui kondisi lahan yang berkaitan dengan kestabilan dan kemudahan pengembangan lahan untuk kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya. Dari hasil analisis bahwa di Desa Pulau Bungin untuk satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan lereng yaitu tinggi dengan nilai 5, sehingga tingkat kemudahan pengembangan lahan untuk kegiatan permukiman cukup tinggi.
- 4) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi adalah dimaksudkan untuk mengetahui tingkatan kemampuan lahan dalam mendukung permukiman serta sarana dan prasarananya dalam menunjang pemanfaatan lahan untuk kegiatan permukiman. Dari hasil analisis bahwa di Desa Pulau Bungin untuk satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan pondasi yaitu tinggi dengan nilai 5, sehingga tingkat kemampuan lahan cukup tinggi dalam mendukung permukiman serta sarana dan prasarana dalam menunjang pemanfaatan lahan untuk kegiatan permukiman.

- 5) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air adalah pada suatu lahan merupakan hal yang sangat penting, mengingat fungsi air tanah sebagai sumber pasokan air bersih untuk berbagai kebutuhan, terutama di saat kemarau panjang dimana air permukaan tidak mencukupi. Bertolak dari hal tersebut, maka analisis satuan kemampuan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kemampuan lahan dalam menunjang ketersediaan air. Dari hasil analisis bahwa di Desa Pulau Bungin untuk satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan pondasi yaitu sedang dengan nilai 3, sehingga kemampuan lahan cukup untuk menunjang ketersediaan air.
- 6) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Untuk Drainase adalah melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari SKL drainase berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari. Dari hasil analisis bahwa di Desa Pulau Bungin untuk satuan kemampuan lahan (SKL) untuk drainase yaitu kurang dengan nilai 2, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat local ataupun meluas tidak dapat dihindari.
- 7) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga

dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antispasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Dari hasil analisis bahwa di Desa Pulau Bungin untuk satuan kemampuan lahan (SKL) terhadap erosi yaitu sedang dengan nilai 3, sehingga tingkat ketahanan lahan cukup mempengaruhi terhadap erosi (abrasi).

- 8) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah merupakan satuan untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Dari hasil analisis bahwa di Desa Pulau Bungin untuk satuan kemampuan lahan (SKL) pembuangan limbah yaitu cukup dengan nilai 4, sehingga Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah cukup baik limbah padat maupun limbah cair.
- 9) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lahan yang berhubungan dengan kemampuan lahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. Pengenalan secara dini terhadap lahan yang mungkin berpotensi terjadinya bencana alam akan bermanfaat dalam usaha tindakan bencana alam akan bermanfaat dalam usaha tindakan antisipasi ataupun menghindari pemanfaatan pada lahan yang berpotensi bencana alam. Dari hasil analisis bahwa di Desa Pulau Bungin untuk satuan kemampuan lahan (SKL) terhadap bencana alam yaitu sedang dengan nilai 4, sehingga

intensitas bencana alam atau gerakan tanah di Desa Pulau Bungin jarang terjadi.



**Tabel 23** Pembobotan SKL

<b>Bobot x Nilai</b>	<b>SKL Morfologi</b>	<b>SKL kemudahan dikerja</b>	<b>SKL Kestabilan Lereng</b>	<b>SKL Kestabilan Pondasi</b>	<b>SKL Ketersediaan Air</b>
	<b>bobot: 5</b>	<b>bobot: 1</b>	<b>bobot: 5</b>	<b>bobot: 3</b>	<b>bobot: 5</b>
	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

**Lanjutan Tabel 23** Pembobotan SKL

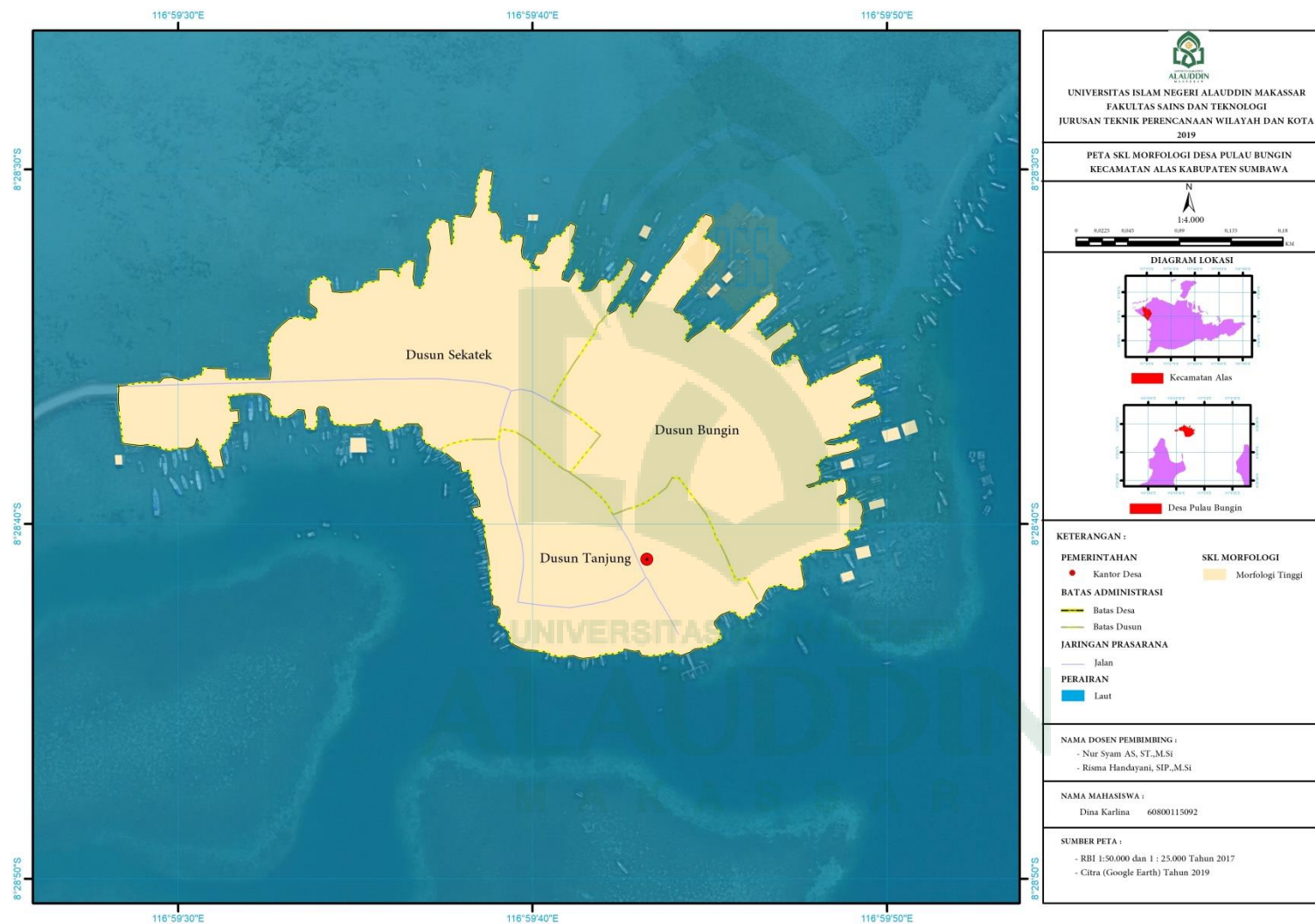
<b>Bobot x Nilai</b>	<b>SKL Untuk Drainase</b>	<b>SKL Terhadap Erosi</b>	<b>SKL Pembuangan Limbah</b>	<b>SKL Bencana Alam</b>	<b>SKL Kemampuan Lahan</b>
	<b>bobot: 5</b>	<b>bobot: 3</b>	<b>bobot: 0</b>	<b>bobot: 5</b>	<b>Nilai Total</b>
	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>124</b>

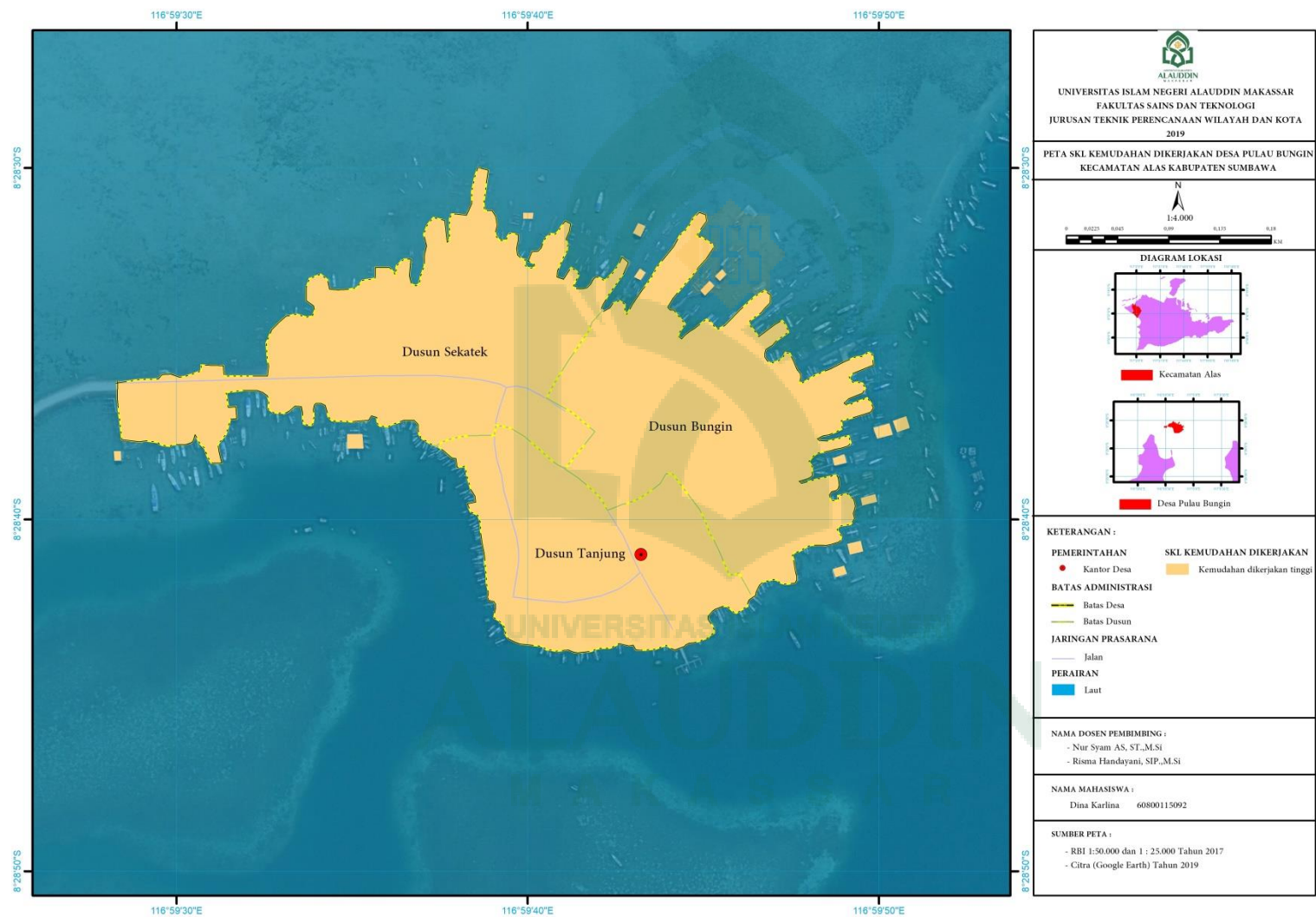
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

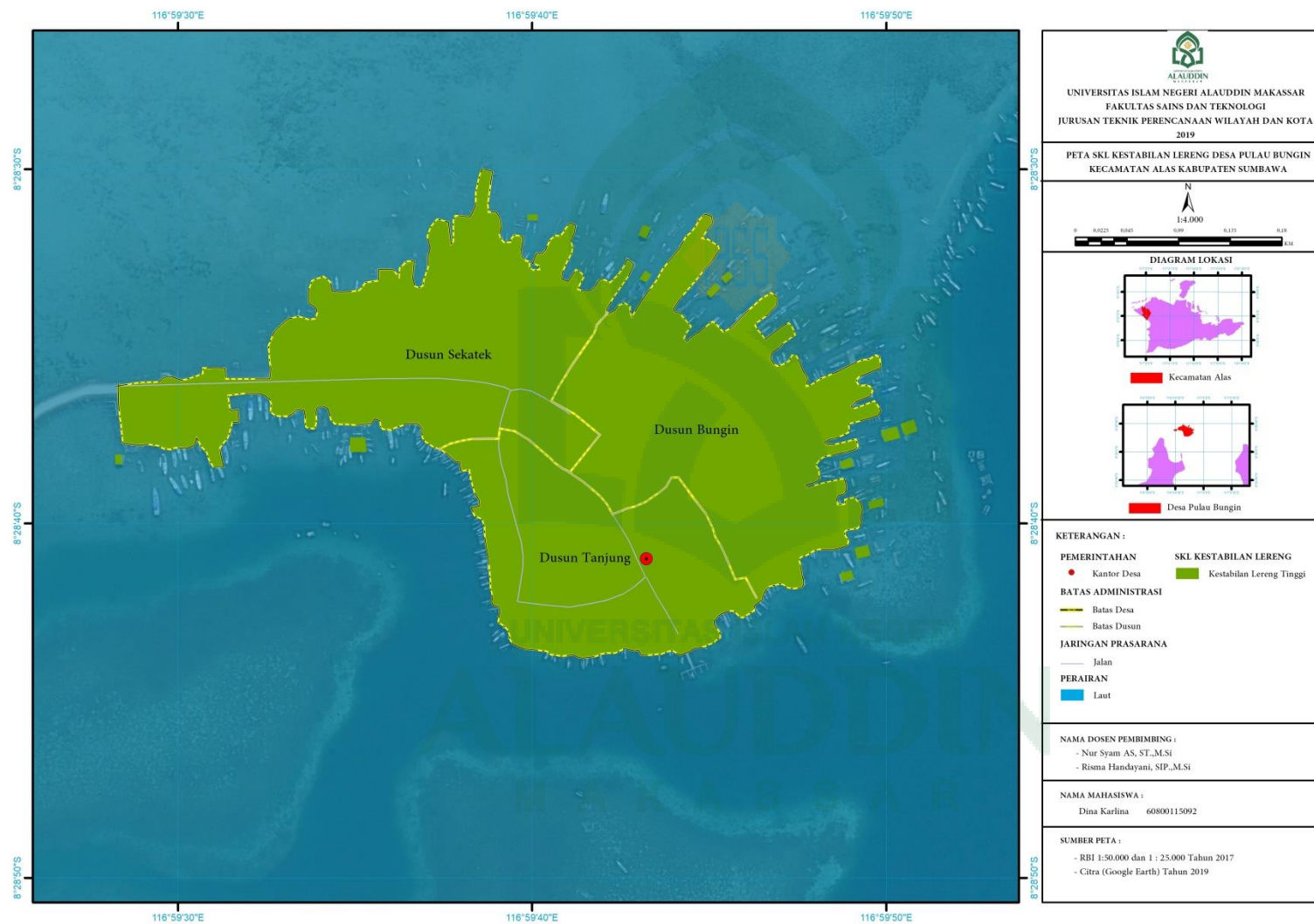
Berdasarkan dari hasil analisis metoda tumpang tindih atau overlay terhadap penilaian atau pembobotan dari setiap kriteria/variabel yang ada, sesuai dengan alur bagan analisis tersebut, maka dapat diketahui total nilai atau skor dari kawasan permukiman, sehingga kawasan permukiman dapat di kelompokkan berdasarkan rentang total skor yang ada. Dari hasil total penilaian terhadap semua variabel tersebut, dapat diketahui bahwa rentang nilai yang diperoleh adalah 110-134. Berdasarkan nilai tersebut, kemampuan pengembangan lahan kawasan perkotaan dapat dibagi menjadi: - Kemampuan pengembangan kurang dengan rentang nilai 124 dengan luas sebesar 12,7 Ha.

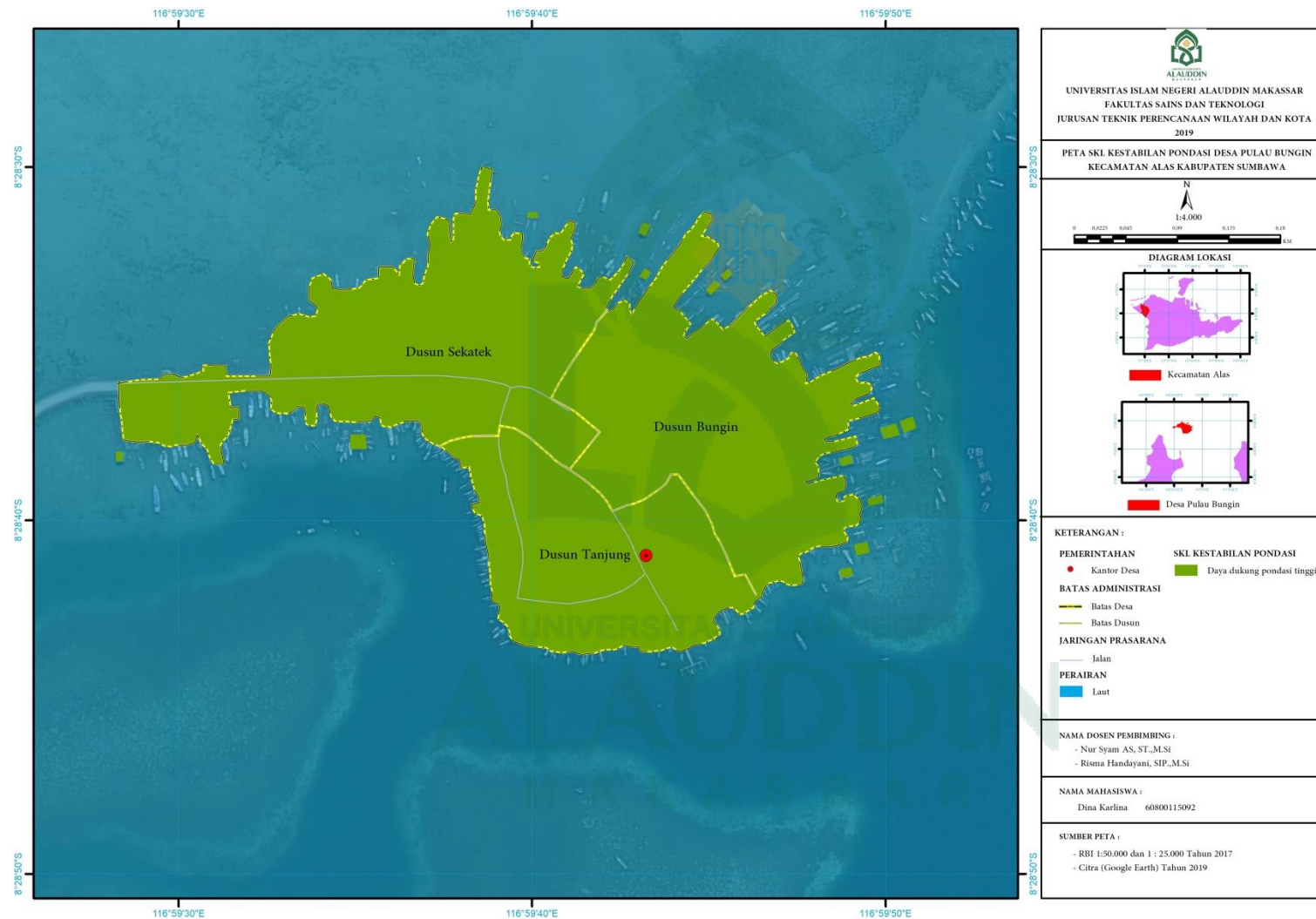
Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan untuk perencanaan kawasan permukiman di Desa Pulau Bungin tidak dapat dilakukan pengembangan pembangunan kawasan permukiman, untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk untuk Tahun 2039, maka diarahkan permukimannya ke pulau lainnya atau Desa terdekat dengan catatan masih memiliki lahan yang dapat dikembangkan untuk menjadi kawasan permukiman.



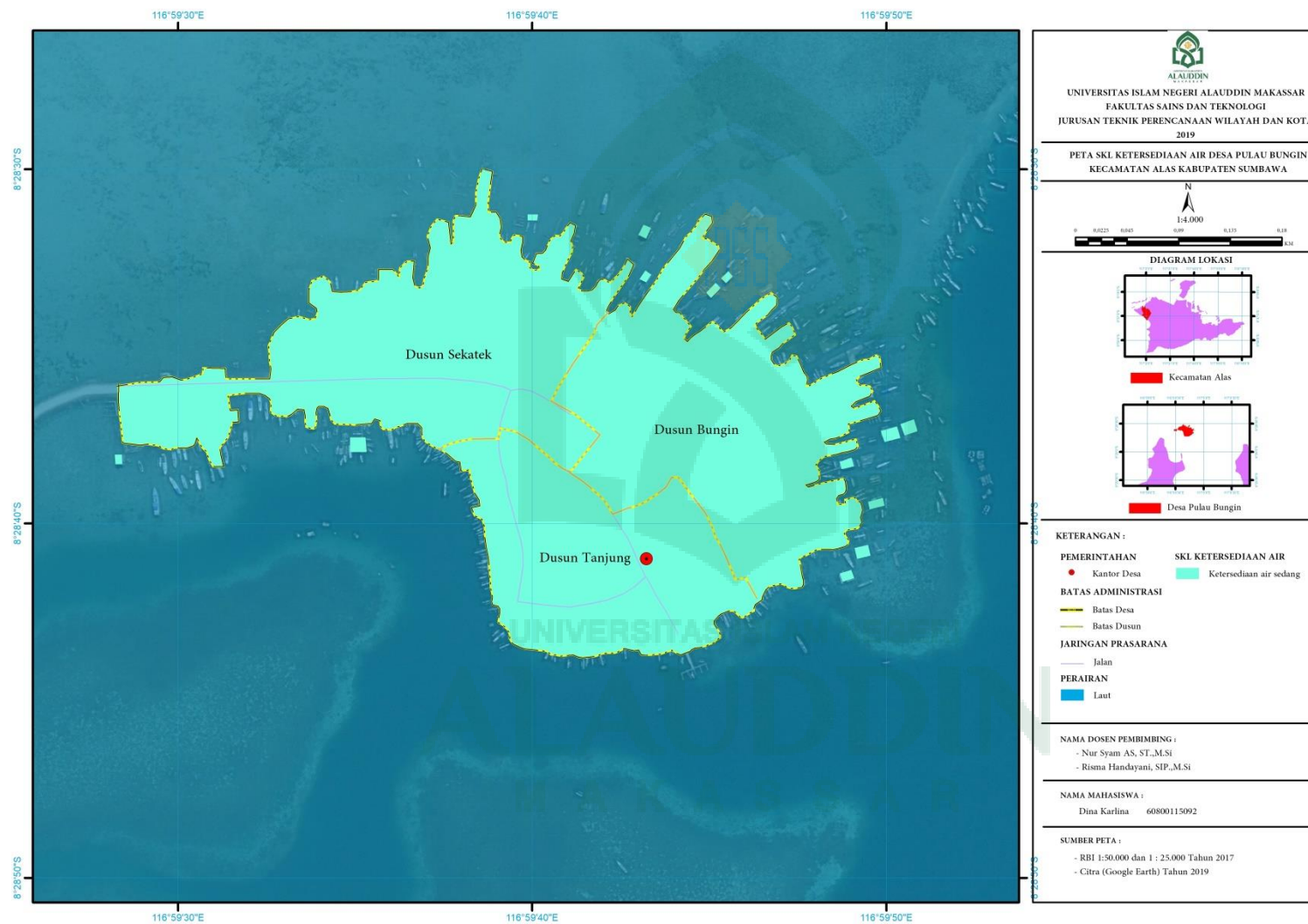


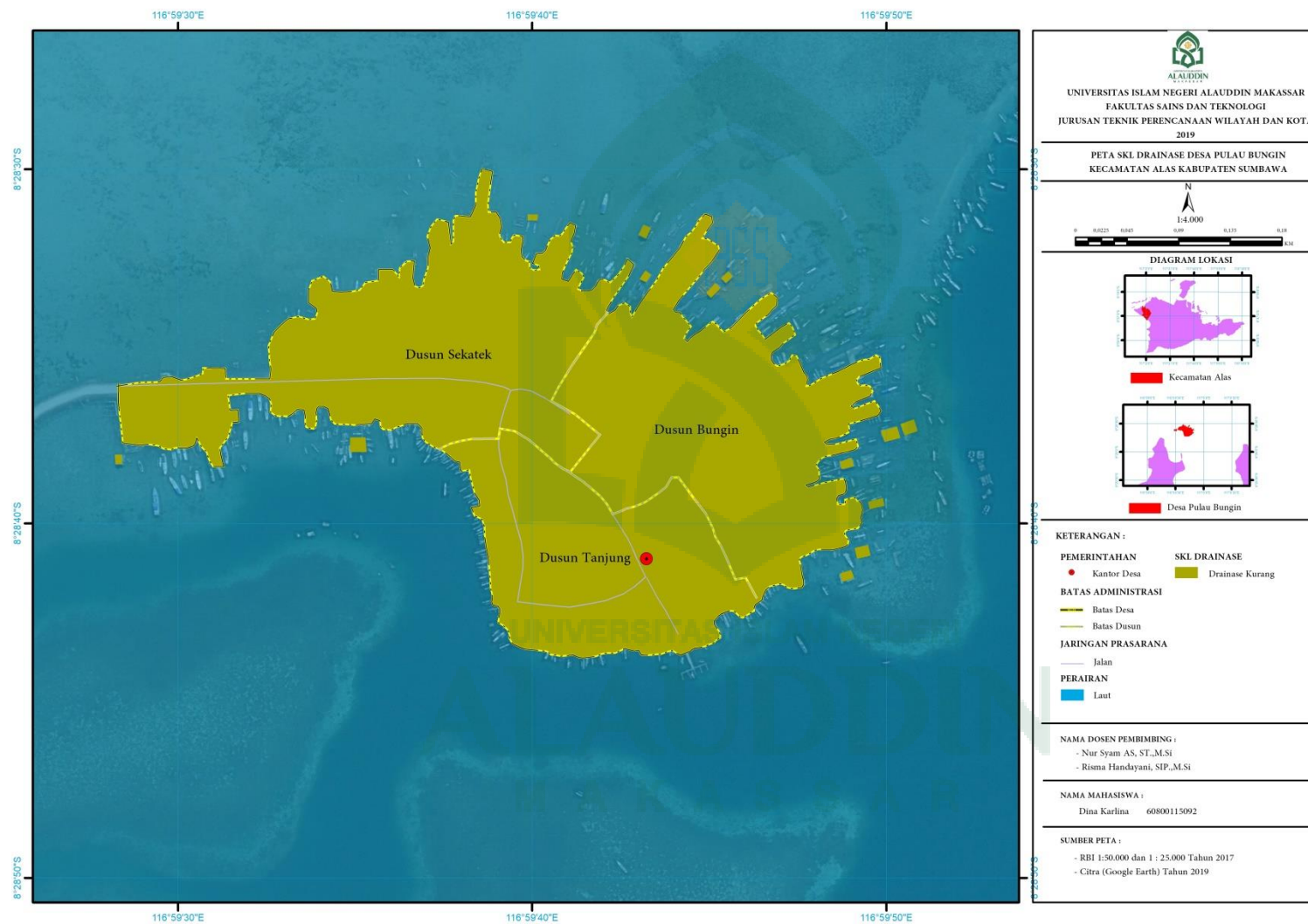


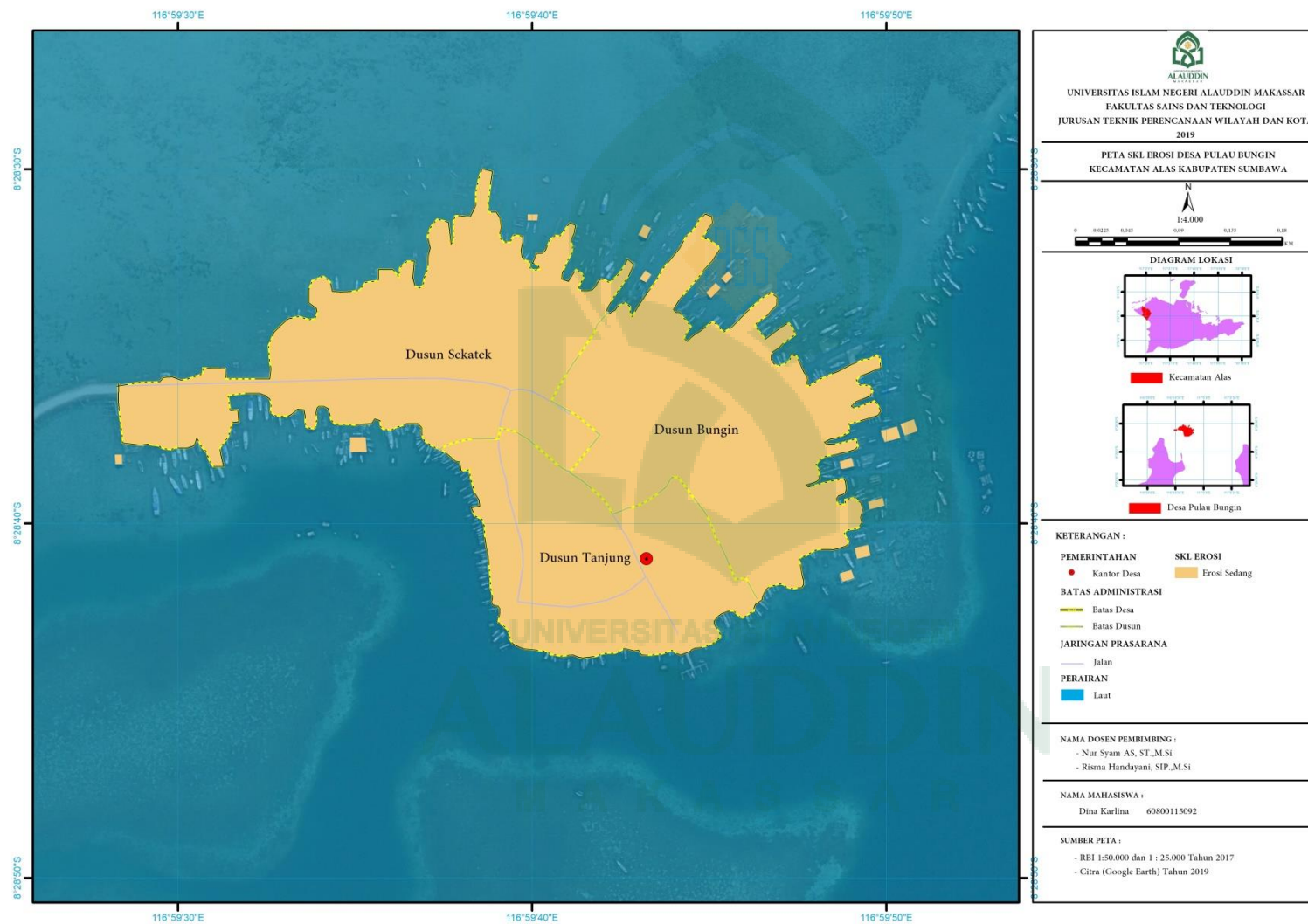


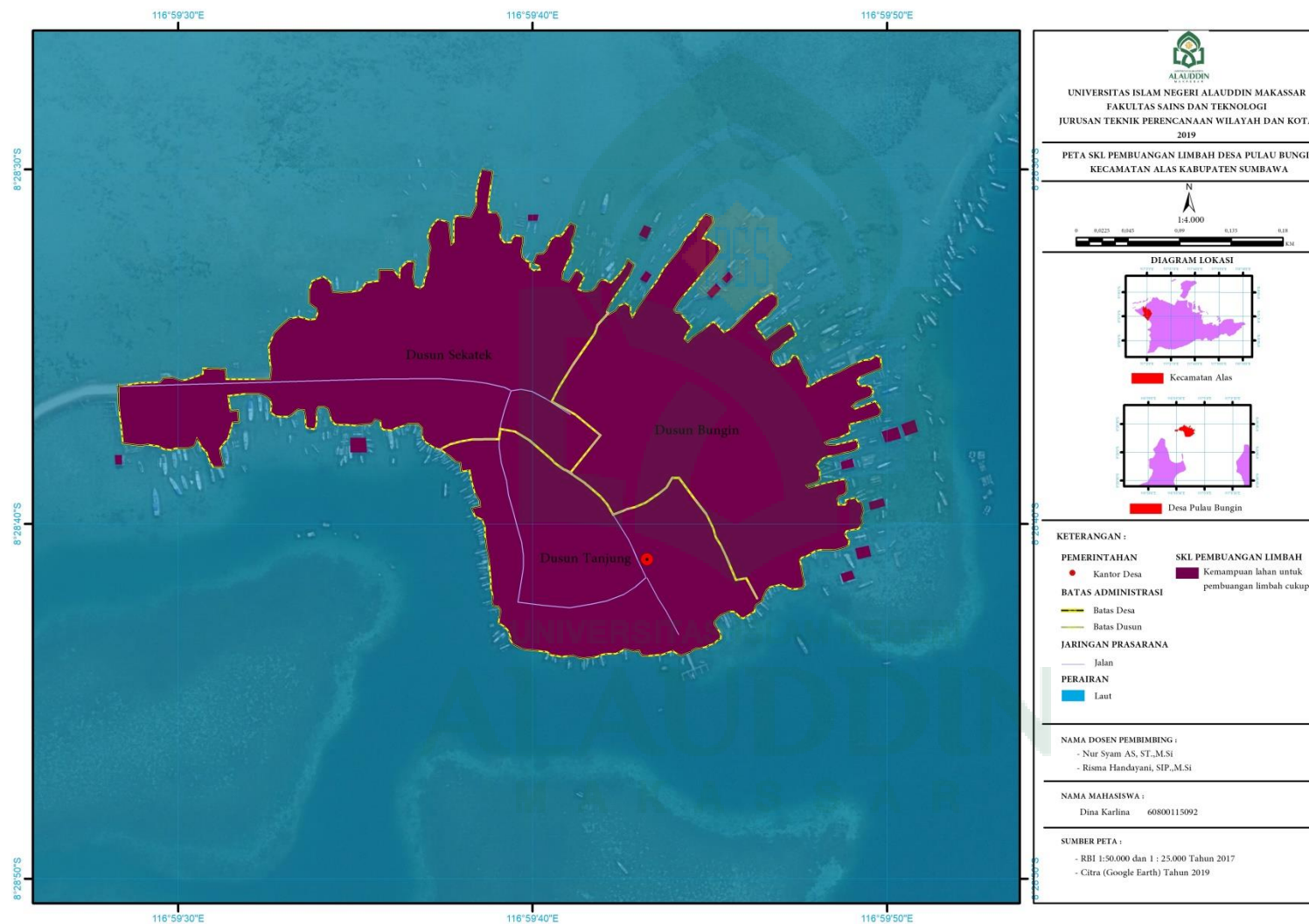




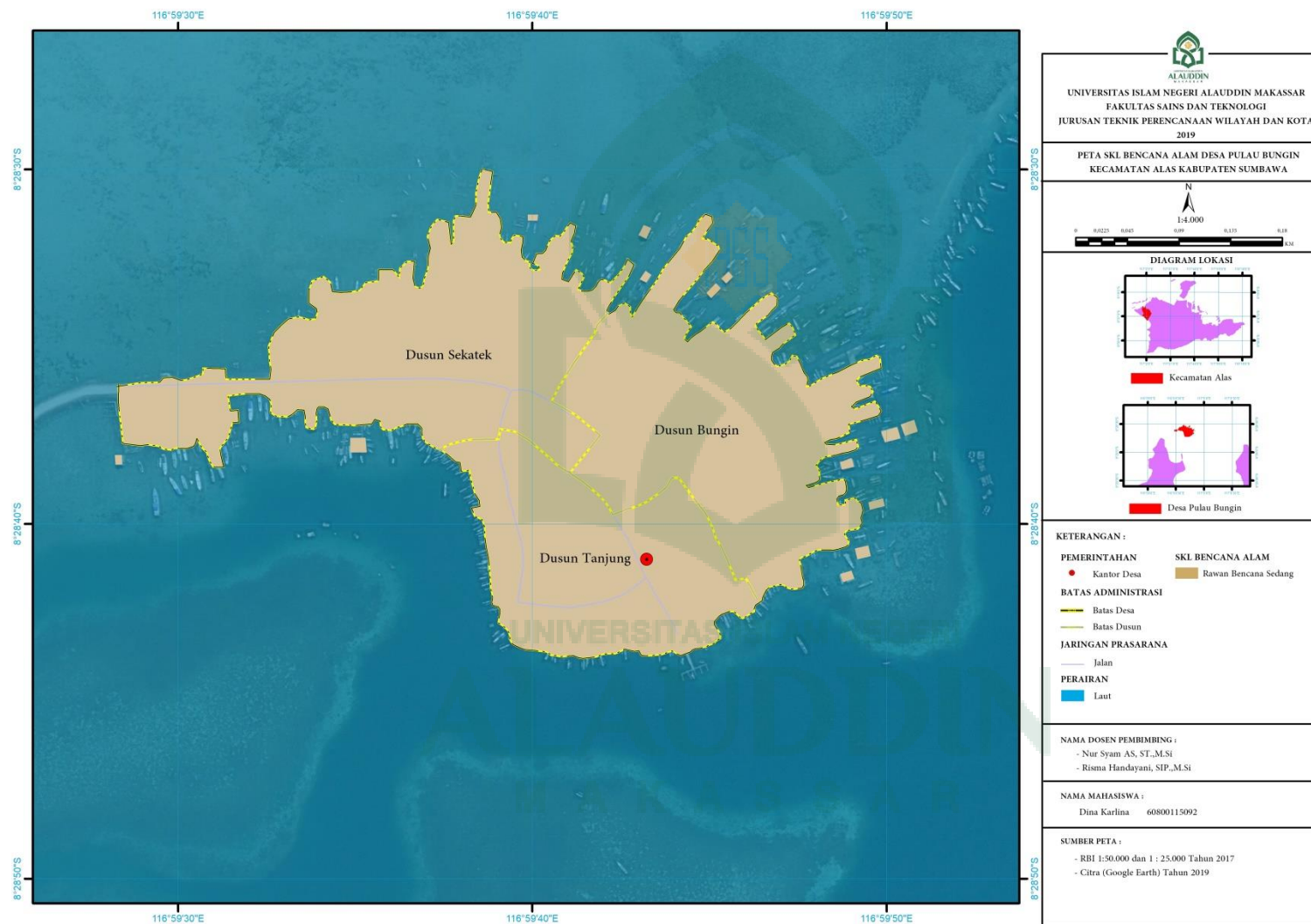


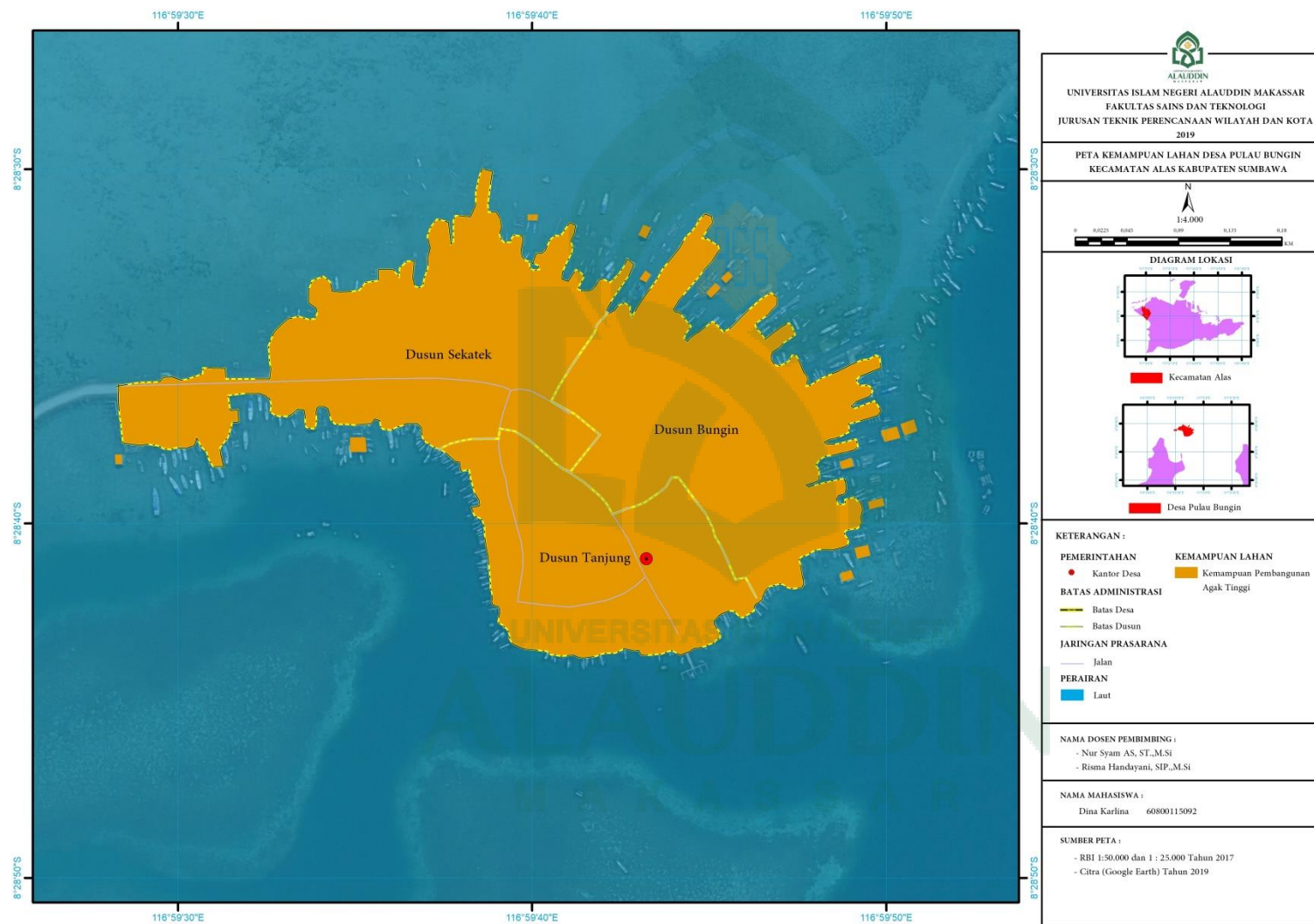












### ***E. Arahkan Penataan Kawasan Permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten***

#### ***Sumbawa ditengah Keberadaan Budaya Nangung Rumah***

Melihat dari semua permasalahan yang ada di Desa Pulau Bungin dan juga sesaknya kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh padatnya permukiman arahan penataan kawasan permukiman Desa Pulau Bungin, yakni sebagai berikut:

#### **1. Aspek Tradisi/Budaya**

Desa Pulau Bungin lebih kepada pembangunan permukiman, karena fasilitas untuk menunjang suatu wilayah yaitu terpenuhinya fasilitas pendukung seperti sarana peribadatan, kesehatan, perdagangan/niaga, dan RTH/lapangan olahraga itu semua semestinya ada tapi pada kondisi sekarang ini tidak ada atau tidak memadai, sementara kebutuhan akan fasilitas itu ada. Terkait daripada jenis kegiatan saat ini ada sifatnya yang berdiri sendiri seperti sarana pendidikan, peribadatan, dan perkantoran, ada yang bersifat melekat seperti sarana perdagangan/niaga dan yang perlu dilihat disini yaitu kawasan lindung yang sudah tidak ada lagi terlihat karena overloadnya pembangunan permukiman akibat tradisi *nangung rumah* tersebut. Fungsi lindung yang seharusnya ada menjadi tidak ada karena adanya budaya *nangung rumah* dan sudah tidak ada lahan didarat sehingga masyarakat membangun rumah diatas air yang semestinya itu adalah zona lindung. Untuk lahan permukiman yang sudah terbangun diizinkan pemanfaatannya secara terbatas dan bersyarat yang artinya tidak diizinkan untuk melakukan penambahan luasan.

Desa Pulau Bungin perlu untuk mempertahankannya tradisi tersebut, akan tetapi ada sedikit sentuhan perubahan pada budaya tersebut karena jika dilihat dari

jumlah penduduk yang semakin bertambah dan luas lahan yang sudah tidak ada akibat dari bertambahnya jumlah rumah setiap Tahun maka syarat daripada tradisi *nangung rumah* dapat dilakukan di lahan pulau lainnya, terutama pada pulau yang kurang penghuninya, yang mampu menampung dari masyarakat Desa Pulau Bungin dan material yang digunakan cukup menggunakan batu yang ada di daratan saja atau batu gunung.

## **2. Aspek Pola Ruang**

Arahan pengembangan kawasan permukiman masyarakat Desa Pulau Bungin dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perlu adanya pengembangan dengan cara pengadakan penataan, fasilitas yang berdasarkan pola ruang yang semestinya ada terutama RTH/lapangan olahraga, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan perdagangan/niaga itu perlu di kembangkan atau ditingkatkan.
- Untuk lahan permukiman yang sudah terbangun diizinkan pemanfaatannya secara terbatas dan bersyarat yang artinya tidak diizinkan untuk melakukan penambahan luasan.
- Pemanfaatan kawasan permukiman di Desa Pulau Bungin diarahkan ke Desa terdekat yang memiliki kepadatan penduduk rendah dan memiliki jumlah luas wilayah yang mampu menampung jumlah penduduk dari Desa Pulau Bungin tanpa meninggalkan tradisi *nangung rumah*, karena tradisi tersebut merupakan wujud dari masyarakat terutama kaum laki-laki yang hendak menikah agar bisa dianggap mandiri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.

- Diarahkan pada sarana peribadatan untuk diadakan mushollah atau masjid di setiap dusun, agar masyarakat mampu menempu akses ketika ingin beribadah sangatlah mudah, adapunlah yang dapat digunakan melalui swadaya masyarakat.
- Adapun pada rumah yang sudah berada diatas air yaitu untuk memudahkan akses menuju daratan maka dibuatlah jembatan yang berfungsi sebagai jalan.
- Diarahkan untuk sarana kesehatan yaitu dilihat dari kebutuhan lahan yang sudah tidak ada lagi tempat bermukim di darat, maka untuk pengadaan sarana kesehatan yaitu menggunakan rumah dinas dokter atau rumah warga yang dibeli dengan menggunakan uang pemerintah sehingga dijadikan sebagai fasilitas kesehatan.
- Kawasan lindung di kembangkan melalui batas aliran air dari rumah yang ada mlalui kegiatan penanaman pohon mangrove, kondisi ini masih memungkinkan untuk dilakukan mengingat kedalamannya kurang lebihh dari 1 meter.

#### ***F. Pandangan Islam Terhadap Penataan Kawasan Permukiman***

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi bagi umat Islam adalah landasan berpijak dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga kedua pijakan tersebut wajib dipakai dalam mengatur segala aspek kehidupannya dari pribadi, keluarga, lingkungan sampai dalam berbangsa dan bernegara. Dan setiap muslim yakin hanya dengan kedua pijakan tersebut kehidupan yang sejahtera, aman dan sentosa serta barokah dari Allah bisa dicapai. Demikian halnya dalam merencanakan desa dan lingkungan kehidupannya maka Al-Qur'an dan Sunnah menjadi acuannya dalam merencanakan penataan fasilitas-fasilitas dan penunjang-penunjangnya. Untuk mendapatkan acuan bagaimana Desa Pulau Bungin dan lingkungan direncanakan

secara alami maka kita harus mengkaji bagaimana kota-kota besar jaman keemasan peradapan Islam yang pernah jaya yakni periode abad 7 M sampai dengan 13 M dimana kekhalifahan Islam menguasai dunia sementara Barat sedang mengalami Abad Kegelapan. Kota-kota tersebut adalah Damaskus di Persia atau Syiria, Bagdad di Irak, Isfahan di Iran, Cordova dan serta Granada dengan istana Al Hambranya di Andalusia atau Spanyol. Dan tentu saja kota Mekah dengan Ka'bahnya sebagai Kiblat pusat orientasi peribadahan khususnya Ibadah Sholat dan Haji dan kota Madinah yang dibangun langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Dari kajian kota-kota tersebut dihasilkan beberapa kesamaan sebagai ketentuan yang bisa ditarik sebagai acuan atau dasar dalam merencanakan suatu wilayah sesuai dalam pandangan islam. Kemudian dari acuan tersebut kalau kita bandingkan dengan Desa Pulau Bungin yang merupakan kawasan permukiman permukiman maka bisa diajukan sebuah permasalahan yakni bagaimana pandangan islam dalam penataan kawasan di Desa Pulau Bungin. Sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /1:11:12 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi:" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya”. (Kementerian Agama, 2012)

Penjelasan dari Q.S Al-Baqarah /1:11:12 adalah bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. Tentunya nikmat

tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan-Nya. Serta merencanakan pembangunan penataan kawasan yang tidak merugikan masyarakat. Muhammad Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan firman-Nya, "*Waiza qila lahum la tufsidul ardi qalu innama nahnu muslihuna*," yakni sesungguhnya kami bermaksud melakukan perdamaian di antara kedua golongan, yaitu golongan kaum mukmin dan ahli kitab. Akan tetapi, anggapan mereka itu dibantah oleh firman-Nya: Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari Q.S Al-Baqarah /1:12 dengan kata lain, dapat diartikan "hanya saja hal yang mereka duga sebagai perbaikan dan perdamaian itu justru merupakan kerusakan itu sendiri; tetapi karena ketidakpahaman mereka, mereka tidak merasakan hal itu sebagai kerusakan.

Terkadang kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedomana pada ajaran Islam kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus tata ruang kota yang perencanaannya tidak berpedomana pada nilai-nilai islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan, dan bencana, sebagaimana yang terjadi di Desa Pulau Bungin yaitu diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga ekosistem laut dan darat supaya tidak terjadi suatu masalah yang jauh lebih besar lagi, setidaknya untuk pembangunan selanjutnya untuk tidak dilanjutkan lagi di Desa Pulau Bungin, perlu adanya penataan ulang, di perbaiki, atau membatasi masyarakat untuk menambah luas lahan setiap



lahan yang mereka miliki. Sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd/13:11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka” (Kementerian Agama, 2012)

Dalam ayat yang mulia ini terkandung penjelasan, bahwasanya semua perkara di seluruh dunia ini terjadi dengan taqdir dan perintah-Nya. Namun Allah Swt telah menjadikan sunnah- sunnah kauniyah dan syari'at dalam merubah nasib suatu kaum. Sehingga umat yang menjalankan sunnah-sunnah kauniyah dan syari'at untuk kejayaan, maka Allah Swt merubahnya menjadi jaya. Demikian juga sebaliknya, apabila mereka menjalankan sunnah-sunnah Allah untuk kerendahan dan kehinaan, maka Allah menjadikan mereka hina dan rendah. Hal ini telah terjadi pada umat-umat terdahulu, yang semestinya menjadi pelajaran bagi umat manusia pada zaman sesudahnya. sebagaimana yang terjadi di Desa Pulau Bungin yaitu diharapkan kepada masyarakat untuk mempunyai kesadaran sendiri demi kelangsungan sumberdaya yang ada baik dilaut maupun didarat agar bisa dinikmati oleh anak cucu mereka kelak.

Dalam kaitannya dengan permasalahan di Desa Pulau Bungin pada Q.S Ar-Ra'd/13:11 mengisyaratkan bahwa kegiatan rumah di atas air laut dapat menjadi bencana di Desa Pulau Bungin. Pemanfaatan laut untuk rumah dengan melihat kondisi yang sudah terlaksana (*Nangung Rumah*), maka kembalinya kepada



masyarakat setempat untuk merubah pola pikir masyarakat, bahwa masyarakat setempatlah yang dapat merubahnya sehingga pemanfaatan ruang laut untuk bangunan rumah dapat diatasi. Adapun keberlangsungan tradisi *Nangung Rumah* dapat saja tetap dilakukan dengan menetapkan/memilih lokasi yang bukan diatas air laut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang telah dilakukan yakni sebagai berikut:

##### 1. Pola permukiman Desa Pulau Bungin

- Pola permukiman di Desa Pulau Bungin merupakan pola jenis seragam dikarenakan jarak antar rumah rata-rata 1 meter sampai 2 meter yang berkembang menghadap arah utara karena memiliki kedalamannya kurang lebih dari 1 meter saja.
- Kawasan budidaya sudah tidak ada lagi terlihat di tinjau dari *Budaya Nangung Rumah* karena overloadnya pembangunan rumah hingga keluar dari zona lindung.
- Akibat dari pada pembangunan yang tidak terencana tersebut, mengakibatkan tata bangunan yang tidak beraturan, di samping itu infrastruktur pendukung permukiman ini berkembang tidak didasarkan oleh ketersediaan infrastrukturnya, terutama jalan lingkungan. Sebagian rumah tidak memiliki layanan jalan lingkungan untuk rumah yang berada di atas air, justru tidak dilengkapi dengan jalan dan hanya berupa jalan darurat berupa jalan dari kayu.

## 2. Pengembangan berdasarkan pola permukiman Desa Pulau Bungin

- Berdasarkan hasil perhitungan maka proyeksi penduduk dari tahun 2019-2039 sudah tidak memungkinkan Desa Pulau Bungin untuk menjadi tempat bermukim masyarakat
- Perlu adanya pengembangan dengan cara pengadakan penataan fasilitas yang berdasarkan pola ruang dan kawasan lindung di kembangkan melalui batas aliran air dari rumah yang ada melalui kegiatan penanaman pohon mangrove pada kedalamannya kurang lebihh dari 1 meter.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Budaya *Nangung Rumah* yang terdapat di Desa Pulau Bungin yang didominasi oleh suku Bajo merupakan warisan budaya dari nenek moyang mereka sehingga perlu untuk mempertahankannya, akan tetapi ada sedikit sentuhan perubahan pada budaya tersebut karena jika dilihat dari jumlah penduduk yang semakin bertambah dan luas lahan yang semakin sempit akibat dari bertambahnya jumlah rumah setiap tahun maka diarahkan untuk di pindahkan di lokasi yang terdekat dengan material yang digunakan cukup menggunakan batu yang ada di daratan saja.
2. Memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Pulau Bungin supaya pola fikir mereka bisa berubah terhadap masa depan generasi selanjutnya, di karenakan

Pulau Bungin yang semakin sesak dan tidak bisa di huni lagi untuk kehidupan selanjutnya.

3. Kepadatan penduduk yang semakin meningkat di Desa Pulau Bungin berdampak pada lingkungannya sehingga diharapkan kepada masyarakat agar mampu menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kebakaran karena jarak antar rumah sangatlah dekat yaitu 1 sampai 2 meter saja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, M. (2016). **Peranan Kearifan Lokal ( Local Wisdom ) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah (Vol. 15)**. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. **Kecamatan Alas Dalam Angka**: Sumbawa.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. **Kecamatan Alas Dalam Angka**: Sumbawa
- Burhan (2009). **Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya**. Jakarta : Prenada Media Group.
- Campbel, Tom. (1994). **Tujuh Teori Sosial**. Yogyakarta: Kanisius.
- Heryanto. (2017). **Arahan Pemanfaatan Lahan Pada Kawasan Lindung Enrekang**. Parepare: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Hermansyah, Dwi Lestari, I., & Syafruddin. (2017). **Identifikasi Kearifan Tradisional Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumberdaya Alam Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir di Desa Bungin, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa)** Hermansyah (pp. 1–6). Sumbawa: Universitas Samawa.
- Inggriani, R. (2018). **Pelestarian Pola Permukiman Berbasis Kearifan Lokal Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap**. Makassar: Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar.
- Kementrian Agama RI, 2012. **Al-Qur'an dan Tafsirnya**. Sinergi Pustaka Indonesia: Jakarta.
- Kun Marjanto, D., & Syaifuddin. (2013). **Potensi Budaya Masyarakat Bajo Di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa**. Mataram: Puslitbang Kebudayaan, Kemdikbud Pusat Bahasa Provinsi NTB.
- Marfai, D. (2016). **Arahan Pengembangan Kawasan Kasus Di Sebagian Pesisir Pemalang**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Anggota Ikapi.
- Muta'ali, L. (2012). **Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah**. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi.
- Muta'ali. Lutfi. (2015). **Teknik Analisis Regional**. yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/PERMEN/M/2008 **Tentang Pedoman Keresasian Kawasan Peumahan dan Permukiman**.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 **Pedoman Teknis Analisis**

**Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.**

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa. Perda Nomor 10 Tahun 2012 **Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa.**
- Rusman. (2018). **Studi Kawasan Permukiman Berbasis Gis Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.** Makassar: Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Robert J. Kodoatie, R. S. (2010). **Tata Ruang Air.** Yogyakarta: Andi.
- Sadana, A. S. (2014). **Perencanaan Kawasan Permukiman.** Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sahambangun, D. S., Warouw, F., & O Waani, J. (2014). **Pola Permukiman Rumah Berlabuh Masyarakat Serui Ansum di Kota Sorong.** Manado: Arsitektur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- Sri Mudiastuti, P. (2003). **Program Penataan Kawasan Nelayan Kawasan Pemukiman Muara Angke Jakarta Utara Ke Laut Jawa.** Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sobirin, A. (2002). **Budaya : Sumber Kekuatan Sekaligus Kelemahan Organisasi (Vol. 1, Pp. 1–23).** Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Trigunarso, (2017). **Perencanaan Pembangunan Daerah Teori & Aplikasi.** Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Cimanggis. Depok: Riefmanto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 **Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- Uton Rustan, H. (2001). **Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Dalam Otonomi Daerah (Vol. XVII, Pp. 172–188).** Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung.
- Yunus, R. (2013). **Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa ( Penelitian Studi Kasus Budaya Huyula di Kota Gorontalo ) (Vol. 14, pp. 65–77).** Bandung: Kewarganegaraan Pascasarjana UPI.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Dina Karlina** Lahir di Sumbawa tanggal 11 Nopember Tahun 1997, merupakan anak bungsu dari-4 bersaudara dari pasangan Ayahanda **Abdul Kadir** dan Ibunda **Jawiyah** yang merupakan Suku Bugis yang tinggal dan menetap di Sumbawa Besar NTB. Dengan riwayat pendidikan yakni di TK Aba Desa Labuhan Ijuk pada Tahun 2002-2003.

Setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri Labuhan Ijuk pada Tahun 2003-2009, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Mataram pada Tahun 2009-2011, kemudian pindah sekolah di SMP Negeri 3 Sumbawa Besar pada Tahun 2011-2012 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar pada Tahun 2012-2015. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan Jalur Mandiri dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama 4 Tahun 5 bulan.